KETUA MPR RI DORONG REVISI UNDANG-UNDANG DESA SEGERA DISAHKAN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.01/TH.XVIII/I/2024

Wacana di Tengah Musim Kampanye

MENGKAJI ULANG SISTEM Demokrasi Langsung

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

30 **Nasional** Ajak Generasi Muda Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

32 **Kajian MPR** Mengupas Kelebihan Demokrasi di FGD MPR

39 **Selingan** Yogya Istimewa Untuk Indonesia

57 **Sosialisasi** Nilai Empat Pilar Pekuat Eksistensi Bangsa

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

08 BERITA UTAMA

Mengkaji Ulang Sistem Demokrasi Langsung

Perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudharatnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi.

18 Nasional

Ketua MPR RI Dorong Revisi Undang-Undang Desa Segera Disahkan

61 Sosialisasi

Masyarakat Desa Garda Terdepan Pembangunan Nasional

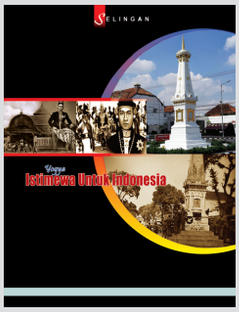

39 SELINGAN

Yogya Istimewa Untuk Indonesia

78 Wawancara

Sodik Madjahid

Pengantar Redaksi 04

Perspektif 06

Kolom 36

Aspirasi Masyarakat 47

Gema Pancasila 50

Varia MPR 66

Wawancara 70

Figur 72

Ragam 76

Dari Rumah Kebangsaan 82

Rehal 84

COVER

Edisi No.01/TH.XVIII/I/ 2024

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Mengkaji Ulang Sistem Demokrasi Langsung

KETUA MPR Bambang Soesatyo melempar wacana untuk mengkaji kembali sistem demokrasi pascareformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Kajian itu untuk menelaah sejauhmana sistem demokrasi terbuka memberikan kontribusi dan manfaat atau sebaliknya justru menimbulkan mudharat. Pertanyaannya, apakah sistem demokrasi langsung memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi?

Wacana untuk mengkaji sistem demokrasi langsung seperti itu sebenarnya bukanlah hal baru. Sudah sejak lama terdengar wacana untuk mengkaji kembali sistem pemilihan langsung, khususnya dalam Pilkada. Penyebabnya, karena adanya ekses negatif dalam pemilihan langsung dalam Pilkada. Salah satunya, sistem demokrasi langsung bisa menggiring seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasalnya, biaya untuk mengikuti kontestasi Pilkada sangat mahal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kajiannya mengungkapkan sistem pemilihan langsung memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Data faktual dari KPK menyebutkan sejak tahun 2004-2022 sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi. Dari jumlah itu, sebanyak 22 gubernur dan 154 bupati/walikota berurusan dengan KPK. Banyak juga kepala daerah yang sedang menjabat ditetapkan sebagai tersangka karena mengkorupsi dana APBD.

Dalam Pileg marak istilah NPWP alias "Nomor Piro Wani Piro" dalam memilih calon legislatif (Caleg). Ini merupakan indikasi money politics untuk membeli suara pemilih. Artinya, ada transaksi-transaksi dalam pragmatisme itu. Sistem pemilihan langsung telah melanggengkan demokrasi transaksional. Tentu, money politics itu menggerus idealism dan komitmen politik para Caleg untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pemilih pun lebih memilih siapa yang memberikan uang paling besar.

Pun demikian dengan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Sistem pemilihan langsung presiden dan wakil presiden ini telah menimbulkan perpecahan di masyarakat. Contohnya, pembelahan masyarakat yang terjadi pada Pilpres 2019 lalu. Istilah cebong dan kampret menjadi ciri keterbelahan masyarakat. Bahkan hingga kini pun keterbelahan masyarakat masih menjadi ancaman dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini.

Dari berbagai alasan di atas memang wajar bila muncul wacana untuk mengkaji ulang sistem demokrasi langsung. Memang perlu dipikirkan sistem demokrasi yang cocok bagi Indonesia agar tidak ada perpecahan di masyarakat setiap penyelenggaraan pesta demokrasi. Betapa pun, disadari setiap sistem demokrasi, baik demokrasi langsung yang ditandai dengan pemilihan langsung oleh masyarakat maupun demokrasi perwakilan misalnya pemilihan pemimpin melalui lembaga perwakilan, mengandung sisi atau efek negatif dan positif.

Namun, hingga hari ini, kita sudah memilih sistem demokrasi langsung. Masyarakat pun menjadi sudah terbiasa dengan pemilihan langsung. Perubahan dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung pun akan menimbulkan pro-kontra dan resistensi. Contohnya, ketika ada wacana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditunjuk dan diangkat oleh Presiden banyak mendapat penolakan. Ada yang menilai kembali ke sistem pemilihan tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi.

Karena itu, Badan Pengkajian MPR sebagai alat kelengkapan MPR, perlu mengkaji lebih mendalam wacana itu. Kiranya perlu pula uji publik atau melempar wacana itu ke berbagai kalangan masyarakat dan para stakeholder bangsa. ❑

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
REDAKTUR PELAKSANA
Indro Gutomo
KOORDINATOR REPORTASE
Dhina Kurnia Winanda
FOTOGRAFER
Tim Medvis
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
STAF DISTRIBUSI
Amelia Rubinta, Ikhwan Bimo F
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara
INDONESIA

Waspada Varian Baru Covid-19 dan Peduli Potensi Bencana

PENINGKATAN jumlah kasus positif Covid-19 dan potensi bencana di beberapa daerah membayangi kegiatan segenap elemen masyarakat mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Euphoria Pemilu 2024 dan libur akhir tahun jangan sampai membuat masyarakat lengah. Sebaliknya, tetap waspada terhadap penyebaran wabah varian baru Covid-19 dan juga peduli pada potensi bencana, seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, hingga potensi banjir dan tanah longsor.

Imbauan tentang perlunya mewaspadai penyebaran Covid-19 dan kepedulian akan potensi bencana sekarang ini patut dikedepankan karena memang ada urgensinya. Paling utama adalah fakta sedang mewabahnya varian baru Covid-19 yang kemudian diikuti dengan peningkatan jumlah kasus positif di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Saat wabah Covid-19 muncul lagi, mobilitas masyarakat akan meningkat jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dan juga faktor adanya kerumunan massa peserta kampanye politik.

Selain itu, sudah menjadi fakta pula bahwa jelang akhir dan awal tahun – yang ditandai dengan peralihan musim kemarau memasuki musim hujan — selalu menghadirkan fenomena alam yang tak jarang menghadirkan ekses, seperti curah hujan tinggi, angin puting beliung, gempa bumi hingga banjir dan tanah longsor.

Kementerian Kesehatan RI sudah menginformasi dan juga memastikan penyebaran wabah Covid-19 dengan jumlah kasus positif yang cenderung terus meningkat. Sementara itu, fenomena alam yang menghadirkan ekses bagi warga lokal sudah terjadi di sejumlah daerah, seperti banjir bandang, angin puting beliung yang menimbulkan kerusakan, gempa bumi hingga erupsi gunung berapi. Kecenderungan seperti itu patut diwaspadai oleh semua orang, terutama karena libur Nataru mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Akan ada kerumunan warga di bandara dan pelabuhan, belum lagi kerumunan massa kampanye Pemilu.

Dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), muncul perkiraan tentang mobilitas masyarakat sepanjang periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mencapai 107,63 juta orang, atau 39,83% dari total populasi Indonesia. Puncak arus keberangkatan libur Natal 2023 diperkirakan Sabtu 23 Desember 2023, sedangkan puncak arus keberangkatan libur Tahun Baru 2024 diprediksi pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Relevan dengan hasil survei itu, Kementerian Kesehatan RI pada Selasa (12/12) mengimbau masyarakat untuk melengkapi vaksinasi Covid-19, karena jumlah kasus baru kembali melonjak. Publik pun didorong untuk kembali disiplin menjalani protokol kesehatan (Prokes), menggunakan masker, serta mengimbau masyarakat kelompok rentan agar segera melengkapi vakinasi atau booster. Imbauan yang sama juga disuarakan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). IDI menekankan pentingnya masyarakat kembali menjaga protokol kesehatan menyusul peningkatan jumlah kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Bahkan, Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan surat edaran tentang waspada terhadap lonjakan Covid-19 bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri. Saat ini, sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19 di 104 negara karena varian EG.5, EG.2, HK.3 dan BA..2.86. Di Asia Tenggara, kenaikan kasus Covid-19 tercatat di Filipina, Singapura, dan Malaysia. Belakangan ini, kecenderungan yang sama juga mulai terdeteksi di dalam negeri.

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa varian baru virus Covid-19, yaitu EG.5 dan EG.2, masuk ke Indonesia sejak Agustus 2023. Dua varian ini signifikan memicu kasus positif Covid-19 di Indonesia. Kalau sebelumnya hanya di kisaran 10 sampai 20 kasus baru per minggu, perkembangannya kemudian memang patut diwaspadai, karena memasuki pekan terakhir November 2023, peningkatannya mencapai 267 kasus baru per minggu. Belakangan ini, terlihat kecenderungan peningkatan kasus positif di hampir semua provinsi.

Untuk membangkitkan kepedulian masyarakat, Kementerian Kesehatan hendaknya semakin intensif menyosialisasikan imbauan ini. Dan, tanpa harus menimbulkan panik, semua pemerintah daerah

(Pemda) pun patut merespons imbauan dimaksud. Pemda, melalui dinas kesehatan masing-masing, mulai pro aktif mengajak warga waspada terhadap penyebaran varian baru Covid-19, misalnya dengan menyosialisasikan imbauan penggunaan masker di ruang publik dan berupaya melaksanakan Prokes, termasuk menghindari kerumunan orang.

Selain karena faktor mewabahnya varian baru Covid-19, Kementerian Kesehatan juga mengimbau masyarakat mewaspadai peningkatan kasus pneumonia di Indonesia. Kendati total kasus yang terkonfirmasi mycoplasma pneumonia belum banyak, masyarakat diimbau untuk tidak lengah. Upayakan untuk memakai masker di ruang publik guna menghindari kemungkinan infeksi sistem pernafasan akibat bakteri mycoplasma pneumonia yang sedang mewabah.

Selain itu, tak kalah pentingnya adalah mewaspadai dan peduli akan potensi bencana yang ditimbulkan oleh fenomena alam yang saat ini bertransisi dari musim kemarau ke musim hujan. Transisi musim itu tak jarang menghadirkan ekses, dan semua orang sudah pernah mengalami dampaknya. Beberapa peristiwa atau bencana skala kecil sudah terjadi di beberapa daerah.

Sejak awal Desember 2023 misalnya, terjadi gempa bumi di sejumah daerah. Pada Sabtu (2/12) tengah hari, kota Malang diguncang gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,2. Setelah itu, Pulau Karatung di Sulawesi Utara pun digetarkan gempa bumi M 5,6 pada 7 Desember 2023. Keesokan hari, Jumat (8/12) dini hari pukul 02.00 WIB, Kota Bogor, Jawa Barat, pun diguncang gempa berkekuatan M 4,0, yang getarannya dirasakan hingga Sukabumi dan sekitarnya.

Di hari pertama bulan Desember 2023 malam, banjir bandang dan tanah longsor terjadi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Toba, dengan luas Daerah Tangkapan Air (DTA) mencapai 478,28 hektar. Area terdampak banjir mencakup ladang, pertanian serta pemukiman di desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Seminggu kemudian, tepatnya Jumat (8/12), sejumlah wilayah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, juga terjadi tanah longsor dan banjir bandang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo mencatat, dua orang meninggal dunia dalam kejadian tanah longsor.

Selain itu, erupsi dua gunung berapi baru-baru ini pun hendaknya mendorong masyarakat untuk waspada. Setelah erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat, Gunung Merapi di Jawa Tengah menunjukkan aktivitas kegempaan dan mengeluarkan awan panas sejak Jumat (8/12) dan tujuh kali meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur maksimum 3,5 kilometer ke arah Kali Krasak. Tercatat delapan kali gempa awan panas guguran, 27 kali gempa guguran, tujuh kali gempa fase banyak, dan empat kali gempa vulkanik dangkal.

Sejumlah contoh kasus ini mengingatkan segenap elemen masyarakat untuk selalu waspada akan wabah penyakit saat ini, serta peduli potensi bencana dan selalu mengutamakan kehati-hatian. Khusus untuk daerah rawan bencana, Pemda didorong untuk memulai mitigasi bencana guna meminimalisir risiko dan potensi kerugian masyarakat. ❏

Wacana di Tengah Musim Kampanye

Mengkaji Ulang Sistem Demokrasi Langsung

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudharatnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi.

DI TENGAH musim kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 muncul wacana untuk mengkaji ulang sistem demokrasi langsung. Wacana itu datang dari Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, Bambang Soesatyo melempar wacana untuk mengkaji ulang sistem demokrasi pascareformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudharatnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi," ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Banjarnegara, Kamis, 14 Desember 2023.

Pemilu 2024 saat ini sedang memasuki masa tahapan kampanye yang berlangsung mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pemilu yang diselenggarakan sekali setiap lima tahun ini untuk memilih anggota legislatif (DPR Pusat, DPD, serta DPRD Kabupaten dan Kota) dan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sejak penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan amanah UUD hasil amandemen, yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." (lihat bagian kedua, "Dari Pemilihan Tidak Langsung Ke Pemilihan Langsung").

Dalam perjalanannya, pemilihan secara langsung tidak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden saja, tetapi juga untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta memilih kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, walikota, bahkan hingga kepala desa. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung mulai dilaksanakan sejak tahun 2005. Bahkan Pilkada secara langsung diselenggarakan serentak pada tahun 2015.

Setelah empat kali pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019), dan memasuki Pemilu 2024 ini, serta pelaksanaan Pilkada secara langsung sejak 2005, kini muncul suara-suara untuk mengkaji ulang pemilihan secara langsung. Seperti wacana yang dilempar Bamsoet di atas yang mengajak para stakeholder bangsa Indonesia untuk menelaah sejauhmana sistem demokrasi terbuka memberikan kontribusi serta manfaat bagi kemajuan bangsa.

Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan, sistem demokrasi langsung yang dianut bangsa Indonesia pascareformasi dan pasca-amandemen UUD 1945 pada kenyataannya telah

menggiring seseorang, khususnya calon pemimpin daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyimpulkan, sistem pemilihan langsung memiliki daya rusak yang luar biasa. Data faktual dari KPK menyebutkan, sejak tahun 2004 hingga 2022 sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi. Rinciannya, sebanyak 22 gubernur dan 154 bupati/walikota berurusan dengan KPK.

"Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya besar. Demokrasi di daerah yang mestinya dihadapi dengan riang gembira, malah berakhir duka. Banyak petahana dan calon kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena melakukan tindak pidana korupsi. Banyak kepala daerah yang sedang menjabat ditetapkan sebagai tersangka karena mengorupsi dana ABPD," papar Bamsoet.

Hal serupa juga terjadi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk memilih secara langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menjelang Pemilu 2024, dan pemilu-pemilu sebelumnya, terkenal istilah NPWP alias "Nomor Piro Wani Piro"—sebuah istilah pemilih yang menawarkan berani bayar berapa agar Caleg dipilih—alias money politics dalam pemilihan calon legislatif (Caleg).

Bambang Soesatyo

Menurut Bamsoet, pragmatisme ini muncul karena masyarakat belum siap melaksanakan pemilihan secara langsung.

"Sehingga semua terjebak pada demokrasi angka-angka dan transaksional yang sangat mahal. Sistem pemilihan langsung melanggengkan demokrasi transaksional, selain akan menggerus idealisme dan komitmen politik pada Caleg untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Akibatnya, pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas Caleg, namun lebih memilih siapa yang memberikan uang paling besar," tandas Bamsoet.

Bagaimana dengan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden dalam Pemilu? Bamsoet juga menilai sistem pemilihan langsung presiden dan wakil presiden perlu dikaji ulang. Alasannya, sesuai Pancasila, Indonesia identik dengan musyawarah atau keterwakilan. "Karena jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya adalah musyawarah kemufakatan kepemimpinan atau keterwakilan," katanya dalam Peringatan 9 Tahun UU Desa di Istora Senayan, Jakarta, pada Maret 2023 silam.

Menurut Bamsoet, sistem Pemilu di Indonesia saat ini menimbulkan perpecahan. Contohnya, efek Pilpres tahun 2019 yang menimbulkan keterbelahan antar-masyarakat masih terasa hingga kini. "Saya tidak ingin demokrasi yang dianut oleh Barat itu

La Nyalla Mahmud Mattalitti

memecahbelah bangsa kita. Pilih lurah berantem, pilih kepala desa berantem, pilih bupati, walikota berantem, pilih gubernur berantem. Pilih presiden residunya sampai sekarang keterbelahan itu masih kita rasakan. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan sistem demokrasi yang cocok bagi Indonesia agar tidak ada perpecahan setiap ada pesat demokrasi," tuturnya saat itu.

Ide pemilihan melalui musyawarah kemufakatan kepemimpinan atau keterwakilan mengingatkan kita pada usul Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti ketika menyampaikan pidato pengantar pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD Tahun 2023 di Gedung Hijau, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023. Sidang Tahunan MPR ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, hampir semua anggota MPR, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Negara, dan lainnya.

Dalam pidatonya La Nyalla mengusulkan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi dan berhak memilih serta melantik presiden dan wakil presiden. Usulan yang disampaikan dalam Sidang Bersama DPR-DPD ini merupakan Keputusan Sidang Paripurna DPD tanggal 14 Juli 2023, yaitu mengusulkan kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dia menilai, kontestasi politik dalam Pemilu merupakan cara liberal.

Menurut La Nyalla, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat malah melahirkan politik kosmetik yang mahal. "Pemilihan presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang difabrikasi," ujarnya.

Dia menilai, proses pemilihan pemimpin sekadar bermodalkan popularitas dan elektabilitas. Elektabilitas calon presiden hanya menggiring publik melalui angka-angka. Bahkan, dalam proses Pilpres rakyat disodorkan realitas politik yang telah didesain. Para buzzer di media sosial menggiring melalui angka-angka dengan narasi saling hujat atau puja puji buta. Pada akhirnya rakyat pemilih hanya disodori oleh realitas yang dibentuk sedemikian rupa.

Tubagus Ace Hasan Syadzily

Kemunduran Demokrasi

Intinya, dengan berbagai alasan dan argumen, baik Ketua MPR maupun Ketua DPD mengingingkan adanya upaya untuk mengkaji ulang sistem pemilihan langsung dalam Pemilu (legislatif maupun presiden) dan Pilkada. Namun, agaknya, tak semudah itu mengembalikan sistem demokrasi langsung menjadi demokrasi perwakilan. Resistensi dari berbagai kalangan, termasuk anggota dewan akan muncul terhadap usulan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi dan pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, secara tegas tidak setuju bila presiden dipilih kembali oleh MPR. "Saya sangat tidak setuju dengan usulan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR," tukasnya. "Pemilihan presiden langsung oleh rakyat merupakan mandat reformasi di mana rakyat yang menginginkan untuk memilih secara langsung presidennya," sambungnya.

Menurut Ace Hasan Syadzily, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan langsung itu, rakyat menggunakan hak politiknya. "Jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR RI maka dengan sendirinya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ini pasti membutuhkan amandemen kembali UUD. Secara sistem politik, demokrasi kita akan kembali mundur ke belakang," ujarnya.

Pun demikian resistensi terhadap wacana Pilkada tidak langsung atau pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tiffatul Sembiring, berpendapat, baik pemilihan secara langsung maupun pemilihan melalui perwakilan masing-masing mempunyai efek positif dan negatif. Seperti Pemilu (Pileg, Pilpres, Pilkada) pasti ada efek positif maupun negatifnya. Memang, pemilihan melalui perwakilan lebih simpel dan

sederhana. Tetapi, banyak juga anggota masyarakat yang menyatakan bahwa DPR dan MPR yang ada belum sepenuhnya mewakili rakyat. "Saya sendiri setuju dengan sistem Pemilu langsung karena bisa menjamin adanya keterbukaan," kata Tiffatul Sembiring kepada *Majelis*.

Tiffatul mengakui bahwa kontestasi politik di Indonesia itu *high cost* (membutuhkan biaya besar). Baik Pemilu langsung maupun Pemilu tidak langsung masing-masing berpotensi korupsi dan ada *money politics*. "Kalangan politisi sudah mengetahui hal ini. Memilih kepala daerah melalui DPRD pun ada money politic-nya. Tidak ada cerita kosong, jadi ada jual beli juga," katanya.

Karena itu, menanggapi wacana untuk mengkaji ulang demokrasi langsung, Tiffatul Sembiring mengusulkan agar wacana itu dilempar ke tengah masyarakat dan para tokoh untuk mengetahui respon sekiranya pemilihan dikembalikan kepada sistem tidak langsung seperti pernah dipraktikan Orde Baru. Padahal, dalam kenyataannya, masyarakat sudah terbiasa dengan demokrasi langsung. Untuk mengembalikan ke sistem demokrasi perwakilan perlu perubahan undang-undang dan persetujuan DPR dan pemerintah.

"Ini harus diuji publik. Contohnya, wacana Gubernur DKI Jakarta dipilih tidak langsung menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Jadi, memang harus diuji publik dulu. Pendapat publik harus didengar," kata Pimpinan Badan Pengkajian MPR ini.

Seperti diketahui DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dalam pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ itu disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernjur Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat DPRD. Dengan kata lain, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sebanyak tujuh fraksi di DPR RI menyatakan, menolak penunjukan gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu oleh Presiden. Hanya dua fraksi yang mendukung, yaitu Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, mayoritas fraksi di DPR menolak pemilihan tidak langsung dalam Pilgub DKI Jakarta.

Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur

Tiffatul Sembiring

Wahid, MA., turut menolak RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi Jakarta) itu. Menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, penunjukan atau pengangkatan gubernur dan wakil gubernur oleh Presiden telah merampas kedaulatan rakyat Jakarta, diskriminatif dan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Ini jelas bentuk kemunduran demokrasi, serta merampas kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan kepala daerah yang harus dilakukan secara demokratis dalam

Hidayat Nur Wahid

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Itu juga bentuk diskriminasi karena di provinsi-provinsi lain yang mempunyai keistimewaan/kekhususan, seperti Aceh dan Papua, maka Gubernur dan Wagubnya tidak ada yang ditunjuk atau diangkat oleh Presiden, semuanya dipilih langsung oleh Rakyat. Kecuali DIY, itu pun juga Gubernur dan Wakilnya tidak ditunjuk atau diangkat oleh Presiden," katanya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 6 Desember 2013.

Menurut HNW, ketentuan penunjukan atau pengangkatan Gubernu dan Wakil Gubernur Jakarta oleh presiden bisa sangat membahayakan demokrasi dan cita-cita reformasi. Sebab, ketentuan baru itu memberikan kewenangan yang sangat besar kepada presiden untuk menunjuk atau mengangkat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Walaupun ada "basa-basi" disebutkan perlu memerhatikan usul dan pendapat DPRD, tetapi kewenangan mutlak tetap berada di presiden.

"Ini membuka peluang yang bisa disalahgunakan apabila presiden berperilaku nepotisme. Bisa saja nanti yang ditunjuk atau diangkat sebagai gubernur Provinsi Jakarta adalah anaknya, menantunya, atau adik iparnya, dengan berjuta alasan dan beribu dalih," tukasnya.

Kini, pengkajian ulang demokrasi langsung yang diwacanakan Ketua MPR dikembalikan lagi ke MPR. Badan Kelengkapan MPR yang akan melakukan kajian ini adalah Badan Pengkajian MPR. Sebenarnya, sudah sejak 2022 Badan Pengkajian MPR mewacanakan penerapan sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Wacana ini dilatarbelakangi sejumlah alasan, mulai dari demokrasi Indonesia yang dinilai sudah liberal hingga tingginya biaya Pilkada langsung.

Bahkan MPR menyebutkan kemungkinan Pilkada digelar asimetris sehingga tidak semua kepala daerah dipilih secara langsung. Hanya gubernur yang dipilih langsung, atau hanya bupati/walikota yang dipilih langsung oleh rakyat. Contoh sukses penerapan Pilkada tidak langsung ini sudah ada, yakni di DKI Jakarta. Rakyat hanya memilih gubernur, sedangkan walikota dan bupati ditunjuk. Badan Pengkajian MPR ini akan mengkaji secara serius wacana pemilihan tidak langsung ini. ❑

DER/MBO/BSC

Dari Pemilihan Tak Langsung ke Pemilihan Langsung

Bambang Soesatyo

KETUA MPR Bambang Soesatyo berulangkali menyebutkan sistem demokrasi langsung pasca-reformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden (Pilpres), perlu dikaji ulang. Kaji ulang itu untuk melihat sejauhmana sistem demokrasi langsung memberi kontribusi dan manfaat bagi kemajuan bangsa. Apakah sistem demokrasi langsung memberi banyak manfaat, atau sebaliknya justru lebih banyak mudharatnya.

Memang, sebelum pelaksanaan demokrasi langsung, Indonesia menerapkan demokrasi tidak langsung atau pemilihan melalui perwakilan.. Pada masa Orde Baru, presiden dipilih anggota MPR sebagai lembaga tertinggi yang anggotanya merupakan perwakilan politik (anggota DPR), perwakilan daerah (Utusan Daerah), dan perwakilan golongan (Utusan Golongan). Mekanisme ini dianggap sebagai penjabaran sila Keempat Pancasila.

Melalui mekanisme itu, Soeharto berulangkali terpilih menjadi presiden hingga 30 tahun. Gerakan reformasi tahun 1998 mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Salah satu tuntutan reformasi adalah melakukan amandemen konstitusi, di antaranya untuk mengatur pembatasan masa jabatan presiden. Sebelum diamandemen, Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Pasal itu berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sejarah, melalui pasal ini, Soeharto terpilih sebagai presiden hingga enam periode. Pasal itu kemudian diamandemen melalui Panitia Ad Hoc (PH) I Badan Pekerja MPR pada tahun 1999. Setelah diamandemen Pasal 7 UUD 1945 ini berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Namun, amandemen konstitusi tidak hanya mengatur masa jabatan presiden, tapi juga mengatur tentang mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Amandemen konstitusi yang ketiga dan keempat pada tahun 2001 - 2002 mengatur mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden.

Amandemen itu adalah amandemen Pasal UUD 1945 tentang Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 yang semula terdiri dari 2 ayat, kemudian diubah dan dilakukan penambahan dengan menyertakan Pasal 6A. Setelah amandemen UUD 1945, pasal ini terbagi menjadi dua pasal, yakni Pasal 6 yang terdiri dari 2 ayat dan Pasal 6A yang tersusun atas 5 ayat.

Hasil amandemen itu, antara lain Pasal 6A ayat (1) yang menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Lengkapnya, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,” demikian bunyi pasal tersebut.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Berikutnya, Pasal 6A ayat (3) menyebutkan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya duapuluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Berdasarkan UUD hasil amandemen itu, pada tanggal 31 Juli 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. UU ini menjadi landasan pelaksanaan Pemilu Presiden secara langsung untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Artinya, melalui pemilu tersebut, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilu Presiden secara langsung untuk pertama kali digelar pada 5 Juli 2024. Pilpres diikuti lima pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Kelima pasangan itu adalah pasangan Capres dan Cawapres Wiranto

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dan Salahuddin Wahid, lalu Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi. Kemudian, pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, serta Hamzah Haz dan Agum Gumelar..

Jumlah pemilih pada pilpres putaran pertama sebesar 153.320.544 orang. Dari angka itu, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 79,76% atau 122.293.844 orang. Dari total suara yang masuk, yang dinyatakan sah sebanyak 97,84% atau 119.656.868 suara.

Dari lima kandidat Capres dan Cawapres, pasangan SBY-Jusuf Kalla mendapat suara terbanyak, disusul oleh pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Mengutip dari *Kompas.com*, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperoleh suara sebanyak 69.266.350 suara atau 60,62%.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla kemudian dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2004. Sejak saat itu, Pilpres selalu digelar secara langsung. Rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dalam perjalanannya, pemilihan secara langsung tidak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden saja, tetapi juga untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan DPRD, serta memilih kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, walikota, bahkan hingga kepala desa.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak tahun 2005. Sebelumnya, mekanisme pengisian jabatan kepala daerah mengalami beberapa kali perubahan sistem. Dalam artikelnya di *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, yang berjudul: "Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma. Kekuasaan dalam Pemilu" (2011), Retno Saraswati menyebutkan empat sistem pemilihan kepala daerah yang pernah digunakan di Indonesia sebelum pemilihan langsung.

Pertama, sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pusat. Sistem ini sudah digunakan sejak masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, penjajahan Jepang, serta setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah menggunakan sistem ini berdasarkan UU 1/1945, UU 22/1948, dan UU 1/1957.

Kedua, sistem penunjukan. Sistem ini digunakan berdasarkan Penetapan Presiden 6/1959 jo Penetapan Presiden 5/1960, UU 6/1956, dan UU 18/1956, atau yang dikenal dengan era Dekrit Presiden. Selain itu, sistem ini juga diberlakukan berdasarkan Penetapan Presiden 6/1959 jo Penetapan Presiden 5/1960 disertai alasan "situasi yang memaksa".

Ketiga, sistem pemilihan perwakilan. Sistem ini merupakan perwujudan UU 5/1974. Dengan sistem ini, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh lembaga DPRD. Selanjutnya, presiden akan menentukan calon kepala daerah terpilih.

Keempat, sistem pemilihan perwakilan (murni). Sistem ini mendasarkan pelaksanaannya pada UU 18/1965 dan UU 22/1999. Dengan sistem ini, kepala daerah dipilih secara murni oleh lembaga DPRD tanpa intervensi pemerintah pusat.

Selanjutnya, sejak 2005, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, Pilkada langsung yang diselenggarakan secara serentak sejak 2015 hingga sekarang dimaksudkan untuk meminimalkan biaya, baik sosial, politik, maupun ekonomi. ❑

BSC

SBY-Jusuf Kalla

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ir. H. Tiffatul Sembiring, Pimpinan Badan Pengkajian MPR

Ada Sisi Positif dan Negatif dari Sistem Demokrasi Langsung Maupun Perwakilan

KETUA MPR Bambang Soesatyo melemparkan kembali wacana untuk mengkaji ulang sistem demokrasi pascareformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), hingga Pemilihan Presiden (Pilpres). Bamsoet menyebut perlu ditelaah sejauhmana sistem demokrasi terbuka memberikan kontribusi serta manfaat bagi kemajuan bangsa.

"Perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di 5 kecamatan Kabupaten Banjarnegara, Kamis, 14 Desember 2023.

Suara-suara untuk mengkaji ulang sistem demokrasi langsung sebenarnya sudah terdengar sejak lama. Pasalnya, sistem demokrasi langsung berpotensi menggiring orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Buktinya, tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut korupsi atau terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyebabnya, karena pada saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat besar. Karena itu, kepala daerah yang sedang menjabat ditetapkan sebagai tersangka karena mengorupsi dana APBD.

Itulah salah satu alasan perlunya mengkaji ulang sistem demokrasi langsung. Untuk mengulas masalah ini, Majelis mewawancarai Pimpinan Badan Pengkajian MPR Ir. H. Tiffatul Sembiring. Berikut wawancara dengan Tiffatul Sembiring yang juga Ketua Fraksi PKS MPR RI. Petikannya.

Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Banjarnegara, Ketua MPR Bambang Soesatyo melempar wacana untuk mengkaji ulang demokrasi langsung (pemilihan langsung dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres). Bagaimana tanggapan Bapak?

Kalau pemilihan dikembalikan kepada perlemen (MPR dan DPR) dalam sistem Pemilu kita sekarang maka tetap memiliki dampak positif dan negatif. Saya sendiri setuju dengan sistem Pemilu langsung karena bisa menjamin adanya keterbukaan. Dan, saya lebih setuju lagi kalau sudah ada penyederhanaan-penyederhanaan dalam sistem Pemilu langsung tersebut.

Sekarang ini, harus disadari bahwa setiap lima tahun sekali kita sibuk melaksanakan Pilkada, Pileg, serta Pilpres, dan itu ada positif negatifnya. Mungkin benar akan lebih simple jika pemilihan itu dilakukan melalui parlemen. Tetapi, banyak juga anggota masyarakat yang menyatakan bahwa MPR dan DPR itu belum sepenuhnya mewakili keinginan rakyat.

Alasan utama untuk mengkaji ulang sistem demokrasi langsung (pemilihan langsung) adalah pertimbangan manfaat dan mudarat dari sistem itu.

Bahkan sistem pemilihan langsung dinilai lebih banyak menimbulkan efek negatif. Apa pendapat Bapak?

Sebetulnya kedua alternatif (sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan) ini memiliki resiko yang sama. Dan, kita telah mengambil pilihan untuk memakai sistem demokrasi langsung di alam modern. Saya pernah bertanya kepada mendiang Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Saya tanya kepada beliau do you apply the democracy, (apakah Anda menjalankan demokrasi). Dia jawab: No, if you take the democracy, you also take the risk of democracy (tidak, kalau Anda mengambil demokrasi maka Anda juga akan mengambil resiko-resiko demokrasi). Negara kami kecil, multi etnis. Kalau demokrasi itu kami terapkan mungkin akan babak belur, gak bisa maju-maju.

Terus saya tanya, what about opposition party (bagaimana dengan partai oposisi). Jawabnya, yah, itu aksesoris sajalah. Mereka kami beri angka yang tidak besar-besar, paling tinggi 15%, supaya terlihat kami demokrasi. Begitulah jawaban seorang Lee Kuan Yew. Menurut saya, memang di masa modern sekarang, demokrasi itu ada positif negatifnya. Yang pasti, kita bukan otoriter bukan pula monarki absolut.

Salah satu efek negatif pemilihan langsung adalah mendorong orang (calon) untuk korupsi. Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut korupsi. Penyebabnya, biaya yang dikeluarkan calon sangat besar. Belum lagi istilah NPWP (Nomor Piro Wani Piro). Apa komentar Bapak ?

Kita semua sudah paham, Pemilu itu high cost. Tetapi, bukan berarti Pemilu tidak langsung atau via parlemen itu tidak ada peluang korupsinya. Bahkan, di kalangan politisi, kita semua tahu akan hal itu. Bahwa untuk memilih kepala daerah melalui DPRD pasti dibayar. Gak ada cerita kosong-kosong, jadi jual beli juga.

Kalau dikaji, memang biaya untuk majunya seorang kepala daerah sudah tidak masuk akal. Apalagi kalau dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh para kepala daerah. Saya saja bisa menghitung berapa kebutuhan biaya Pilkada. Dan, berapa penghasilan para kepala daerah.

Ambil sampel, misalnya Depok, jumlah penduduknya waktu itu sebanyak 1,2 juta. Pengeluaran rata-rata waktu itu adalah sebesar Rp 10.000/orang seharga kaos dalam. Jadi 1,2 juta jumlah penduduk dikali Rp 10.000, totalnya Rp 12 Miliar.

Sedang gaji seorang walikota tidak seberapa. Gaji pokoknya Rp 6,5 juta. Katakanlah dia bisa nabung, dengan upah pungut dan segala macamnya, Rp 15 juta misalnya satu bulan, kali 12 bulan baru Rp 180 juta, kali lima tahun Rp 900 juta. Sedangkan pengeluarannya mencapai Rp 12 miliar. Sudah barang tentu sang kepala daerah akan berfikir keras bagaimana mendapatkan hasil itu. Salah satu jalan keluarnya adalah korupsi. Atau, memberikan

konsesi kepada pengusaha yang dulu membantu dia. Jadi, memang keduanya ada positif dan negatifnya.

Akan tetapi, cara-cara ini sebenarnya bisa disiasati, yaitu cara kampanye atau cara belanjanya tidak boleh berlebihan. Nyatanya sekarang ini banyak kepala daerah terpilih karena faktor uang, bukan karena dia kader terbaik di sana. Sistem ini menurut saya yang harus diperbaiki.

Apakah mungkin kembali ke sistem demokrasi tidak langsung dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres? Kita melihat wacana Gubernur DKI ditetapkan secara tidak langsung telah menimbulkan banyak protes.

Ini harus diuji publik atau dilempar ke tengah masyarakat dan para tokoh, bagaimana sekiranya dikembalikan kepada sistem tidak langsung seperti yang dulu pernah dipraktikkan. Karena, sistem langsung ini sudah menyebar dan masyarakat juga sudah terbiasa. Tidak cukup itu, pergantian tersebut juga harus diikuti dengan mengubah undang-undang, butuh persetujuan DPR dan pemerintah.

Memang, waktu DKI diwacanakan dipilih secara tidak langsung, itu saja seketika ribut. Padahal, DKI hanya provinsi, sementara walikotanya tidak. Jadi memang harus diuji publik dulu. Pendapat publik harus didengar.

Apakah mungkin diterapkan sistem campuran? Artinya, ada daerah yang melakukan Pilkada langsung dan ada daerah di mana kepala daerah dipilih DPRD. Sedangkan Pilpres tetap dilakukan secara langsung?

Menurut saya akan kontroversi juga nantinya, bahkan bisa muncul lagi tuduhan ketidakadilan. Sekarang kita sering mendefinisikan daerah istimewa-daerah istimewa, tetapi sistem Pilkadanya berbeda. Ini sendiri sudah ramai dibahas para pakar. Menurut saya, kalau mau diberlakukan, diberlakukan saja semua tempat. Kecuali ada daerah khusus seperti Jakarta. Jakarta ini kan tempatnya sempit kalau semua walikotanya dipilih pasti akan ramai saling bersinggungan. Lainnya disamakan saja.

Jika demokrasi tetap dilakukan secara langsung, bagaimana mengeliminir efek negatif pemilihan langsung?

Kita harus selalu melakukan pembelajaran, apalagi kita ini sudah hampir 80 tahun merdeka, jadi harus terus belajar. Seperti yang juga dilakukan Amerika yang terus belajar. Untuk mengeliminir efek negatif Pemilu langsung, menurut saya harus ada pendidikan politik pada pemilih, dan ini adalah tugas partai. Partai bukan hanya pasang baliho, dan foto ketua-ketuanya, tapi tidak pernah turun ke lapangan. Tetapi, tiba-tiba mereka bagi-bagi duit. Bukan begitu semestinya fungsi partai. Parpol harus senantiasa melakukan pendidikan politik dan melatih kadernya. Karena kepemimpinan nasional dicalonkan partai berarti partai harus mempersiapkan. Calon yang harus diajukan partai, itu seharusnya bermoral, punya visi jauh ke depan, bukan karena nepotisme, serta memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. ❑

Terima Delegasi Srikandi Pancasila

HNW Ajak Pimpinan Srikandi Pancasila Edukasi Rakyat dan Kawal Pemilu

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., berharap, Srikandi Pancasila melibatkaan diri secara aktif dalam Pemilu, sehingga pesta demokrasi (pemilu) berlangsung luber dan jurdil.

BERTEMPAT di Ruang Kerja, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 13 Desember 2023, Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA., (HNW), menerima pimpinan organisasi Srikandi Pemuda Pancasila DPW Jakarta.

Pengurus organisasi perempuan di bawah naungan organisasi Pemuda Pancasila yang hadir dalam kesempatan itu adalah: Ketua DPW Jakarta Fitria Octarina, Sekwil DPW Jakarta Jihan Azka Savitrie, dan beberapa pengurus lainnya.

Banyak hal yang disampaikan Fitria Octarina kepada politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mulai dari kegiatan internal organisasi serta programnya untuk terlibat dalam menyelesaikan permasalahan sosial di kalangan perempuan, anak-anak dan keluarga, hingga masalah di seputar Pemilu

Dalam kesempatan tersebut, HNW mendorong agar Srikandi Pancasila, terutama di tahun politik ini, agar mengedukasi masyarakat. “Kita harap Srikandi Pancasila mencerahkan masyarakat agar dapat mempergunakan kedaulatannya dan tidak malah golput, apalagi terjebak pada money politik. Karena, masa depan mereka dan generasi milenial baik laki-laki maupun perempuan sangat terkait dengan hasil pilihan rakyat melalui Pemilu,” ujarnya.

Hal demikian, penting dilakukan Srikandi Pancasila agar pemilu yang ada betul-betul menghadirkan presiden dan wakil rakyat yang terbukti berpihak pada rakyat, berakhlaq mulia, tidak otoriter, tidak KKN, bisa mengedepankan sikap bermusyawarah, yang mampu menjadikan hikmah yang membingkai kehidupan berbangsa dan benegara.

Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu juga mendorong agar Srikandi Pancasila menjadi pengawal kedaulatan rakyat dan tidak golput. Menjadi pengawal kedaulatan rakyat bisa dilakukan oleh organisasi itu dengan menjadi saksi pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

Menurut HNW, dengan melibatkaan diri secara aktif dalam pemilu maka pesta demokrasi yang digelar bisa menjadi pemilu yang luber dan jurdil. “Pemilu seperti ini merupakan pemilu harapan rakyat Indonesia,” tegasnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pemilu Tahun 2024 yang terdiri dari pilpres, pemilihan anggota DPR,DPRD, dan DPD, menurut HNW, tidak cukup bila hanya melibatkan pemerintah dan parpol. Perlunya keterlibatan organisasi masyarakat seperti Srikandi Pancasila agar pemilu bisa terselenggara luber, jurdil,transparan, dengan partisipasi maksimal dari rakyat, termasuk kaum perempuan dan generasi milenial maupun generasi Z. “Srikandi Pancasila yang memiliki jaringan anak-anak muda tersebar di seluruh Indonesia bisa berkontribusi positif,”harap HNW.

Lebih lanjut, alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu menuturkan, sebagai organisasi yang di dalamnya melekat nama Pancasila, diharap menjadi tauladan dalam rangka menyukseskan Pemilu. “Pancasila harus diimplementasi dalam kehidupan keseharian, apalagi saat kampanye dan Pemilu,” tuturnya.

Jadi, kata HNW, Srikandi Pancasila harus ikut menjaga terlaksannya Pancasila sehingga Pemilu akan diwarnai etika berpolitik yang tinggi, komit pada laku yang manusiawi adil dan beradab, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragamana pilihan, mengedepankan prinsip musyawarah dan peduli rakyat. Agar hasil Pemilu nanti benar-benar menghadirkan Presiden atau Anggota DPR/DPR yang orientasinya bukan pada kepentingan kelompok ataupun bersifat sektoral, melainkan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. “Begitulah seharusnya peran dari Srikandi PP dan ormas lainnya”pungkasnya. ❑

Terima Pengurus AKSI

Ketua MPR RI Dorong Revisi Undang-Undang Desa Segera Disahkan

Proses revisi UU Desa berjalan lancar, tinggal finalisasi sampai akhirnya nanti bisa disahkan pada awal Januari 2024.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Legislator DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen Bambang Soesatyo menuturkan, proses revisi UU Desa berjalan lancar, tinggal finalisasi sampai akhirnya nanti bisa disahkan pada awal Januari 2024. Berbagai aspirasi kepala desa sudah terakomodir. Antara lain terkait penambahan masa jabatan kepala desa.

Saat ini, jelas Bamsoet lebih lanjut, masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, melalui revisi tersebut bisa jadi akan ditambah menjadi 8 tahun atau bahkan 9 tahun, dengan periodesasi jabatan selama dua periode. Serta adanya tanda penghargaan terhadap kepala desa yang sudah menyelesaikan masa tugasnya. Penambahan masa jabatan kepala desa dan tanda penghargaan tersebut sudah masuk dalam pembahasan revisi terbatas UU No.6/2014 tentang Desa.

"Selain terkait kepala desa, revisi UU No. 6/2014 tentang Desa juga membahas berbagai hal krusial lainnya. Antara lain terkait status aparatur desa, kesejahteraan kepala desa dan aparatur desa, operasional pemerintahan desa, alokasi dana pembangunan desa, hingga arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Seluruhnya dimaksudkan agar pembangunan di desa berjalan lancar, efektif, dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Bamsoet usai menerima pengurus Asosiasi Kepala Desa Nasional (AKSI), di Jakarta, Jumat (22/12/23).

Pengurus AKSI yang hadir, antara lain: Wakil Ketua Umum Saifuddin, Sekjen Heru Nur Cahyo, dan Bendahara Umum Onas Hestiani. Hadir juga para Kepala Desa dari berbagai daerah, antara lain Fajar Prasetyo Utomo, Saefi Anwar, Ato Furtoni, Endang Macan Kumbang, dan Ali Ghufron.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, revisi UU Desa ditujukan untuk penguatan desa. Mengingat dalam APBN 2023, pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan dana desa mencapai

Rp 70 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota.

"Dengan arah kebijakan penggunaan dana desa, antara lain untuk program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia, ini menerangkan, Presiden Joko Widodo senantiasa peduli dengan kepala desa. Dibuktikan pada akhir tahun 2022 lalu, sesuai aspirasi dari para kepala desa, pemerintah melalui Kementerian Desa dan PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

"Dengan demikian pada tahun anggaran 2023 ini, pemerintah desa sudah bisa membelanjakan 3% dari dana desa untuk kebutuhan belanja operasional pemerintah desa. Ditindaklanjuti dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.2.3/ 6149 BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota yang memiliki Desa," pungkas Bamsoet. ❑

Kurikulum Merdeka

Lestari Moerdijat: Penerapannya Secara Nasional Harus Dipersiapkan Matang

Jumlah dan kapasitas guru serta infrastruktur harus dipersiapkan secara matang dalam upaya memenuhi kebutuhan penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional.

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/12), menyatakan: "Penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional membutuhkan kecukupan dari sisi jumlah dan kapasitas guru agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal, sehingga perlu dipersiapkan secara matang."

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Kurikulum Merdeka akan diterapkan secara nasional pada 2024. Saat ini sebanyak 80% sekolah di semua jenjang secara sukarela telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

Di sisi lain catatan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek memperkirakan Indonesia kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024, seiring dengan banyaknya guru yang pensiun.

Menurut Lestari, kesiapan penerapan Kurikulum Merdeka harus segera dipastikan, baik dari sisi kualitas dan jumlah guru, serta kesiapan infrastrukturnya.

Dalam penerapan kurikulum, ujar Rerie

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sapaan akrab Lestari, guru berperan sebagai pengembang kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada peserta didik.

Diakui Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, tantangan dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul merupakan salah satu tantangan terbesar bangsa agar memiliki daya saing yang tinggi di masa datang.

Sektor pendidikan yang merupakan bagian dari proses membangun SDM nasional, tegas Rerie, harus menjadi perhatian serius semua pihak agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Apalagi, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berdasarkan hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2023 terhadap 64 negara di dunia, daya saing SDM Indonesia 2023 naik empat peringkat dari 51 ke 47.

Meski begitu, tambah Rerie, IMD juga memberi catatan bahwa cara belajar untuk tingkat pendidikan dasar di Indonesia masih sangat tradisional dan harus diubah lebih inovatif untuk meningkatkan SDM di Indonesia.

Berdasarkan catatan tersebut, tegas Rerie, para pemangku kepentingan di sektor pendidikan harus mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan sistem pembelajaran yang mampu meningkatkan daya saing SDM nasional dan karakter anak bangsa yang lebih baik, agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. ❑

Restoran Parle Senayan

Bamsoet Tinjau Persiapan Pembukaan Restoran Parle Senayan di Senayan Park

Kehadiran Parle Senayan akan semakin menyemarakkan industri makanan dan minuman di kawasan mall.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersama Komisaris Parle Senayan, Cafe, Bar, Lounge, and Restaurant, Sonny Harsono, meninjau persiapan pembukaan Parle Senayan yang berada dalam kawasan Mall Senayan Park.

Grand Opening Parle Senayan akan segera dilakukan, sehingga bisa semakin menyemarakkan industri makanan dan minuman di tanah air. Sekaligus dapat melayani masyarakat yang ingin menikmati tahun baru di Jakarta dengan santapan yang nikmat serta suasana yang nyaman dan menyenangkan.

Menyajikan banyak makanan khas Nusantara dengan harga yang tidak akan membuat dompet robek. Mulai Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu seperti Cripsy Madura Duck Taco, Lumpia Jamur Jakarta, Soft Shell Crab Sari Kapasan, Sate Lidah Bumbu Rujak, Asinan Juhi Betawi, Cripsy Duck Pecel Madiun, Bebek Goreng Srundeng Bali, Ayam Tangkal Aceh Sambel Ganja, Ay Bakar Taliwang, Ikan Bakar Barramundi Jimbaran, Salmon Gulai Nyat Nyak, Udang Bakar Madu Manado, Tomahawk Aus 5+, Empal Gentong Cirebon Iga Sapi, Rawon Buntut Kikil, Lidah Sapi Cabe Ijo Padang, Pipi Sapu Kalio, Iga Bakar Maranggi Purwakarta, Nasi Goreng Kambing Taman Menteng, Nasi Campur Sultan, Nasi Ulam Betawi, Es Pisang Ijo makassar dan banyak lagi.

"Parle dalam bahasa Perancis artinya berbicara. Parle juga merupakan penggalan dari kata Parlemen. Atas filosofi tersebut, Parle Senayan yang berada di kawasan Mall Senayan Park dan berada di samping kawasan Gedung Parlemen MPR/DPR/DPD Republik Indonesia, akan menjadi tempat tongkrongan baru bagi para kawula muda maupun tempat ngumpul yang nyaman bagi keluarga, untuk saling berdiskusi dan bersenda gurau sambil menyantap berbagai cita rasa kuliner yang lezat, dengan menikmati view danau Senayan Park yang indah," ujar Bamsoet usai meninjau persiapan pembukaan Parle Senayan, Sabtu malam (23/12/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Kementerian Perindustrian mencatat kinerja industri makanan dan minuman tetap menggeliat meski perekonomian dunia sempat terpuruk dihantam pandemi dan di tengah ketidakpastian global. Industri makanan dan minuman mampu tumbuh 3,57% (yoy) dan mencatatkan diri sebagai sub sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB industri pengolahan nonmigas pada triwulan-III tahun 2022, yaitu sebesar 38,69%.

"Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada tahun 2020 saja, DKI Jakarta memiliki 5.159 usaha penyedia makanan dan minuman berskala menengah dan besar. Terbanyak di antara provinsi lainnya di Indonesia. Disusul Jawa Barat dengan jumlah penyedia makanan dan minuman mencapai 1.414 usaha, Jawa Timur 821 usaha, Banten 539 usaha, serta Riau 475 usaha," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, jumlah usaha penyedia makanan dan minuman di Indonesia berjumlah 11.223 usaha. Terdiri dari 8.042 restoran/rumah makan, 269 usaha katering, dan 2.912 usaha penyedia makan minum lainnya. Sebanyak 53,85% usaha penyedia makanan dan minum berada di mal; 11,76% usaha penyedia makanan dan minuman berada di kawasan industri; 8,11% di pusat kuliner; dan 22,75% berada di lokasi lainnya.

"Kehadiran Parle Senayan akan semakin menyemarakkan industri makanan dan minuman di kawasan mall. Sehingga bisa turut berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah melalui pajak yang dibayarkan," pungkas Bamsoet. ❑

Peran Ikama Serang

Yandri Susanto Puji Peran Ikatan Keluarga Madura (Ikama) Serang

Hadirnya Pondok Pesantren Miftahu Nuril Akhlaq dan SMK Intan Husada merupakan bukti nyata kontribusi Kiai Abdul Hanan sebagai tokoh Ikama dalam dunia pendidikan bagi masyarakat Serang.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., menyampaikan kekagumannya terhadap masyarakat Madura yang tinggal di Serang, Provinsi Banten. Mereka yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Madura (Ikama) bisa hidup rukun dan tenteram dengan masyarakat Kota Serang. Seperti pepatah mengatakan: 'Di mana bumi dipijak, di situ langit junjung,' benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Dalam keseharian Ikama mengikuti dan menghormati adat istiadat yang berlaku di Serang. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung benar-benar diterapkan," jelas Yandri Susanto dalam pertemuan dengan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) Kota Serang, di Pondok Pesantren Miftahu Nuril Akhlaq Serang, Banten, Rabu 13 Desember 2023. Hadir Pengasuh Pondok Pesantren Miftahu Nuril Akhlaq, KH. Abdul Hanan, dan Ketua Barisan Muda PAN Banten, Agung Sukmana.

Dalam perkembangannya, Yandri melihat masyarakat Madura yang tergabung dalam Ikama berbaur dengan masyarakat dan berkarya, serta berkontribusi dalam pembangunan. Salah satunya adalah dengan hadirnya Pondok Pesantren Miftahu Nuril Akhlaq dan SMK Intan Husada yang berada dalam naungan yayasan Miftahu Nuril Akhlaq.

"Hadirnya Pondok Pesantren Miftahu Nuril Akhlaq dan SMK Intan Husada merupakan bukti nyata kontribusi Kiai Abdul Hanan sebagai tokoh Ikama dalam dunia pendidikan bagi masyarakat Serang," ungkap Waketum PAN itu.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Abdul Hanan sebagai tokoh masyarakat Madura yang ada di Banten mendoakan dan berharap Yandri dapat terus berkiprah dan berjuang di tingkat nasional. Karena hasil kerja nyata Yandri dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat asal Banten, Yandri memberikan hasil nyata perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan keadilan bagi masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan oleh semua masyarakat Banten," jelas Kiai Hanan

"Yandri memberikan bukti nyata dan konkret di tengah-tengah umat. Kiprahnya sebagai Wakil Rakyat asal Banten sangat dirasakan manfaatnya," ungkap Kiai Hanan. Sang Kiai menunjuk contoh pembangunan asrama haji Banten merupakan hasil perjuangan Yandri ketika menjadi Ketua Komisi VIII DPR.

Oleh karena itu, "Saya sebagai tokoh masyarakat Madura di Banten berharap, Yandri tetap melanjutkan perjuangan dan berkontribusi bagi bangsa dan negara," tutup Kiai Hanan. ❑

Festival Pesona Pantai Botuboluo

Fadel Muhammad: Botuboluo Beach Park Surga Maritim Tersembunyi

Pesona Pantai Botuboluo tidak kalah dengan destinasi pantai sekelas Pantai Kuta di Bali, jika dikelola dengan sungguh-sungguh..

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa banyak sekali potensi destinasi wisata alam terutama laut atau maritim di Provinsi Gorontalo, yang belum tergali dan bisa menjadi surga wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

"Dulu semasa saya menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, kami mengembangkan Desa dan Pantai Olele menjadi wilayah wisata bahari yang menjanjikan. Sebab, pantai dan lautnya sangat indah. Sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan dan dikelola potensi besar tersebut," ujar Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini.

Ternyata, lanjut Fadel Muhammad, apa yang diupayakannya itu membuahkan hasil. Setelah berjalan bertahun-tahun, pantai Olele sudah dikenal secara domestik dan dunia, terutama bagi mereka pecinta laut dan diving dan snorkeling.

"Saya saja kemarin tidak bisa masuk ke sana karena sudah penuh oleh wisatawan. Saya senang. Sebab, artinya perekonomian cepat berputar dan pada ujungnya pendapatan untuk daerah serta meningkatnya kesejahteraan rakyat," katanya di hadapan ratusan warga masyarakat Desa Botuboluo, Kecamatan Biluhu, Gorontalo, Ahad (31/12/2023).

Lebih lanjut, Fadel Muhammad mengungkapkan, saat ini ada satu lagi surga wisata bahari tersembunyi di Kecamatan Biluhu, yakni 'Botuboluo Beach Park'. Pantai indah bergaris pantai pasir putih yang melengkung luas dan di kelilingi tiga Dusun, yakni: Bayalo, Botulobutao, dan Wulungio.

"Dalam perjalanan menuju ke pantai ini, saya rasakan struktur jalan sudah sangat bagus dan mulus. Kondisi itu harus dipertahankan dan terus dirawat. Memang destinasi ini masih belum begitu dikenal wisatawan domestik dan wisman. Untuk itu, saya dorong para kepala desa di seputar pantai bekerjasama dengan pemkab dan pemprov untuk melakukan promosi," ujarnya, usai kunjungan.

Ditegaskannya, jika promosi sudah dilakukan dan wisatawan yang datang makin mengalir maka langkah selanjutnya adalah: Pertama, lebih banyak lagi menggelar berbagai kegiatan yang menarik sehingga wisatawan betah berlama-lama dan menjadi kenangan yang akan menjadi cerita indah ketika pulang dari berwisata di Pantai Botuboluo. Kedua, perbanyak kios yang menjajakan berbagai kerajinan dan kuliner asli daerah. Ketiga, harus membuat banyak penginapan atau hotel agar wisatawan semakin nyaman.

Fadel Muhammad yakin, pesona Pantai Botuboluo tidak akan kalah dengan destinasi pantai sekelas Pantai Kuta di Bali, jika dikelola dengan sungguh-sungguh.

Kedatangan Gubernur pertama Provinsi Gorontalo yang menjabat selama dua

periode ini ke Pantai Batubolua adalah dalam rangka menyaksikan Festival Pesona Pantai Botuboluo. Didampingi istrinya, Hana Hasanah Fadel Muhammad beserta anak bungsunya, staf khusus Hasan Shahab, Ronny Sianturi salah satu personil grup vokal Trio Libels terkenal di era 80-90-an, Kepala Desa Acun Herdiksan, Fadel Muhammad menyaksikan kegiatan lomba bakar dan makan ikan hasil tangkapan nelayan.

Fadel Muhammad dan Ibu Hana pun tak sungkan turun langsung memegang Ikan dan membantu membakar ikan yang baunya sangat menggugah selera. Bau asap pembakaran yang menempel di pakaian tak dihiraukan. Soalnya, kegembiraan bersama masyarakat desa dan nelayan sangat tak ternilai.

Dan, puluhan jenis ikan laut segar dibakar dan diberi bumbu sambal pedas khas lokal, hari itu menjadi santapan Fadel Muhammad bersama warga.

Usai santap siang, Fadel Muhammad berkeliling mengunjungi kios-kios dan lapak UKM rakyat sekitar, yang menjajakan berbagai jenis kuliner khas dan juga bermacam suvenir. Di salah satu kios, Fadel Muhammad membeli salah satu suvernir kerajinan rakyat. “Produk ini sudah bagus, pertahankan dan tingkatkan kualitasnya. Tetapkan harga yang tidak terlalu mahal, tapi jangan sampai merugi,” pesan Fadel kepada ibu penjual.

Kepada masyarakat desa, tokoh nasional yang maju lagi sebagai anggota DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo nomer urut tiga dalam kontestasi Pemilu serentak 2024 ini, berpesan agar menjaga kelestarian alam. Sebab, jika terjaga maka yang akan memperoleh dampak positifnya dalam jangka waktu panjang adalah masyarakat setempat.

“Allah SWT sudah memberi kalian anugerah alam yang luar biasa ini. Tugas kalian hanya menjaga kemudian menikmati hasilnya,” tandasnya. ❑

Temu Tokoh di Kabupaten Brebes

Lestari Moerdijat: Bangun Kemandirian Ekonomi untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Setiap anak bangsa harus mampu membangun kemandirian dalam rangka ikut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan konstitusi.

SALAH SATU upaya yang bisa dilakukan adalah membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan keterampilan berwirausaha,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang disampaikan secara daring dalam acara Temu Tokoh MPR RI Kabupatan Brebes, Jawa Tengah, Sabtu sore (16/12/2023).

Berbicara di hadapan masyarakat UMKM Tegal Raya dan tokoh masyarakat Kabupaten Brebes, lebih lanjut Lestari menyatakan, peningkatan keterampilan berwirausaha dapat diasah melalui praktik pada sektor ekonomi kreatif. Sektor tersebut, tambah dia, sudah terbukti bisa diandalkan dalam pemulihan dan kebangkitan ekonomi pasca-pandemi maupun menjawab tantangan disrupsi teknologi.

Ekonomi kreatif, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kerap ditempatkan dalam koridor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sejatinya, tegas Rerie, ekonomi kreatif adalah ekosistem dari berbagai latar belakang pengetahuan dan keterampilan, dengan perbedaan sumber daya maupun karya kreatif individu yang terus mendorong upaya menciptakan dan menggunakan kekayaan intelektual.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Tugas negara, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, adalah menghadirkan kebijakan yang adaptif berbasis peluang demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Selain itu, tegas dia, untuk menunjang kesejahteraan bersama, model penguatan ekonomi seperti koperasi dapat menjadi perekat ekosistem kreatif. “Semangat dari, oleh, dan untuk semua anggota memperkuat kelompok ekonomi kreatif sebagai ekosistem yang kaya dengan pengetahuan, keterampilan, dan daya kreasi,” ujarnya.

Rerie berharap, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dapat diletakkan dalam koridor yang tepat, sehingga para pelaku ekonomi kreatif Indonesia mampu menjawab tantangan global dengan tetap memegang teguh nilai-nilai yang bersumber pada Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia/ NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). ❑

Tekan Kasus Perundungan

Lestari Moerdijat: Bangun Kolaborasi antara Institusi Pendidikan dan Pemda

Dorong kolaborasi yang kuat antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam upaya menekan kasus perundungan di lingkungan lembaga pendidikan.

SEJUMLAH aturan sejatinya sudah tersedia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, mungkin saja belum semua lembaga pendidikan melaksanakan mekanisme yang diamanatkan aturan tersebut," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/1/2024).

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, ada kenaikan jumlah kasus perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023. Peningkatan itu terjadi dari 21 kasus pada 2022 menjadi 30 kasus pada 2023.

Sebanyak 80% dari kasus perundungan itu terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek. Sisanya, 20% kasus perundungan terjadi di satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau sekolah.

Menurut Lestari, pelaksanaan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 itu secara meluas di setiap institusi pendidikan harus diwujudkan. Tentu saja, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam pelaksanaan aturan tersebut pihak sekolah harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan sejumlah instansi lainnya di daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) atau Dinas Sosial, tambah Rerie, bisa dilibatkan dalam penanganan psikologi pelajar.

Percepatan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di sekolah-sekolah dan Tim Satuan Tugas di kabupaten, kota dan provinsi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus segera dilakukan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap upaya untuk menekan jumlah kasus perundungan di lingkungan sekolah harus mendapat perhatian serius semua pihak, karena para tunas bangsa itu adalah harapan negeri ini dalam menjawab tantangan di masa depan.*

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, juga menyampaikan keterangan tertulis tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, menyatakan, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus mendapat perhatian serius semua pihak demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa depan.

"Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak ini berpotensi mengganggu proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang tangguh di masa depan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (02/01/2024).

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat, jumlah kasus pengaduan kekerasan terhadap anak pada 2023 naik 30% jika dibandingkan dengan 2022. Sepanjang tahun 2023 tercatat 3.547 kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan lokasi kejadian, kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga 35%, lingkungan sekolah 30%, lingkungan sosial 23%, dan tidak disebutkan 12%.

Menurut Rerie, catatan dari Komnas PA tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, mengingat kekerasan terjadi di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak untuk tumbuh dan berkembang.

Para pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat, ujar Rerie, harus mampu memformulasikan langkah yang tepat untuk menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak.

Kesiapan keluarga dan para tenaga pengajar di sekolah dalam mendidik anak, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus benar-benar diwujudkan agar mampu mengakselerasi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing.

Menurut Rerie, pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus segera mengambil langkah yang dibutuhkan agar kasus-kasus

kekerasan terhadap anak tidak terus bertambah.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap semua pihak menunjukkan kepedulian dengan membangun sistem yang mampu mewujudkan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang setiap anak bangsa, demi mewujudkan SDM nasional yang berdaya saing di masa depan. ❑

Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Rehabitasi Mangrove

Lestari Moerdijat: Penanaman Kembali Lahan Harus Konsisten Dilakukan

Upaya penanaman kembali pohon di lahan-lahan yang telah dimanfaatkan harus menjadi suatu kebiasaan, agar pelestarian lingkungan hidup dapat berjalan dengan konsisten dan bermanfaat untuk masa depan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KERUSAKAN lingkungan akibat tindakan manusia mesti ditanggulangi dengan semangat gotong-royong berbasis kesadar-an kolektif bahwa kita mesti merawat lingkungan yang merupakan sumber kehidupan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang disampaikan secara daring dalam acara Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Rehabilitasi Mangrove di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (16/12/2023).

Acara Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Rehabitasi Mangrove ini digelar oleh Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRMG) Republik Indonesia, diikuti masyarakat serta komunitas pecinta lingkungan.

Hadir pada kesempatan itu Kristina Yuniati (Kepala Sub Kelompok Kerja Evaluasi dan Pelaporan - Badan Restorasi Mangrove dan Gambut /BRMG), Zayinul Fahri (Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai /BPDAS Pemali Jratun, Ditjen PDASHL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), Suhirin (Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah) dan Hari Wibowo (Mewakili Kepala Resort Tegal, Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Jawa Tengah).

Menurut Lestari, di masa lalu, nenek moyang kita mengajarkan kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita dengan berbagai cara. Di masa kini, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya serupa dengan cara yang bisa dipahami oleh masyarakat juga harus dilakukan agar lingkungan kita tetap lestari.

Apalagi, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, pelestarian lingkungan sejatinya merupakan bagian dari upaya perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan bumi. Di sisi lain, tambah Rerie, pada Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 memberi amanat penting bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Sehingga, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, mengupayakan lingkungan hidup yang lebih baik harus dilaksanakan oleh negara dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Menurut Rerie, kearifan lokal para leluhur telah mewarisi kita bagaimana pengelolaan lahan dengan selalu mempertimbangkan asas keberlanjutan. Sehingga, ujar Rerie, kita juga harus optimalkan kembali pengetahuan adat dan kearifan lokal yang selalu memelihara harmoni antara manusia dengan alam semesta dalam proses pelestarian di masa kini agar mampu mewarisi lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. ❑

Terima Pengurus GP PARMUSI

Bamsoet Ajak Generasi Muda Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Generasi muda bangsa diharapkan tumbuh menjadi 'manusia-manusia tangguh' yang mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika zaman.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengajak generasi muda mampu beradaptasi dan berinovasi agar tidak tertinggal dalam kompetisi global yang berkembang pesat. Generasi muda harus mampu menjadi kekuatan pendobrak yang mengubah tantangan menjadi peluang, dan menjadikan peluang sebagai keberhasilan guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Derasnya arus perubahan global dapat dirasakan, ketika kita belum sepenuhnya selesai berurusan 11 era revolusi industri 4.0, kita sudah dihadapkan pada era society 5.0. Karenanya, peningkatan kompetensi generasi muda sebagai sumberdaya pembangunan harus menjadi prioritas utama," ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Besar Gerakan Pemuda Persaudaraan Muslimin Indonesia (GP PARMUSI) di Jakarta, Selasa (9/1/24).

Pengurus Besar GP PARMUSI yang hadir, antara lain: Ketua Umum Kifah Giblartar Bey, Sekjen Fuzail A. Hakim, Wakil Sekjen 'Alfian Azmi, Bendahara Umum Eka Marsella, dan Kepala Pusat Kemitraan Hafidz A. Lubis.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, GP PARMUSI sebagai organisasi kepemudaan dituntut mampu mengoptimalkan peran penting generasi muda dalam menjalankan fungsi sosial politiknya. Antara lain sebagai kontrol sosial, agen perubahan, kekuatan moral, penjaga nilai kebangsaan, serta sebagai penerus kepemimpinan nasional di masa depan.

"Sebagai kontrol sosial, generasi muda berperan untuk memperjuangkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial. Generasi muda dituntut mempunyai kejelian dalam melihat dan menyelami realitas sosial yang terjadi di sekitar, mendorong terwujudnya kesetaraan dan kesinambungan pembangunan untuk mengikis disparitas sosial dan kesenjangan kesejahteraan," kata Bansoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, sebagai agen perubahan, generasi muda adalah katalisator yang mendorong lahirnya perubahan ke arah perbaikan dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda dituntut untuk dapat bersikap kritis, berpikir visioner dan melihat jauh ke depan, serta mempunyai daya kreasi dan imajinasi yang kuat mengenai kondisi ideal yang dicita-citakan.

"Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda adalah sumberdaya potensial bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Generasi muda bangsa diharapkan tumbuh menjadi 'manusia-manusia tangguh' yang mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika zaman. Pemuda tidak hanya sekedar cerdas dan terampil, tetapi juga berkarakter dan berwawasan kebangsaan," pungkas Bamsoet. ❑

Terima Pengurus Al-Ittihadiyah

Bamsoet Dorong Peningkatan Ekonomi Syariah

Dengan penduduk muslim terbesar di dunia atau sekitar 237,5 juta jiwa warga negara Indonesia yang beragama Islam, pengembangan perekonomian syariah di Indonesia memiliki prospek yang cukup menjanjikan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendorong peningkatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Terlebih dengan penduduk muslim terbesar di dunia atau sekitar 237,5 juta jiwa warga negara Indonesia yang beragama Islam, pengembangan perekonomian syariah di Indonesia memiliki prospek yang cukup menjanjikan.

"Peringkat Indonesia di sektor ekonomi syariah terus meningkat. Global Islamic Economic Indicator (GIEI) mencatat Indonesia berhasil meraih posisi pertama pada Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023. Sebelumnya, di tahun 2022, Indonesia hanya berada di peringkat 4. Sementara Islamic Finance Development Report Tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh aset keuangan syariah global," ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Al-Ittihadiyah di Jakarta, Selasa (9/1/24).

Pengurus Al-Ittihadiyah yang hadir, antara lain: Ketua Bidang Informasi, Komunikasi & Teknologi Al Ittihadiyah Agus Wijaksono, Ketua Bidang Kaderisasi & Pendidikan Zarmansyah, Sekjen Muslimat Al Ittihadiyah Yesi Martaleni, dan Ketua Barisan Muda Al Ittihadiyah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, industri keuangan syariah di tanah air juga menunjukkan peningkatkan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 2.450,55 triliun atau sekitar US$ 163,09 miliar per Juni 2023. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,37% (yoy) dengan market share sebesar 10,94% terhadap total keuangan nasional.

"Sementara pangsa pasar industri perbankan syariah naik menjadi 7,31% dari total industri perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 171 BPRS dengan sebaran porsi aset 65,78% bank umum syariah, 31,68% unit usaha syariah, dan BPRS sebesar 2,54%," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dari sektor pasar modal syariah, per akhir Agustus 2023, pangsa pasar produk sukuk korporasi, sukuk negara dan reksa dana syariah mencapai 12,7%. Sedangkan pangsa pasar saham syariah telah mencapai 56% terhadap seluruh saham yang tercatat di bursa efek indonesia.

"Indonesia juga telah memiliki 3 kawasan industri halal di Provinsi Banten, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Hal ini menjadi salah satu fondasi penting untuk menjadikan Indonesia sebagai global halal hub serta salah satu pemain utama ekonomi syariah di tingkat global," pungkas Bamsoet. ❑

Acara Temu Kangen

Syarief Hasan: Presiden Harus Bisa Memastikan Rakyat Makin Sejahtera

Siapapun yang nanti terpilih dalam pemilu yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak boleh susah, rakyat harus makin sejahtera

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL ketua MPR RI, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., yang juga anggota DPR RI dapil Jawa Barat III, Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, hadir pada Temu Kangen Presiden Indonesia ke-6 Jend. TNI (pur) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono MA., dengan masyarakat Kabupaten Cianjur. Acara tersebut berlangsung di Gedung As-Sakinah, Cianjur, Jawa Barat, Selasa malam (9/1/2024).

Temu kangen SBY dengan warga Cianjur bertema: "Rakyat Tidak Boleh Susah, Rakyat Harus Makin Sejahtera" mendapat perhatian yang sangat besar. Terbukti, gedung tempat acara berlangsung tak mampu menampung seluruh peserta yang antusias ingin melihat kehadiran Presiden RI ke-6, sekaligus mendengarkan arahan yang disampaikan SBY. Selain mendengar arahan SBY, pada acara itu juga diputar video berdurasi 25 menit, berisi perjuangan dan keberhasilan SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia.

Sebagai pembicara tunggal, SBY mengaku memiliki kedekatan dengan Cianjur khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Sebagai anggota TNI, SBY menghabiskan sebagian besar waktunya bertugas di Jawa Barat. Bahkan, kedua anaknya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono lahir di Jawa Barat.

"Saya merasa dekat dengan Cianjur sejak duduk di bangku SLTP sekitar tahun 60 an, waktu itu ada seorang penyanyi bernama Alfian mempopulerkan lagu berjudul *Semalam di Cianjur*. Ketika saya bertugas, kenangan itu makin melekat, apalagi Cianjur terkenal dengan keramahan masyarakatnya, dan keindahan alamnya, seolah selalu mendapat berkah dari Allah," ungkap SBY.

Pada kesempatan itu, SBY mengajak seluruh pemimpin untuk selalu menjaga kedekatan, serta bergandengan tangan dengan ulama. Karena, kedekatan antara ulama dan pemerintah sangat dianjurkan oleh agama. Bahkan, kedekatan ulama dan umaro bisa berkontribusi dalam persatuan kesatuan, kemajuan, kesejahteraan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat.

"Kebersamaan, membuat kita mampu menghadapi segala masalah secara bersama-sama, saling mendukung dan mengayomi. Karena itu, semua pemimpin, termasuk presiden baru nanti, perlu menjaga dan memupuk kedekatan antara ulama dan umaro," kata SBY lagi.

Menyoal pelaksanaan pemilu 14 Februari, SBY mengajak seluruh kontestan melakukan kampanye dengan baik, jujur, dan adil. Agar rakyat bisa menentukan pilihan dengan bijak. Apalagi, kemenangan yang dilalui dengan kejujuran dan keadilan akan menimbulkan keberkahan.

"Jangan memberikan janji-janji yang sulit terealisasi, yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan perekonomian dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, menyediakan pupuk bagi petani, solar buat nelayan, dan menaikkan gaji bagi buruh, ASN, TNI, Polri dan para pensiunan. Ingat, rakyat tidak boleh susah, rakyat harus makin sejahtera," pungkasnya.

Menanggapi jalannya acara tersebut, Syarief Hasan mengatakan, kedatangan SBY pada acara tersebut adalah bukti bahwa Presiden RI ke-6 itu konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Karena kedatangan SBY dalam acara tersebut bertujuan untuk melepas rasa kangen pada masyarakat Cianjur.

Pesan-pesan yang disampaikan SBY, menurut Syarief Hasan, bukan sekedar gagasan. Tetapi sudah pernah dilakukan oleh SBY selama menjabat sebagai Presiden RI dua periode. Artinya, seluruh pesan tersebut bukan impian, tapi sudah dipraktikkan, bahkan sudah bisa dirasakan hasilnya.

"Dekat dengan ulama itu adalah ajaran agama. Bahkan, tidak akan komplit kehidupan kita jika ulama dan umaro tidak saling berdekatan dan bekerjasama," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Siapapun nanti yang terpilih dalam pemilu, kata Syarief Hasan, yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak boleh susah, rakyat harus makin sejahtera. "Itulah, inti dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Syarief Hasan. ❑

Terima Pimpinan Bank Muamalat

Bamsoet Dorong Pengembangan Keuangan Digital

Keuangan digital memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, revolusi industri 4.0 dan kemajuan teknologi informasi turut membuat disrupsi di dunia layanan keuangan. Aktivitas ekonomi terus bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi. Inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat.

"Perkembangan industri keuangan digital Indonesia perlu semakin ditingkatkan. Penguatan daya saing industri keuangan digital akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan," ujar Bamsoet usai menerima Pimpinan Bank Muamalat di Jakarta, Kamis (11/1/24).

Pimpinan Bank Muamalat yang hadir, antara lain Senior Executive Vice President - Director Level Enterprise Banking Irvan Yulian Noor, Executive Vice President Head of Global Market Enterprise Banking Moh. Madina Hendrik Soe'oed, Senior Vice President Head of Corporate Affairs Hayunaji, Vice President 2 Head of Government Relations Global Market Enterprise Banking Dendy Awara Rezka Taim, dan Senior Manager Government Relations Global Market Enterprise Banking Ratu Ina Febriyani.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM ini menjelaskan, perkembangan industri keuangan digital salah satunya terlihat dari kehadiran bank digital yang memanfaatkan teknologi digital. Melalui bank digital, bank tidak perlu lagi membuka banyak jaringan cabang, seperti umumnya bank tradisional. Masyarakat juga diuntungkan karena bank digital mengedepankan kecepatan dan fleksibilitas dalam layanan perbankan sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

"Potensi pertumbuhan bank digital di Indonesia sangat tinggi. Terlebih, pengembangan bank digital didukung penetrasi pengguna internet di Indonesia yang semakin kuat. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada periode 2022-2023 sudah mencapai 215,63 juta orang," kata Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, pengembangan bank digital juga sangat potensial

mengingat masih banyaknya masyarakat, termasuk UMKM, yang berada dalam kategori unbanked atau belum mengakses layanan perbankan. Data Bank Dunia menunjukkan, setidaknya terdapat 97,74 juta orang dewasa di Indonesia yang masuk kategori unbanked. Setara dengan 48% dari populasi dewasa di dalam negeri.

"Keuangan digital memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru. Selain itu, aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan dan efisiensi," pungkas Bamsoet. ❑

Prospek Ekonomi Indonesia 2024

Optimisme Tak Boleh Surut untuk Hadapi Tantangan Global

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, optimisme tidak boleh surut. Pemerintah dan masyarakat harus dapat bersama-sama mewujudkan amanat konstitusi, yaitu keadilan dan kemakmuran yang mampu dinikmati masyarakat secara merata.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KESADARAN bersama perlu dibangun bahwa setiap peristiwa saling memengaruhi satu sama lain yang berdampak pada dinamika ekonomi suatu negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema: 'Prospek Ekonomi Indonesia 2024' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/1).

Diskusi yang dimoderatori Dr. Radityo Fajar Arianto, MBA., (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Yustinus Prastowo (Juru Bicara Kementerian Keuangan Republik Indonesia); Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., (Pendiri Institute for Development for Economics and Finance/INDEF - Rektor Universitas Paramadina); dan Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., (Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) sebagai narasumber. Serta, Raja Suhud (Wartawan Media Indonesia Bidang Ekonomi) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, transformasi lanskap geopolitik dengan sejumlah krisis yang menyertai mesti menjadi cermin penting dalam penataan maupun penentuan prospek ekonomi dalam negeri pada tahun ini. Catatan lain, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, saat ini kita berhadapan dengan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri.

Berdasarkan kondisi itu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, menilai, 2024 merupakan tahun yang sangat menantang. Apalagi, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tahun ini pesta demokrasi digelar dan harus dilalui dengan gembira sebagai bagian dari pendidikan politik suatu bangsa.

Juru Bicara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Yustinus Prastowo, mengungkapkan sejumlah indikator penerimaan negara cukup baik. Menurut Yustinus, tata kelola keuangan yang kredibel menghasilkan keseimbangan primer yang positif. Dia mengakui, proyeksi pertumbuhan PDB cukup bagus di angka 5,2%.

Geliat sektor riil, ujar Yustinus, mulai terasa dengan mulai meningkatnya belanja bahan baku dan belanja modal.

Strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan di masa transisi tahun ini, ujar Yustinus, antara lain mengendalikan inflasi, menekan angka stunting dan terus berupaya mendorong peningkatan investasi.

Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, menurut dia, pemerintah akan berupaya mengatasi human capital gap, infrastruktur gap, dan institusional gap yang terjadi. Dengan sejumlah langkah itu, menurut Yustinus, pemerintah berharap, Indonesia keluar dari potensi jebakan kelas menengah.

Pendiri INDEF, Didik J. Rachbini, berpendapat, dunia politik dan ekonomi itu sama-sama berdasarkan kontrak. Proses kontrak yang baik, menurut Didik, berdasarkan demokrasi, karena persyaratan kontrak yang bagus itu harus transparan dan seimbang.

Diakui Didik, pada praktik demokrasi kita selama lima tahun ini proses check and balances-nya mati dalam pengambilan sejumlah keputusan. Menurut dia, janji presiden dalam bidang ekonomi pada 2019 hanya satu indikator yang terealisasi, yaitu inflasi yang terkendali.

Menurut Didik, di masa pandemi Covid-19 justru terjadi penyimpangan dari rencana keuangan dan sejak itulah pemerintah menarik utang dengan nilai di atas Rp 1.000 triliun setiap tahun yang menjadi beban APBN.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Akhmad Akbar Susamto, mengungkapkan, terjadi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2024.

Akhmad juga memperkirakan inflasi dan suku bunga masih cukup tinggi sehingga kondisi keuangan global masih ketat.

Dia juga memperkirakan nilai tukar rupiah relatif lemah karena ada potensi capital outflow. Berdasarkan kondisi tersebut, menurut Akhmad, Bank Indonesia akan terapkan suku bunga acuan tetap 6%.

Kebijakan tersebut, tegasnya, berkonsekuensi pada laju pertumbuhan

kredit yang melambat. Sehingga, tambah Akhmad, kita hanya bisa berharap pada sektor riil untuk mendorong perekonomian.

Wartawan Media Indonesia Bidang Ekonomi, Raja Suhud, berharap, pemerintah dapat mengendalikan tingkat inflasi. Dia menilai, potensi inflasi di sektor pangan meningkat tajam harus diwaspadai sebagai dampak sejumlah krisis geopolitik antarsejumlah negara yang masih terjadi.

Menurut dia, dalam indeks konsumen porsi cicilan utang masyarakat naik dari 9,3% menjadi 10%. Kelompok masyarakat kelas menengah, tambah dia, mulai menggunakan tabungan untuk membayar kebutuhan hidupnya.

Raja berharap, pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang lebih baik dari sisi pengendalian harga, demikian juga dengan BI mampu mengendalikan sisi moneter, agar perekonomian tetap terkendali. ❏

Soft Launching LX Sports Bar Bali

Bamsoet Dorong Peningkatan Industri Makanan Minuman

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu manufaktur terbesar yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong berkembangnya industri makanan dan minuman di tanah air. Terlebih, industri makanan dan minuman telah membuktikan sebagai salah satu usaha yang mampu bertahan di saat pandemi Covid 19. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi guna meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri makanan dan minuman yang kian menjamur.

"Salah satunya dengan mengusung konsep resto atau bar yang memadukan ragam kuliner dengan dunia olahraga atau sports bar. Para pecinta kuliner tidak hanya dimanjakan dengan resto, cafe ataupun bar dalam satu tempat, namun juga bisa menikmati beragam event olahraga yang ditayangkan secara langsung. Mulai dari sepakbola, tinju, hingga balapan Formula 1," ujar Bamsoet saat menghadiri soft launching LX Sports Bar di Bali, Rabu (3/1/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, industri makanan dan minuman merupakan salah satu manufaktur terbesar yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerja pada industri makanan dan minuman usai pandemi Covid 19 terus menunjukkan trend positif. Baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat, lapangan usaha akomodasi dan makanan serta minuman menjadi salah satu kontributor terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Bali pada Triwulan III 2023, yakni tumbuh sebesar 5,01%. Pertumbuhan tersebut merupakan tertinggi keempat setelah pengadaan air, jasa keuangan dan asuransi, serta transportasi dan pergudangan," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, lapangan usaha akomodasi dan makanan serta minuman juga masuk dalam tiga lapangan pekerjaan utama yang banyak menyerap tenaga kerja di Bali, hingga mencapai 42.920 orang. Tingginya serapan tenaga kerja tersebut tidak lepas dari kembali maraknya kunjungan wisatawan di Bali pada 2023.

"Sebanyak 13,66% angkatan kerja di Bali bekerja di lapangan usaha akomodasi dan makanan serta minuman. Menempatkan lapangan usaha akomodasi dan makanan serta minuman berada di posisi keempat setelah perdagangan, pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan, jika dilihat dari distribusi penduduk yang bekerja," pungkas Bamsoet. ❏

Mengupas Kelebihan Demokrasi di FGD MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR bersama para ahli, pakar, dan akademisi, dari Universitas Nasional (UNAS), duduk bersama mengupas tentang penguatan demokrasi di Indonesia. Paham ini sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Banyak kelebihan dalam sistem ini, namun ada paradoksnya ketika diimplementasikan.

PADA November 2023, Badan Pengkajian MPR bersama dengan sejumlah pakar menggelar *Focus Group Discus sion* (FGD). Kegiatan yang diadakan di Kota Bogor, Jawa Barat, itu dari pihak Badan Pengkajian hadir Drs. Djarot Saiful Hidayat MS dari Fraksi PDI Perjuangan; Ir. Mindo Sianipar, Fraksi PDI Perjuangan; Ir. Panggah Susanto, MM., Fraksi Partai_Golkar; H. Romo Muhammad Syafi'I, SH., M.Hum., Fraksi Partai Gerindra; Moh. Haerul Amri, SP., Fraksi Partai Nasdem; Mustafa Kamal, SS., Fraksi PKS; Ir. H. Bambang Sutrisno, MM.; dan Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., dari Kelompok DPD.

Sedang dari kelompok pakar hadir Dr. Aos Yuli Firdaus., MSi., Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si., Dr. Bhakti Nur Avianto, Dr. Alfan Alfian, dan Dr. H. Mustakim, SH., MH.

Dalam FGD yang bertema *Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia*, Alfan Alfian dalam makalahnya menyebutkan, paradoks demokrasi pasca 25 tahun reformasi adalah: *Pertama*, terdapat kelemahan dalam sistem politik kita. Di satu sisi sistem presidensial tetapi di sisi lain sistem kepartaiannya multipartai. Fenomena demikian, dapat dijelaskan secara teoritis bahwa dampaknya adalah bahwa sistem presidensial cenderung tidak dapat berjalan secara optimal.

Kedua, dari konteks pelembagaan politik. Menurut dosen Universitas Nasional (UNAS) Jakarta itu, partai politik belum sepenuhnya terfokus ke optimalisasi fungsi dan perannya, antara lain penyalur aspirasi dan agregasi kepentingan publik, fungsi perkaderan politik, dan lain sebagainya, namun justru fungsi rekrutmen politik menonjol: parpol sebagai kendaraan politik. "Hal ini berimbas masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan parlemen," ujarnya.

Ketiga, dalam praktik pemilu (pemilu legislatif, pilpres, maupun pilkada) terasa masih adanya kecenderungan kuat praktik politik pragmatisme-transasksional yang menjauhkan dari hakikat dan makna demokrasi. Dalam konteks ini dapat dicatat bahwa Pemilu Serentak 2019 penyelenggaraannya tidak dapat berjalan efektif, karena secara teknis cukup menyita waktu dan tenaga, sehingga dilaporkan banyak petugas KPPS yang meninggal.

Pemilu serentak 2019 yang dikenal sebagai pemilu paling kompleks dalam sejarah Indonesia, direkomendasikan banyak pihak untuk

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dievaluasi kembali, namun tidak mengalami perubahan signifikan teknis pelaksanaannya pada Pemilu 2024. Hal itu dapat dilihat dari masih seringnya mengemuka konflik-konflik pasca-pemilu, terutama pasca-pilkada di berbagai daerah. Juga mengemukanya fenomena politisasi identitas dalam pemilu/pilkada yang mendegradasi kualitas demokrasi. Kemudian, dampak perkembangan teknologi informasi merebaknya penggunaan media sosial yang banyak diwarnai hoaks, ujaran kebencian, dan distorsi informasi, di mana semua itu dapat mendegradasi kualitas demokrasi. “Hal-hal seperti ini tampaknya tidak akan berkurang secara signifikan pada Pemilu 2024”, ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, alumni Program S1 Universitas Muhammadiyah Malang, itu mengurai tentang hakikat demokrasi di Indonesia. Apabila kita tarik ke belakang, ketika the founding fathers atau para pendiri bangsa merancang negara Republik Indonesia, maka hal tersebut juga menegaskan pilihan mereka terhadap demokrasi.

Sistem ketatanegaraan dengan mengambil bentuk negara Republik mencerminkan sebuah pilihan yang merupakan antitesis dari sistem monarkhi absolut. Ketika dalam konstitusi dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstate) dan bukan negara kekuasaan (machtstate) maka sesungguhnya kita telah mengadopsi salah satu prinsip demokrasi substansial yang mengedepankan prinsip kesetaraan di muka hukum; kesederajatan dalam hubungan antarmanusia atau egalitarianism, menghormati keberagaman atau pluralisme, anti diskriminasi, dan mengedepankan toleransi, menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, adanya kebebasan baik kebebasan berpendapat dan berorganisasi maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan, menekankan tanggung jawab, kebersamaan, keadilan, perdamaian,

dan kesejahteraan. “Terkait kekuasaan, demokrasi substansial menolak praktik otoritarianisme, menekankan kompetisi secara fair (fair competitions), dan menjamin pelaksanaan prinsip checks and balances”, tuturnya.

Lely Arrianie dalam kesempatan yang sama mengungkap tentang sejarah singkat demokrasi di dunia. Guru besar UNAS tersebut mengatakan, gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara.

Lebih lanjut dikatakan, kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada 507-508 SM. “Cleisthenes disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena”, ujarnya.

Diungkap, konsep demokrasi yang lahir dari Yunani kuno itu dipraktikkan dalam hidup

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bernegara antara abad ke-4 SM sampai dengan abad ke- 6 SM. Di Yunani kuno, tempat berdirinya banyak negara kota dengan berbagai macam bentuk pemerintahannya, saat itulah demokrasi ditandingi dengan bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir orang.

Dijelaskan, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* artinya rakyat dan *cratein* atau *cratos* bermakna kekuasaan atau kedaulatan, Memiliki beberapa prinsip, seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan beragama.

Konsep demokrasi di Indonesia, menurutnya, berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa demokrasi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara.

Demokrasi di Indonesia mulai diterapkan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Secara gamblang duet pemimpin dwitunggal, Soekarno dan Mohammad Hatta, telah mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis, karena pada kalimat terakhirnya dalam teks Proklamasi 17 Agustus 1945 disebutkan adalah: “Atas Nama Bangsa Indonesia”. ❑

Pentingnya Negara Demokrasi Berdasarkan Atusan Hukum

Negara demokrasi itu penting, namun ia harus berlandaskan hukum agar bisa terciptanya negara yang dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi yang mampu menjamin demokrasi yang secara rinci mengatur batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga negara secara seimbang dan saling mengawasi.

MUSTAKIM dalam FGD bertema: ‘Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia’ itu menyebutkan, banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam suatu negara yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, rakyat adalah pemegang dan pemilik kedaulatan sepenuhnya. “Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, menuturkan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujarnya.

Dosen FH UNAS itu menjelaskan, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan

kemauan rakyat. Jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Dia mengutip Dahlan Thaib dalam bukunya yang berjudul: *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, menyebutkan asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis, suatu bangsa. Dari sini muncul istilah demokrasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila.

Pria yang aktif dalam berbagai organisasi itu menyebutkan, salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan tersebut adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.

Bangsaa ini dalam konstitusinya, yaitu UUD NRI Tahun 1945, mengatur kedaulatan rakyat pada Pembukaan Alinea Keempat: "..maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat… ". "Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam konsep negara hukum demokratis, demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum. Sedangkan hukum itu sendiri ditentukan melalui cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, aturan dasar penyelenggaraan negara harus disandarkan kembali secara konsisten pada konstitusi.

Tanpa kecuali, semua aturan hukum yang dibuat melalui mekanisme demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi. "UUD yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal itu menjadi acuan negara dan masyarakat", ujarnya.

Bagi negara, konstitusi, adalah kontrak sosial antara penguasa dan rakyat yang telah memberikan mandatnya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fondasi yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah demokrasi yang berkelanjutan (*a suistainable democracy*) adalah sebuah negara konstitusional (*constitutional state*) yang bersandar kepada sebuah konstitusi yang kokoh yang dapat melindungi dirinya dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan.

Konstitusi yang kokoh yang mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan hanyalah konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, secara seimbang dan saling mengawasi (check and balances), serta memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM).

Bhakti Nur Avianto dalam kesempatan itu mengatakan pentingnya sistem demokrasi. Baginya sistem demokrasi adalah fondasi bagi tatanan masyarakat yang adil, terbuka dan inklusif. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang politik. "Sistem demokrasi adalah kunci untuk menjaga keberagaman ini", ujarnya.

Demokrasi sebagai prinsip dasar dalam UUD 1945 serta tumbuhnya partisipasi publik. Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam memperkuat sistem demokrasi sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Proses reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam arah demokrasi Indonesia.

Dosen Kebijakan Publik UNAS itu memaparkan tentang Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Dikatakan, pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan berlandaskan (1) Sistem Presidensial: Indonesia menerapkan sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. (2) Pembagian Kekuasaan: UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislative, dan yudikatif. (3) Sistem Bicameral: DPR sebagai lembaga legislatif terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD mewakili daerah-daerah di Indonesia dan memiliki peran dalam membuat kebijakan.

(4), Otonomi Daerah: UUD 1945 memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Ini memungkinkan daerah-daerah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi setempat. (5) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kehidupan Politik Terbuka: UUD 1945 mengandung ketentuan yang melindungi hak asasi manusia dan mengatur kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Dan, mendorong terbentuknya partai politik dan partisipasi publik dalam proses politik. (6) Amandemen: DPR sebagai lembaga legislatif terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD mewakili daerah-daerah di Indonesia dan memiliki peran dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan daerah.

Dikatakan, perintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah implementasi konkret dari prinsip-prinsip demokrasi, dengan kedaulatan rakyat sebagai landasannya. Sistem ini memungkinkan partisipasi rakyat dalam proses politik, mengatur pembagian kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui amandemen demi menjaga keberlangsungan dan perbaikan demokrasi di Indonesia. ❑

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.
Ketua MPR RI

Catatan Akhir Tahun Ketua MPR RI

Menyongsong Tahun 2024 dengan Rangkaian Beban Masalah 2023

DAMPAK ketidakpastian global tahun 2023 dengan segala eksesnya masih akan berlanjut di tahun 2024, dan Indonesia tidak akan luput dari ragam ekses itu. Untuk meminimalisir semua ekses itu, pengelolaan dan pemanfaatan semua sumber daya nasional hendaknya tetap berpijak pada semangat dan kewajiban untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam konteks itu, aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya nasional hendaknya fokus pada ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, termasuk upaya menyediakan air bersih bagi komunitas warga yang rentan terdampak kekeringan.

Dunia telah memasuki tahun baru, 2024. Apa yang akan terjadi di tahun ini bisa diprediksi saat ini, tentu saja dengan berpijak pada ragam persoalan riil yang belum terselesaikan sepanjang tahun 2023. Sebagian komunitas warga di dalam negeri pasti fokus ke pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada bulan Februari, serta coba mengkalkulasi hasil Pemilu tersebut. Tentu saja itu tidak ada masalah. Terpenting, pesta demokrasi itu hendaknya berjalan damai dengan hasil yang produktif.

Namun, ada baiknya untuk juga menyisihkan waktu guna melihat dan memahami dinamika global. Seperti juga yang sedang dan akan terus dihadapi komunitas global di tahun ini, persoalan yang akan dihadapi masyarakat Indonesia bukan semata-mata hasil Pemilu 2024. Semua orang tahu dengan sendirinya bahwa dampak perubahan iklim dengan semua eksesnya masih berlanjut di tahun mendatang.

Salah satu ekses perubahan iklim adalah ketidakpastian global yang ditandai dengan peningkatan suhu bumi. Fakta ini menyebabkan periode kekeringan yang panjang dan berdampak langsung pada menurunnya produktivitas lahan pertanian tanaman pangan. Kekeringan menyebabkan gagal panen, yang biasanya berujung pada kenaikan harga bahan pangan. Periode kekeringan yang panjang juga menyebabkan komunitas warga di sejumlah wilayah pemukiman kesulitan mendapatkan air bersih.

Ketegangan geopolitik pun menjadi faktor lain yang masih berkontribusi terhadap ketidakpastian. Perang antara Rusia-Ukraina, serta perang Israel-Hamas, menyebabkan ketidakpastian di pasar yang ditandai dengan naiknya harga pangan dan harga energi. Belum lagi faktor ketegangan di Laut Cina Selatan. Jadi, karena ketidakpastian global selalu menghadirkan dampak yang luas, Indonesia harus cermat pula dalam mengalkulasi dampak ketegangan geopolitik itu.

Ketidakpastian yang berlarut-larut itu pada akhir semakin memperburuk dinamika perekonomian global, yang akhir-akhir ini ditandai dengan naiknya suku bunga acuan pada sejumlah negara di dunia. Kecenderungan tingginya suku bunga acuan pada tingkat global diperkirakan berlangsung lebih lama. Faktor naiknya suku bunga setidaknya berdampak ganda bagi banyak negara berkembang, termasuk emerging market. Pertama, Selain melemahnya valuta lokal (rupiah), beban pembayaran bunga utang luar negeri otomatis membengkak. Kedua, likuiditas di negara-negara berkembang akan terkuras akibat penarikan dana asing (capital out flow).

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total utang Indonesia hingga akhir November 2023 sebesar Rp 8.041,01 triliun, dengan rasio terhadap PDB 38,11%. Pembayaran bunga utang pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2023 masih cukup tinggi, yakni mencapai Rp441,4 triliun. Naiknya suku bunga saat ini tentu akan berdampak pada volume bunga utang di tahun-tahun mendatang.

Itulah beberapa catatan sisa permasalahan utama tahun 2023 yang proses penanganannya harus dilanjutkan di tahun 2024. Sepintas memang tidak mudah. Paling utama, tentu saja membangun kesadaran bersama bahwa defisit bahan pangan, khususnya beras, semakin lebar akibat menyusut areal tanaman pangan dan menurunnya volume produksi. Kedua, cermat mengalkulasi ekses dari ketegangan geopolitik terhadap kepentingan nasional. Lalu, dengan naiknya suku bunga dan depresiasi rupiah, Indonesia tentu harus mewaspadai risiko gelembung beban bunga utang yang semoga saja tidak signifikan membebani APBN tahun-tahun mendatang. Lebih dari itu, semoga saja hasil Pemilu 2024 tidak menambah persoalan.

Telah berulangkali diingatkan bahwa perubahan iklim pasti memperlemah ketahanan pangan dan ketahanan air. Indonesia sudah mengalami dampak itu. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa Indonesia mengalami penurunan curah hujan tahunan sebesar 1-4% pada periode 2020-2034 dibanding periode 1995-2010. Fakta ini menyebabkan terjadinya kekeringan dan menyusutnya ketersediaan air. Volume produksi padi juga berpotensi menurun akibat pergeseran musim dan puncak hujan yang mendorong berubahnya metode tanam.

Data Bappenas memperkirakan, produksi padi di Indonesia menurun sekitar 1,13 juta ton-1,89 juta ton akibat perubahan iklim. Lahan pertanian seluas 2.256 hektar sawah pun terancam kekeringan. Sementara itu, dari aspek konsumsi pangan rumah tangga, kondisi ketahanan pangan Indonesia juga tidak terlalu baik dan memerlukan perhatian serius. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada 2022 meningkat menjadi 10,21% dari 8,49% pada 2021.

Peringatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat perkiraan Bappenas. BPS mengingatkan tentang perlunya mewaspadai potensi defisit beras. BPS misalnya, memperkirakan bahwa defisit terbesar terjadi pada Desember 2023, mencapai 1,45 juta ton beras. BPS juga mencatat adanya risiko penurunan luas panen dan produksi padi di akhir 2023 yang berdampak pada defisit bulanan untuk neraca komoditi beras.

Masih menurut BPS, penurunan luas panen dan produksi terjadi di provinsi yang selama ini menjadi sentra produksi nasional. Meliputi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Jawa Tengah. Sentra produksi padi itu mengalami penyusutan luas panen.

Data tentang defisit produksi beras dan data mengenai penurunan luas panen perlu dikedepankan agar menjadi perhatian semua pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah. Masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan karena berkait langsung dengan kebutuhan dasar lebih dari 270 juta jiwa rakyat Indonesia.

Impor bahan pangan tidak akan mudah lagi karena faktor ketidakpastian global itu. Kesulitan itu, mau tak mau, menyadarkan dan memaksa Indonesia untuk mulai berupaya mandiri pada aspek pengadaan pangan. Maka, pengelolaan dan pemanfaatan semua sumber daya nasional, utamanya anggaran negara, hendaknya tetap ditujukan pada semangat dan kewajiban untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan negara-bangsa hendaknya diprioritaskan.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya menyediakan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Rencana program pemerintah tentang ketahanan air hendaknya segera direalisasikan. Program menjaga dan meningkatkan luas tutupan hutan, serta konservasi sumber daya air dengan pembangunan waduk dan jaringan irigasi, idealnya semakin dipercepat sebagai antisipasi dampak perubahan iklim di tahun-tahun mendatang.

Bagi Indonesia, tahun 2024 tidaklah mudah karena masih terdampak oleh ketidakpastian global. Hasil Pemilu 2024 tidak otomatis dapat menyelesaikan persoalan-persoalan strategis yang mengemuka sepanjang 2023. Bahkan, jika tidak bijaksana, bukan tidak mungkin rangkaian persoalan strategis itu akan tereskalasi, baik karena faktor eksternal maupun faktor yang bersumber dari dalam negeri. ❑

Kunjungan Mahasiswa UIC ke MPR RI.

Hentoro Cahyono: MPR Terbuka Dikunjungi Siapapun

DENGAN maksud untuk serap wawasan kebangsaan sekaligus menambah pengetahuan tentang tupoksi lembaga MPR RI, para mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta, Selasa (12/12/2023), menyambangi MPR RI.

Rombongan mahasiswa Fikom UIC ini diterima oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI, Hentoro Cahyono, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kepada para tamunya, Hentoro mengatakan, MPR selalu terbuka untuk dikunjungi oleh rakyat Indonesia. "MPR adalah Rumah Kebangsaan, jadi siapa pun bisa berkunjung. Terima kasih atas kunjungan adik-adik mahasiswa dari UIC," ujarnya.

Meski baru dua bulan menjabat lingkungan Setjen MPR RI, Hentoro sangat memahami tupoksinya. Dia menjabat Deputi sejak 27 September 2023, setelah sebelumnya, pada 2020, menjabat sebagai Direktur Kajian Strategis di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandarlampung ini mengatakan, Indonesia sejak berdirinya telah melalui proses yang panjang dalam menjaga konstitusi negara. "Kita sudah empat kali melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan itu dibolehkan karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi, kalau Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh diubah," jelasnya.

Hentoro mengingatkan, MPR merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 sebagai produk hukum tertinggi.

Merujuk pada Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), Hentoro menyebut, salah satu tugas MPR adalah menyosialisasikan Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Empat Pilar ini juga harus dipahami dan dijiwai oleh para mahasiswa untuk menumbuhkan nasionalisme terhadap negara," harapnya. Karena itu, Hentoro berharap, para mahasiswa sebagai generasi Z selalu mengedepankan rasionalitas atau akal sehat. Dia mengingatkan adanya potensi ancaman dari luar sebagai pengaruh dari globalisasi. Ancaman itu, menurut Hentoro, yakni keterbukaan informasi, digitalisasi, dan pengaruh negatif asing.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Ancaman-ancaman ini bisa melemahkan kepribadian yang berkebudayaan Indonesia dan melemahkan sendi-sendi trisaksi bangsa," jelasnya.

Hentoro juga mengingatkan, saat ini dalam tahapan Pemilu 2024 untuk memilih pasangan calon presiden-wakil presiden dan calon anggota legislatif. Dia mendorong mahasiswa harus cerdas, menghindari politik uang dan memilih sesuai hati nurani.

"Menjelang Pilpres banyak black campaign (kampanye gelap). Berita yang bisa memecah belah bangsa harus disaring. Mahasiswa harus lebih cerdas menentukan pilihan dan gunakan hak pilih sesuai hati nurani," harap dia.

Hentoro pun mengingatkan agar mahasiswa maupun publik lebih hati-hati dan bijak menggunakan media sosial.

"Hati-hati, sekarang mudah terkena UU ITE, jangan mudah menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Dulu kita kenal istilah mulutnu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu," tutur Hentoro.

Dosen Fikom UIC, Fuji Samantha Zirman, mengapresiasi MPR yang telah bersedia menerima mahasiswa dan memberi penjelasan yang sangat bermanfaat terkait tupoksi lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini.

"Ini sebuah kesempatan yang sangat baik. Mahasiswa dan dosen mendapat banyak pengetahuan dari MPR. Sebenarnya masih banyak mahasiswa yang ingin datang," kata Fuji.

Fuji berharap, pihak Setjen MPR masih bersedia menerima kembali mahasiswa dari UIC yang ingin menimba ilmu di lembaga negara ini.

Apresiasi yang sama disampaikan oleh mahasiswa Fikom UIC, Yuliana Kartika dan Rini Haryani. Yuliana menilai, materi yang diterimanya sangat bagus karena membahas empat pilar kebangsaan yang mengacu pada nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, Bhinneka Tunggal Ika mewakili keragaman budaya, dan NKRI ini mempertegas persatuan dalam keberagaman. Keempat pilar ini menjadi fondasi identitas dan kebangsaan Indonesia," ujar Yuliana.

Seperti halnya Yuliana, Rini Haryani menilai materi yang diterimanya sangat bermanfaat. Dia berharap seluruh anggota MPR bisa menunjukkan integritas moral yang baik dan tetap bercermin pada beberapa kasus anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi. ❑

DER

Yogya Istimewa Untuk Indonesia

Kekuasaan ini sudah ada sejak tahun 1755 dengan wilayah yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam perjalanan waktu, posisi Kesultanan Yogyakarta lebih dominan menentang kolonialisme Belanda dan Inggris. Saat Indonesia merdeka, Sultan IX lebih memilih mengintegrasikan diri ke dalam Republik Indonesia.

Lewat UU Tahun 1950, membuat birokrasi pemerintahan harus dipisahkan dengan monarki sehingga posisi Kesultanan Yogyakarta hanya menjadi pemangku adat budaya Jawa namun di pemerintahan Sultan tetap menjadi pemimpin daerah istimewa tingkat I dibawah Presiden.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KEKUASAAN Kesultanan Mataram yang membentang di Pulau Jawa, Madura, bahkan disebut hingga Kalimantan Barat, Sumatera, dan Sulawesi, akhirnya pecah pada 13 Februari 1755. Dengan Perjanjian Giyanti, Mataram dibagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, wilayah yang diperuntukkan bagi Kesultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi; Kedua, wilayah buat Kasunanan Surakarta; Dan, ketiga, daerah pesisir dan Madura yang dikuasai oleh VOC.

Kesultanan yang pernah berjaya di masa Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma atau yang lebih popular disebut Sultan Agung itu tercerai-berai dikarenakan selain adanya intrik dalam kekuasaan juga karena ada faktor VOC yang kerap disebut sebagai pengadudomba.

Sebagai penerima tahta kekuasaan Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi selanjutnya *babad alas* (membuka lahan baru) untuk dijadikan ibu kota negara. Di Hutan Paberingan, Pangeran Mangkubumi membangun keraton. Di wilayah di antara Kali Winongo dan Kali Code selanjutnya berdiri megah Istana Kesultanan Ngayoyakarta Hadiningrat.

Setelah istana berdiri, Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Hamengku Buwono I beserta *abdi dalem* (perangkat istana)-nya, *boyongan* (pindah) ke istana pada 7 Oktober 1756.

Diungkap adalam *Wikipedia*, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu: Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibu kota), Nagara Agung (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).

Dalam perjalanan waktu, dari Sultan Hamengku Buwono I hingga Sultan Hamengku Buwono IX, di Kasultanan Yogyakarta terjadi berbagai macam peristiwa, seperti berkonflik dengan kekuasaan kolonialisme Belanda, Inggris, adanya Perang Diponegoro, hingga di masa pendudukan Jepang.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Konflik yang tercatat dalam sejarah perjalanan kesultanan memosisikan Yogyakarta sebagai institusi yang terhormat dalam sejarah perjalanan bangsa.

Sultan HB IX: Integrasi ke Republik Indonesia

Ada beberapa dugaan yang membuat Sultan Hamengku Buwono VII memutuskan turun tahta atau *lereh keprabon*. Dugaan-dugaan tersebut adalah: *Pertama*, Sultan VII ingin mencari ketenangan hidup. Ketenangan hidup yang dicari dengan jalan *mandeg pandita* (bertapa) di Pesanggrahan Ambarukmo. *Kedua*, Sultan HB VII memilih turun tahta karena sikap politiknya yang menentang peraturan baru yang dibuat oleh Belanda. Dirinya tidak sudi dengan aturan itu sehingga memilih untuk turun tahun 1931.

Kekuasaan selanjutnya diteruskan oleh putera mahkota, Gusti Pangeran Harya Purbaya. Ia bergelar Sultan Hamengku Buwono VIII.

Di era kekuasaan Sultan HB VIII ini dilakukan revitalisasi dan renovasi aset-aset keraton. Sedang keluar, segala kehidupan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan didirikan. Dari sinilah geliat Yogyakarta tumbuh berkembang. Sultan HB

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

VIII berkuasa selama 18 tahun hingga tahun 1939.

Kekuasaan Sultan HB VIII dilanjutkan oleh puteranya, yakni Gusti Raden Mas Dorojatun. Prosesi penyerahan kekuasaan, di *Wikipedia* diberitakan, ditandai penyerahan keris pusaka *Kyai Joko Piturun* kepada Dorojatun. Pengukuhan Dorojatun menjadi Adipati Anom sendiri baru dilakukan beberapa saat sebelum pengangkatannya dirinya menjadi Sultan Hamengku Buwono IX pada tahun 1940.

Pada masa itu, kekuasaan Belanda sangat kuat menekan Yogyakarta. Diungkap, ada proses yang alot untuk melakukan kesepakatan politik dengan Belanda. Sultan HB IX awalnya tidak bersepakat dengan sikap politik Belanda, namun sikap itu berubah setelah dirinya mendapat bisikan gaib dari ayahnya, Sultan Hamengku Buwono VIII yang mengatakan, Belanda akan pergi (dari Indonesia).

Bisikan gaib tersebut menjadi nyata buktinya pada tahun 1942, kekuasaan kolonialisme Belanda terusir dari nusantara setelah kedatangan bala tentara Jepang. Jepang pun menduduki Yogyakarta.

Rupanya ulah Jepang tak beda dengan Belanda. Jepang pada masa itu hendak mengambil penduduk Yogyakarta untuk dijadikan romusha. Keinginan tersebut berhasil dicegah Sultan HB IX dengan cara memanipulasi data statistik produktivitas pertanian dan peternakan. Kepada Jepang,

Sultan HB IX mengatakan, tenaga rakyat hendak digunakan untuk membangun kanal irigasi raksasa yang menghubungkan antara Sungai Progo dan Sungai Opak.

Kanal ini perlu dibangun agar pengairan sawah dapat dilakukan sepanjang tahun. Cara ini dilakukan sebagai upaya baru, sebab sebelumnya sistem pertanian menggunakan model tadah hujan. Kanal yang ada diberi nama *Selokan Mataram* dan terbukti mampu memakmurkan masyarakat saat itu. Percaya pada omongan Sultan HB IX membuat Jepang tidak mengambil rakyat di sana sebagai romusha.

Sehari setelah dibacakan Pernyataan Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan HB IX mengucapkan selamat kepada para pendiri bangsa. Beberapa hari berikutnya, tepatnya pada 20 Agustus, Sultan HB IX mengirim telegram yang isinya: "Yogyakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan." Pernyataan itu disebut sebagai sinyal Yogyakarta sudi bergabung dengan Indonesia.

Sumber lain menyebut, setelah Proklamasi, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden Indonesia bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Indonesia (*jogjaprov.go.id*).

Dukungan bergabung dengan Indonesia diperkuat pada 5 September 1945, di mana Sultan HB IX pada waktu itu mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan Sultan sebagai pemimpinnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Sultan HB IX itu juga dilakukan oleh Paku Alam VIII melalui amanat setelahnya atas Kadipaten Pakualaman dan menjadi wakil pemimpin Yogyakarta.

Dalam *Wikipedia* hal itu disebut konsep dwi tunggal, di mana dua pemimpin bersama-sama membantu untuk membangun negara Indonesia. Realisasi Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 1945, sehari setelah telegram dari Yogyakarta tiba.

Meski Indonesia sudah merdeka, namun di kalangan elit politik dan rakyat Indonesia masih terjadi sikap pro dan kontra. Ada yang ingin merdeka, ada pula yang masih ingin bersama Belanda. Puncak konflik sikap pro dan kontra tersebut terjadi pada Januari 1946.

Sultan HB IX tahu kondisi di Jakarta tidak stabil. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi, Sultan HB IX mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta agar pemerintahan Indonesia untuk sementara dipindah ke Yogyakarta. Soekarno girang mendapat tawaran yang demikian. Dirinya pun dengan segera menuju ke kota yang saat ini disebut sebagai Kota Pelajar untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan naik kereta dari Stasiun Manggarai, Jakarta, Soekarno menuju Yogykarta pada 3 Januari 1946.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Proses pengintergrasian Yogyakarta ke Indonesia setelah itu semakin masif. Dalam catatan seperti dikutip dari *Wikipedia*, diungkap pada 1946-1950 terjadi pengintegrasian wilayah-wilayah Yogyakarta ke Republik Indonesia. Wilayah Kesultanan Yogyakarta yang diintegrasikan ke Indonesia adalah Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT. Hardjodiningrat, Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT. Pringgodiningrat, Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT. Joyodiningrat, Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT. Suryodiningrat, Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT. Secodiningrat.

Pada masa itu, wilayah yang ada tidak memiliki otonomi melainkan hanya wilayah administratif. Diungkap dalam *Wikipedia,* para bupati yang mengepalai masing-masing kabupaten disebut dengan *Bupati Pamong Praja*. Mereka juga mengepalai birokrasi kerajaan yang disebut dengan *Abdi Dalem Keprajan*. Birokrasi kerajaan inilah yang akan menjadi tulang punggung utama kabupaten dan kota sampai tahun 1950.

Agar kedudukan hukum pengintegrasian Yogyakarta semakin kuat maka pada tahun 1950 dibuat UU. No. 3 Tahun 1950 (BN 1950 No. 3). Undang-undang itu diubah menjadi UU. No. 19 Tahun 1950 (BN 1950 No. 48). Undang-undang itu Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950 (BN 1950 No. 58).

Dampak hukum dari lahirnya undang-undang itu membuat birokrasi pemerintahan harus dipisahkan dengan monarki, sehingga posisi Kesultanan Yogyakarta hanya menjadi pemangku adat budaya Jawa, khususnya Gaya Yogyakarta. Sedangkan di pemerintahan, Sultan tetap menjadi pemimpin daerah istimewa tingkat I di bawah Presiden (*Wikipedia*).

Di *web* itu juga diungkap, bergabungnya Kesultanan Yogyakarta ke dalam pemerintahan Indonesia membuat keraton menjadi terbuka terhadap masyarakat. Beberapa kesenian yang sebelumnya sama sekali tidak boleh keluar dari keraton, kemudian diizinkan oleh Sultan. Beberapa aset dan pusaka kesultanan juga diizinkan dilihat oleh umum dengan dibukanya Museum Keraton Yogyakarta.

Pada 7 Oktober 1988, Kesultanan Yogyakarta berduka, Sultan HB IX wafat. Proses pergantian kekuasaan pun beralih ke anak laki-laki tertua, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi. Alumni UGM itu resmi ditunjuk menjadi Adipati Anom setelah musyawarah keluarga. Penobatan menjadi Adipati Anom dilakukan sebelum dinobatkan menjadi Sultan. Setelah dinobatkan menjadi Sultan pada Maret 1989, dia mempunyai gelar Sultan Hamengku Buwono X.

Peralihan kekuasaan yang terjadi di Yogyakarta pada saat itu dicatat sangat bersejarah, sebab biasanya dalam peralihan kekuasaan di Kesultanan Yogyakarta ada campur tangan kekuasaan kolonial, namun kali ini tak ada campur tangan kekuasaan dari mana pun. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Amanat 5 September 1945: Dekrit Integrasi

Proses pengintegrasian Yogyakarta ke dalam Negara Republik Indonesia melalui banyak proses. Dalam perdebatan di daerah, ada pihak yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah biasa, seperti daerah lain. Sementara pihak yang lain ada pula yang menghendaki menjadi daerah istimewa.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MESKI Jepang menduduki Yogyakarta, negeri yang dijuluki Matahari Terbit itu tetap menghormati keberadaan Kesultanan Yogyakarta. Negara yang berhasil mengusir penjajah Belanda dari nusantara itu mengakui, Yogyakarta sebagai daerah istimewa atau dalam bahasa Jepang-nya disebut *kooti. Kooti* ini dipimpin oleh *koo*, kepala daerah. Saat itu Jepang mengakui Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai *Koo Kooti* Yogyakarta.

Sebagai *Kooti*, Yogyakarta pada masa itu memiliki struktural pemerintahan di bawah-nya beserta aparatur pemerintahannya.

Dua hari setelah Indonesia menyatakan merdeka, PPKI tengah melakukan sidang-sidangnya. Pada tanggal 19 Agustus 1945, agenda sidang badan yang dibentuk oleh Jepang itu membahas mengenai *Kooti* Yogyakarta. Anggota PPKI dari Yogyakarta, Pangeran Puruboyo, meminta kepada pemerintah pusat agar Yogyakarta dijadikan daerah otonom sepenuhnya. Usulan tersebut akhirnya menjadi status quo sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Namun, dalam sejarah tentang Yogyakarta yang tertuang di *www.bpkp.go.id* dikatakan, pada hari itu juga Proklamator Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan

Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Oleh pemerintahan yang ada di Jakarta, piagam tersebut baru diserahkan pada 6 September 1945 setelah sikap resmi dari para penguasa monarki dikeluarkan.

Sikap resmi Sultan HB IX itu adalah menyatakan integrasi Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, Sultan HB IX mengeluarkan *Dekrit Integrasi*. Di hari yang sama, Paku Alam VIII juga melakukan hal yang sama. Menjadi pertimbangan Yogyakarta mengeluarkan *Dekrit Integrasi* adalah suara rakyat Yogyakarta.

Lebih lanjut, dalam *www.bpkp.go.id* diungkap, untuk merumuskan susunan dan kedudukan daerah Yogyakarta, Badan Penyelidik Persiapan Komite Nasional Indonesia Daerah (BPKNID) Yogyakarta melakukan sidang-sidang untuk merumuskan RUU (Rancangan Undang-Undang) Pokok Pemerintahan Yogyakarta.

Hasil sidang mengalami *deadclok,* sebab ada dua pihak belum sepakat mengenai Pemerintahan Yogyakarta. Pihak *pertama*, menghendaki Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah lain. Pihak *kedua*, penguasa monarki yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Meski kesepakatan mengalami titik beku, namun RUU yang terdiri dari 10 Bab itu akhirnya rampung juga.

Dalam perjalana waktu, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII dengan persetujuan BPKNID mengeluarkan Maklumat No. 18 Tahun 1946 Tentang Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Maklumat itu tertanda 18 Mei 1946. Maklumat yang ada merupakan hasil dari keputusan dari sidang BPKNID yang digelar pada 24 April 1946.

Setelah sepakat dengan maklumat yang ada, BPKNID menyatakan. menyelesaikan tugasnya atau membubarkan diri. Sebagai gantinya, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII membentuk Dewan Daerah. Dalam masa sidang yang pertama, Dewan Daerah mengesahkan Maklumat No. 18 Tahun 1946. Sidang tersebut merupakan hari yang bersejarah, karena dalam maklumat dinyatakan nama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) digunakan menandai bersatunya dua monarki Kesultanan dan Pakualaman dalam sebuah daerah istimewa.

UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri selanjutnya menjadi acuan dalam membuat UU No. 3 Tahun 1950 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aturan teknisnya lewat PP No. 31 Tahun 1950.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Adapun isi undang-undang itu sangat singkat, hanya 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi. Aturan hukum yang ada hanya mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan.

UU. No. 3 Tahun 1950 menyatakan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi, bukan sebuah Provinsi. Meski nomenklaturnya mirip, namun saat itu mengandung konsekuensi hukum dan politik yang amat berbeda, terutama dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Walau begitu DIY bukan pula sebuah monarki konstitusional.

Dalam perjalanan waktu, kedudukan Yogyakarta diatur dengan berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah, hingga lahir UU. No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. Dalam *jogjaprov.go.id* disebutkan, pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka Tunggal ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya, dengan memerhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Lebih lanjut dalam *web* itu disebut, kewenangan dalam urusan keistimewaan, seperti yang tertuang dalam UU. No. 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan UU. No. 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU. No. 32 Tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. (*Sumber: www.bpkp.go.id dan jogjaprov.go.id*). ❏

AWG*/dari berbagai sumber*

Penetapan Yes!, Pemilihan No!

Rakyat Yogyakarta menolak adanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mereka menggelar apel akbar mendukung penetapan. Sultan Hamengku Buwono IX pun mengeluarkan Dekrit Kerajaan Sabdatama. Tekanan dari Yogyakarta membuat Pemerintah Pusat dan DPR menetapkan UU. No. 13 Tahun 2012 yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan Sultan Yogyakarta.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEKITAR lima ribu orang pada Rabu, 29 Desember 2010, memadati Lapangan Desa Candi Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga masyarakat Yogya yang menyemut di lapangan hijau itu berasal dari berbagai komunitas dan paguyuban, seperti Paguyuban Lurah Sleman, Paguyuban Lurah se-DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), paguyuban perangkat desa, paguyuban badan perwakilan desa, Slemania, Paguyuban Warga Budaya Suroloyo Kulonprogo, dan Gerakan Rakyat.

Mereka yang hadir di sana atas undangan Paguyuban Dukuh Sleman (Cokro Pamungkas) dan Paguyuban Dukuh se-DIY (Semar Sembogo) untuk mengikuti *Apel Akbar Mendukung Penetapan Gubernur Yogyakarta*. Dalam apel akbar itu mereka menolak adanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Yogyakarta.

Dalam apel tak hanya menyatakan sikap, namun juga dibarengi pengibaran Bendera Negari Ngayogyakarto Hadiningrat. Bendera Yogyakarta itu berwarna kuning dengan lambang *Haba* yang merupakan lambang keraton kesultanan. Dalam *detik.com, 29 Desember 2010*, juga disebut pada apel itu juga ada pelantikan Satgas Penggagalan Pemilukada DIY. Satgas itu juga disebut Satgas Penetapan.

Ketua Paguyuban Dukuh Sleman, Sukiman Hadi Wijoyo, dalam *web* itu menegaskan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan dengan menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertahta. Lebih lanjut dikatakan, apabila pemerintah tetap memaksakan pemilihan, warga maupun dukuh tidak memilih dan tidak mau jadi panitia penyelenggara. Ucapan Sukiman itu disambut ribuan orang dengan teriakan: “penetapan yes! pemilihan no!”.

Apa yang terjadi di Sleman itu merupakan reaksi dari adanya RUU Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Reaksi negatif masyarakat di sana atas RUU tersebut berawal dari Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan, Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meski Pasal 9 ayat (1) menyatakan, Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta karena kedudukannya ditetapkan sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, namun dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan, Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur.

Nah dalam Bab VI Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,

pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan cara pemilihan. Dalam Pasal 17 ayat (1). Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berasal dari: a. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta; b. kerabat Kasultanan dan kerabat Pakualaman; c. masyarakat umum. RUU itu disebut mengundang adanya Pilkada di Yogyakarta yang bisa berdampak pada turunnya wibawa Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam.

Panasnya 'hubungan' Yogyakarta dengan Pemerintah Pusat dan DPR terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta sampai membuat Sultan HB IX mengeluarkan Dekrit Kerajaan Sabdatama. Dekrit yang ditandatangani oleh Sultan HB IX pada 10 Mei 2012 itu berbunyi, *Sabdatama. Ingsun Kang Jumeneng Nata Mataram medarake Sabda: Dene Kraton Ngayogyakarta saha Kadipaten Paku Alaman iku, loro-loroning atunggal.*

Kaya kang dikersaake lan dikaperangake, Mataram ngesuhi Nuswantara, nyengkuyung jejeging negara, nanging tetep ngagem paugeran lan tata kaprajane dewe.

Kang mangkana iku kaya kang dikersaake, Sultan Hamengku Buwono sarta Adipati Paku Alam kang jumeneng, katetepake jejering Gubernur lan Wakil Gubernur.

Maksud Sabdatama (*tempo.co*, 10 Mei 2012) adalah: *Pertama*, Sultan menyatakan "*Dene Kraton Ngayogyakarta saha Kadipaten Paku Alaman iku, loro-loroning atunggal*" (bahwa Keraton Yogyakarta dengan Kadipaten Paku Alaman sebagai satu kesatuan yang manunggal tak terpisahkan).

Kedua, Sultan menyebut, "*Mataram iku negri kang merdika lan nduweni paugeran lan tata kaprajan dewe*," (Mataram sebagai negeri yang merdeka dan memiliki tata adat dan aturan sendiri).

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ketiga, "*kaya kang dikersaake lan dikaperangake, Mataram ngesuhi Nuswantara, nyengkuyung jejeging negara, nanging tetep ngagem paugeran lan tata kaprajane dewe*" (Seperti yang diharapkan dan diperbolehkan, Mataram termasuk di dalam Nusantara, mendukung tegaknya negara, tapi tetap memegang norma tradisi dan pemerintahan-kerajaan sendiri)

Keempat, "*kang mangkana iku kaya kang dikersaake, Sultan Hamengku Buwono sarta Adipati Paku Alam kang jumeneng, katetepake jejering Gubernur lan Wakil Gubernur*," (Sebab itu seperti yang diinginkan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta yang ditetapkan bersama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur).

Dalam *jogjaprov.go.id*, 10 Mei 2021, disebut *Sabdatama* Sri Sultan HB X yang baru pertama kali ini, makna intinya adalah bahwa Keraton Ngayogyokarto dan Kadipaten Paku Alaman dua-duanya adalah satu kesatuan, dan Mataram adalah negara merdeka yang memiliki aturan dan tata pemerintahan sendiri.

Atas desakan masyarakat Yogyakarta dan diperkuat dengan Dekrit Kerajaan Sabdatama maka RUU Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan menjadi UU. No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 31 Agustus 2012 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012 dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin.

UU. No. 13 Tahun 2012 tidak ada lagi tentang gubernur utama dan wakil gubernur utama. Selain itu, gubernur dan wakil gubernur diisi dengan cara penetapan. Calon gubernur dan wakil gubernur yang ada tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf. c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.

Hari pengesahan UU. No. 13 Tahun 2012 setiap tahunnya diperingati oleh masyarakat dan aparat di jajaran pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi di Yogyakarta. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Sosialisasi Empat Pilar dan Serap Aspirasi

Sjarifuddin Hasan Dengar Keluhan para Ibu Rumah Tangga

AHAD, 17 Desember 2023, ratusan warga Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, memenuhi sebuah lapangan di kelurahan tersebut. Hari itu, mereka berkumpul di sana, untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut sosialisasi Empat Pilar MPR.

Sosialisasi yang digelar oleh MPR bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pemuda Cimahpar itu secara khusus dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjafruddin Hasan, SE., MM., MBA.,dan sekaligus menjadi narasumber sosialisasi tersebut.

Acara sosialisasi yang digelar mulai pukul 10.00 WIB itu dihadiri oleh kaum ibu, para bapak, dan generasi muda. “Hari ini kita bicara tentang Empat Pilar,” papar politisi senior Partai Demokrat yang biasa disapa Syarief Hasan itu. Karena itu, lanjutnya, pertemuan ini penting. Apalagi, anggota DPR RI dari dapil III Jawa Barat ini, meyakini di antara peserta masih ada yang bingung mengenai kedudukan MPR dan DPR.

Selanjutnya, Syarief Hasan menjelaskan tentang MPR dan DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat, kata Syarief Hasan, merupakan salah satu lembaga negara. “Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD”, ujarnya. “Kalau rakyat memilih salah satu caleg DPR saat pemilu dan terpilih, maka ia otomatis menjadi anggota MPR,” jelas Syarief Hasan.

Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lebih lanjut

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menjelaskan tugas dan wewenang MPR dan DPR. “Masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang tidak sama”, ucapnya. DPR, katanya, memiliki tugas membuat undang-undang, membuat anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Tiga hal itu adalah tugas pokok dari DPR”, paparnya. Sedang tugas dan wewenang MPR, kata Syarief Hasan, di antaranya adalah melakukan amandemen UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan bisa memakzulkan Presiden.

Pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu paham bahwa warga di sana juga merasakan dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Terkait hal demikian, Sjarifuddin Hasan menjelaskan, dalam UUD diamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. “Jadi setiap lima tahun sekali kita harus melakukan pemilu”, tegasnya.

Pemilu yang digelar terdiri dari pemilu presiden, pemilu memilih anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan memilih anggota DPD. “Semua pemilu ini dilakukan secara serentak”, tuturnya.

Diingatkan oleh pria asal Sulawesi Selatan itu, sebagai warga negara yang baik, rakyat harus tunduk dan patuh menjalankan konstitusi, UUD, dengan cara berpartisipasi aktif datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menentukan pilihan atau menyalurkan suaranya. “Ayo berbondong-bondong ke TPS pada 14 Februari 2024”, ajaknya. Tanggal, bulan, dan tahun itu merupakan Hari-H Pemilu 2024.

Sjarief Hasan juga mengingatkan kepada warga, sebelum berangkat ke TPS harus ingat partai apa yang hendak dipilih. Pemilu disebut sebagai jalan untuk memperbaiki masa depan bangsa.

Selain melakukan sosialisasi, kunjungan kerja pada hari itu di kota yang dijuluki kota hujan itu, Syarief Hasan juga melakukan serap aspirasi. Serap aspirasi diadakan di Kelurahan Tanah Sereal dan Kelurahan Kebon Pedes.

Di dua kelurahan yang berada di Kecamatan Tanah Sereal itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendengar keluhan para ibu rumah tangga mengenai naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok. Mendengar keluhan seperti itu, ia mengatakan negara harus membikin rakyat sejahtera.

Ada kiat agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, yang menurut Syarief Hasan, pendapatan rakyat harus dinaikkan. Bila pendapatan rakyat naik maka saat harga-harga melambung, rakyat masih tetap bisa membeli. Hal demikian, menurutnya, pernah terjadi di masa Presiden SBY di mana pendapatan rakyat naik sehingga problem kehidupan bisa teratasi. ❑

Gelar Asmas MPR Di Gorontalo

Fadel Muhammad diminta Jabat Gubernur Gorontalo Kembali

Ada permintaan menarik datang dari warga masyarakat di Desa Dembe 1, Kota Gorontalo, agar Fadel Muhammad kembali menjabat Gubernur Gorontalo untuk ketiga kalinya. Apa kata Fadel Muhammad?

JIKA rakyat sudah cinta dan percaya dengan pemimpinnya, maka akan sulit 'move on' ketika pemimpin tersebut lengser atau tidak lagi memimpin. Demikian yang tejadi pada sosok tokoh nasional Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad.

Mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini, diminta masyarakat untuk kembali menjabat Gubernur Gorontalo untuk ketiga kalinya.

Permintaan luarbiasa tersebut, keluar saat Fadel Muhammad menggelar acara 'Asmas MPR RI Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat', di Desa Dembe 1, Kelurahan Kota Barat, Kota Gorontalo, Sabtu malam (9/12/2023).

Sejatinya, dalam acara tersebut Fadel Muhammad melakukan bincang-bincang untuk mendengar aspirasi warga tentang apa saja terkait kehidupan mereka.

Tapi, di sela-sela dialog ada sebagian warga yang tiba-tiba maju dan menyampaikan aspirasi yang tergolong unik tersebut.

Merespon permintaan warga, anggota

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo ini hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih.

"Alhamdulillah, saya hargai pemintaan bapak dan ibu. Tapi, memang aturannya tidak memungkinkan saya menjabat Gubernur untuk tiga periode. Hanya dibolehkan maksimal dua periode saja," kata mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Namun, jika sistem mengijinkan tiga periode, lanjut Fadel Muhammad, dirinya masih sanggup walaupun usia sudah lebih dari 70 tahun.

"Saya berharap yang muda-muda saja maju. Tapi, harus yang berkualitas dan memiliki wawasan, kemauan dan kemampuan untuk memajukan daerah secara maksimal," ujarnya.

Ternyata, masyarakat masih penasaran. Beberapa warga bahkan meminta lebih jauh lagi. "Kalau tidak bisa Gubernur, jadi Presiden atau Wapres saja pak," teriak mereka.

Fadel Muhammad hanya menggelengkan kepala dan tertawa mendengar aspirasi unik mereka. "Intinya begini, jabatan dan kewenangan yang saya pegang saat ini, akan saya maksimalkan untuk kepentingan rakyat itu saja. Dan mudah-mudahan, saya saya menjabat Gubernur dahulu, berdampak baik untuk daerah dan kesejahteraan rakyat," terangnya. ❑

Felicia Aldiyani
SMA Negeri 1 Kuta

Hasil Sidang Tahunan MPR Penting Disampaikan Melalui Medsos

SAYA berpendapat bahwa kegiatan di Parlemen Indoensia, terutama MPR RI, seperti Sidang Tahunan yang dihadiri Presiden RI dan seluruh Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, dengan agenda penyampaian laporan kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada masyarakat melalui sidang MPR, sangat penting untuk keberlangsungan dan eksistensi bangsa dan negara.

Namun, bagi kami sebagai generasi milenials, perhelatan tersebut terasa terlalu formal dengan bahasa yang sangat sulit untuk kami mengerti. Tapi, kami paham bahwa sidang tersebut adalah sidang kenegaraan resmi. Tentu saja penyampaiannya harus resmi.

Saya berharap, agar ketika sidang berakhir, hasilnya bisa disampaikan kepada generasi milenials di media social, seperti youtube, Instagram, tiktok dengan penyampaian yang dimengerti oleh kami. Sehingga kami menjadi paham pentingnya sidang tahunan itu untuk rakyat Indonesia. Dan, kami menjadi mengerti apa-apa yang disampaikan Presiden dan lembaga-lembaga negara tentang kinerja mereka selama ini. Lama kelamaan akan memancing kami untuk tertarik dan bercita-cita terjun ke dunia politik, dan menjadi pemimpin bangsa. ❑

DER

Curhat Pembagian Bansos

Syarief Hasan: Perlu Perbaikan Data dan Pentingnya Pengawasan

KUNJUNGAN kerja Wakil Ketua MPR, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., ke Kota Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2023, dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka alami.

Saat menggelar pertemuan di salah satu balai di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, warga curhat atas ketidakadilan dalam hal pembagian bantuan sosial (bansos). “Pembagiannya tidak adil dan tidak merata,” ujar salah seorang warga ketika menyampaikan uneg-unegnya..

Mendengar curhatan yang demikian, Sjarifuddin Hasan yang biasa disapa Syarief Hasan, mengucapkan terima kasih atas keberanian warga mengungkapkan masalah yang mereka hadapi. “Ungkapan tadi merupakan salah satu bentuk kepedulian pada kondisi masyarakat,” tutur Syarief Hasan. “Dan, apa yang disampakan itu menjadi catatan dalam kunjungan kerja ini,” tambahnya.

Setelah mendengar pembagian bansos yang tidak adil dan tidak merata, selanjutnya Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, prosedur pembagian bansos perlu dievaluasi ulang. Menurut Syarief Hasan, salah satu

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kelemahan dari program pembagian bansos itu adalah menyangkut masalah data. Data, katanya, selalu di-up date namun masih saja terjadi kesalahan..

Kesalahan data membuat bansos salah sasaran, seperti mereka yang tidak berhak malah menerima bansos. Sedang mereka yang berhak malah kelewatan. “Bahkan, ada orang yang sudah meninggal masih tercatat mendapat bansos,” ujar anggota DPR dari Dapil III Jawa Barat yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu.

Akibat salah sasaran muncul pandangan tidak adil dari masyarakat. “Bagaimana adil kalau orang yang rumahnya gedong atau memiliki sepeda motor dua malah mendapat bansos,” tuturnya. Oleh karena itu,m anggota Komisi I DPR itu kembali menegaskan, perlunya evaluasi terhadap pembagian bansos. Data yang ada perlu direvisi. Dengan demikian penyaluran bansos ke masyarakat akan tepat sasaran.

Tapi, menurut Syarief Hasan, tidak hanya data yang perlu diperbaiki, namun juga penting adanya pengawasan dan feedback (masukan) dari masyarakat, seperti curhatan tadi. “Bila ini dilakukan maka ke depan akan lebih baik,” ujarnya.

Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu mengakui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa. Angka kemiskinan masih tinggi, mencapai 9,3%. Jadi, untuk mengentaskan kemiskinan ini, menurut Syarief Hasan, merupakan pekerjaan yang penuh tantangan.

Pada hari itu, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menggelar pertemuan dengan ratusan warga di Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat. ❑

Yahya Husain

Pemuda Desa Ombulodata, Gorontalo

Kembangkan Potensi Olahraga Masyarakat Desa

TAK jarang pejabat daerah sampai pusat mendatangi desa-desa dengan berbagai tujuan dan misi. Saya sebagai generasi muda desa, tidak begitu ambil pusing dengan tujuan pejabat mendatangi desa, terutama desa kami.

Tapi satu hal penting, kedatangan para pengambil kebijakan tentu akan berdampak baik untuk desa, itu jika ambil dari pemikiran positif. Ada satu hal yang mau saya sampaikan bahwa banyak potensi besar yang ada di desa dan dimiliki para pemuda desa, salah satunya bidang olahraga.

Namun, sangat disayangkan potensi besar belum tentu maksimal jika tidak dibarengi dengan atau disinergikan dengan peralatan dan pelatihan secara professional yang cukup. Di desa kamipun begitu, kami membutuhkan sarana olahraga yang baik, seperti sepak bola, voli, juga bulutangkis. Dan, kami juga menbutuhkan pelatihan yang bagus sehingga bakat kami terarahkan dengan baik.

Kami pun bercita-cita ingin ikut membangun bangsa atau menorehkan prestasi mengharumkan nama bangsa dengan bakat dan potensi yang ada pada diri kami. ❑

DER

Hery Cahyadi

Sempat Merasakan Penderitaan

Sebagai Guru Honorer

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BESI dan kayu bisa saja lekang oleh waktu. Tetapi, julukan kepada para guru dengan istilah 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa' tak akan pernah berubah. Bahkan, semakin jauh kita menyusur ke daerah-daerah pedalaman, juga daerah terluar dan pinggiran, kisah perjuangan para guru akan semakin banyak ditemukan. Karena itu, sampai kapanpun julukan pahlawan tanpa tanda jasa itu tak akan pernah bisa dilepaskan dari atribut para guru. Merekalah yang membuka harapan dan masa depan generasi muda untuk hidup lebih baik dari sebelumnya.

Simaklah kisah dan perjuangan yang dialami Hery Cahyadi (47), Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 011 Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sebelum menjadi guru PNS dan Kepala Sekolah seperti sekarang, pada 1999, Hery adalah guru honorer dengan gaji Rp. 200.000/bulan.

Dengan gaji sebesar itu, praktis senantiasa dalam ancaman tidak ngebul. Karena itu, Hery dituntut bekerja lebih keras dan tidak bisa bergantung hanya dengan honor yang diterima sebagai seorang guru. Pilihannya adalah nyambi menjadi nelayan.

Menjadi guru sesungguhnya bukanlah cita-citaa Hery. Tapi, profesi guru itu dia raih melekat pada dirinya setelah lulus pendidikan di Pesantren Al-Mukmin di Kecamatan Muara Muntai, tahun 1997. Ceritanya, setelah lulus pendidikan di pesantren, Hery ditugaskan oleh ustadnya untuk mengajar ngaji di Muara Muara Enggelam, karena di sana memang sedang kosong guru ngaji. Muara Enggelam merupakan desa yang dibangun di atas aliran Sungai Enggelam dan langsung berhadapan dengan Danau Melintang.

Salah satu alasan yang membuat Hery mengamini tugas yang diberikan ustadnya itu, karena Ia ingat bahwa orangtuanya juga pernah mengajar di Muara Enggelam. Orang tuanya, seorang guru PNS mengajar di Sekolah Dasar Negeri Muara Enggelam. Berbekal cerita tersebut, Hery pun berangkat untuk menjalankan amanat, mengajar anak-anak membaca dan menulis Alquran.

Meski tak yakin dengan jaminan masa depan, Hery tetap menjalankan amanat diberikan ustadnya di Pesantren Al-Mukmin. Setelah satu tahun mengajar membaca dan menulis Alqur'an, tepatnya pada 1998, pria kelahiran Kayu Batu, 28 Agustus 1976, ini bertemu dengan jodohnya.

Dan, setahun kemudian, Hery resmi menjadi guru. Ceritanya, pada 1999 pemerintah membuka penerimaan guru honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sejumlah sekolah dasar di kawasan pedalaman. Singkat cerita, Hery pun ikut mendaftar dan lulus seleksi. Imbasnya, ia harus rela dipindahkan ke tempat yang lebih jauh, yaitu Dusun Kuyung, Desa Sebemban, Kecamatan Muara Wis.

"Kalau bukan karena kesabaran dan kekuatan mental, mungkin saya sudah keluar. Saat itu honor yang saya terima adalah Rp. 200.000/bulan dan itu jauh dari mencukupi. Apalagi, saya juga sudah punya satu orang anak," cerita Hery.

Kembali ke Enggelam

Meski dalam menjalankan tugasnya merasakah himpitan ekonomi, tetapi Hery tak pernah berkeluh kesah. Satu yang memompa semangatnya, dia tahu warga pedalaman memang sangat membutuhkan kehadiran dirinya, sebagai guru. Bahkan, sekuat tenaga, warga pedalaman bergotong royong berbuat sesuatu agar guru yang bertugas nyaman dan betah. Begitupun yang dirasakan Hery.

"Meski honornya minim, namun perlakuan warga sangat baik dan sopan. Kami disediakan rumah, sesekali diberi hasil tangkapan ikan mereka," tambah Hery

menceritakan bagaimana perlakukan yang diberikan oleh warga setempat kepada guru.

Karena itu, meski secara ekonomi terhimpit, Hery terus mencoba bertahan. Termasuk ketika Ia dipaksa bekerja lebih keras, karena jumlah guru yang mengajar hanya empat orang, termasuk kepala sekolah. Dan, itu memaksa Hery untuk mengajar beberapa kelas sekaligus. Selain sebagai guru agama, Hery juga mengajar pendidikan jasmani, juga menjadi wali kelas.

Sebagasi guru honorer, acapkali Hery menjadi tumpuan dan menanggung beban tugas guru-guru lain. Itu terjadi saat para guru yang berstatus PNS tidak datang mengajar. Praktis beban mengajar menjadi tugas Hery sebagai guru honorer.

"Padahal di dusun itu ada guru PNS, tapi jarang masuk dan lebih sering menyuruh guru honorer. Mau tidak mau harus saya kerjakan semuanya, padahal masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri," tambah Hery.

Tahun 2000, Hery dimutasi, dan kembali Desa Muara Enggelam. Desa ini tidak memiliki daerah daratan, sehingga seluruh rumah penduduknya dibangun di atas rakit. Tidak ada akses darat. Namun, Hery lebih bersyukur kala itu, sebab kampung itu adalah desa asal istrinya, sehingga dia merasa lebih tenang.

Sedangkan sebagai guru, gaji dan beban kerjanya di tempat yang baru ini masih sama, seperti di tempat sebelumnya. Ada waktu tertentu yang membuatnya sangat sibuk, karena menggantikan guru-guru PNS yang mengambil libur kepanjangan. Apalagi kebanyakan guru PNS tersebut bukan asli dari Muara Enggelam, sehingga semua pekerjaan dilimpahkan ke Hery.

"Pernah suatu kali keadaan sangat mendesak. Saya minta izin agar diberkenankan hanya mengajar selama tiga hari, sisanya saya gunakan untuk usaha. Alhamdulillah waktu itu kepala sekolah mengizinkan. Karena dia juga paham kondisi keluarga saya," ungkapnya.

Yang memprihatinkan, secara ekonomi bukan hanya gajinya yang kecil, tetapi honor yang diterimanya, tersebut selalu datang terlambat. terkadang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan sempat menunggak sampai sembilan bulan.

Kebiasaan tersebut masih terjadi, bahkan ketika program rekrutan guru dari PTT berubah menjadi Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D). karena itu, meski honornya mengalami kenaikan hingga Rp. 480.480,- kondisi dapurnya tetap memprihantinkan.

Baru pada tahun 2007, kehidupan Hery mulai berubah. Saat itu, ia berkesempatan mengubah nasibnya dari guru honorer menjadi PNS. Setelah melalui lima kali tes, tepatnya pada 2009 dia dinyatakan menjadi PNS. Tentu dengan gaji dan masa depan yang lebih baik. ❑

MBO

Bagaimana Cara Memilih Gubernur Jakarta

Di tengah hangatnya suasana kampanye Pemilu 2024, tiba-tiba jagad politik Indonesia dikejutkan oleh munculnya Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUUDKJ). Pangkal masalah dari rancangan undang-undang itu bukanlah menghilangkan status Ibu Kota Jakarta, namun terletak pada sistem pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di dalam rancangan itu, gubernur dan wakil gubernur tidak lagi dipilih langsung, tapi ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat DPRD.

Munculnya RUUDKI yang isinya mengatur 'sistem tunjuk' dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu membuat politisi, cendekiawan, dan masyarakat khawatir Pilkada akan dihapus di Jakarta, dan akibatnya hak politik rakyat teramputasi. Dalam awal perjalanan, RUUDKJ ini didukung oleh mayoritas fraksi, namun dalam perkembangan selanjutnya tingggal dua fraksi yang mendukung. Berikut pendapat wakil rakyat mengenai masalah itu:

Sylviana Murni **Anggota MPR dari Kelompok DPD Jakarta**

Perlu Kekhusuan Tapi Jangan Ciderai Demokrasi

PADA prinsipnya RUUDKJ tidak ada persoalan sepanjang tidak menabrak norma-norma etis maupun yuridis, karena menentukan status Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota merupakan sebuah keniscayaan. Bagaimana mungkin Jakarta yang menjadi mercusuar Indonesia ini tidak memiliki jati diri. Maka dari itu perlu diatur kekhususan bagi Jakarta.

Merujuk pada beberapa usulan RUUDKJ terkait Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan ketentuan ditunjuk Presiden itu, saya kira mencederai nilai-nilai demokrasi yang sudah kita semua bangun selama ini. Terlepas dari itu, melalui usulan DPRD atau bukan namun penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden sama saja menghapus hak politik warga Jakarta. Hak memilih atau hak dipilih.

Jakarta dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) paling besar di antara provinsi yang ada di Indoesia, kemudian menjadi tempat berdirinya kantor pusat perusahaan besar dalam dan luar negeri, lalu menjadi salah satu kota tujuan warga negara asing, maka Jakarta sejak dulu sampai sekarang merupakan kota ekonomi paling besar secara nasional, serta sedang berproses menjadi kota bisnis berskala global.

Apakah Pilkada masih tepat dilaksanakan di Jakarta? Sangat tepat dan memang seharusnya Pilkada dilaksanakan secara langsung, dari masyarakat untuk masyarakat. Dengan Pilkada langsung, maka hak-hak konstitusi masyarakat pun akan terwakili. ❑

AWG

Jazuli Juwaini Anggota MPR Fraksi PKS

Merampas Hak Politik Rakyat

PENUNJUKAN Gubernur Jakarta dalam RUUDKJ telah merampas hak politik warga Jakarta untuk memilih pemimpinannya. Usulan tersebut jelas merupakan kemunduran demokrasi. Fraksi PKS dengan tegas menolak upaya yang mengebiri hak politik warga Jakarta yang selama ini dapat memilih pemimpinannya secara langsung. Tidak ada alasan untuk menarik hak politik warga, dan kami menganggap hal ini jelas-jelas *set-back* demokrasi di Jakarta.

Atas dasar itulah, PKS menolak inisiatif RUUDKJ. Selain karena dicabutnya mandat pemilihan langsung tersebut, penolakan ini didasarkan pada proses dan prosedur penyusunan RUU yang sangat tergesa-gesa.

RUU ini akan mengatur Jakarta dengan kompleksitas yang luar biasa sehingga mutlak

membutuhkan partisipasi yang luas dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. PKS mengingatkan preseden buruk RUU Cipta Kerja dan RUU IKN yang juga tegas kami tolak dan ternyata isinya amburadul, bahkan RUU Cipta Kerja dibatalkan MK sementara RUU IKN harus direvisi kembali.

Kami tetap pada pendapatnya bahwa Jakarta masih layak menjadi Ibukota Negara. Hal ini konsisten dengan pandangan PKS yang sejak awal menolak RUU Ibu Kota Negara (IKN). RUUDKJ memang konsekuensi dari UU IKN, tetapi seyogiyanya proses dan prosedurnya dilakukan secara cermat dan komprehensif, bukan tergesa-gesa dan minim pelibatan publik. Apalagi isinya jelas merampas hak politik warga Jakarta untuk memilih pemimpinannya. ❑

AWG

H. Dailami Firdaus Anggota MPR Dari Kelompok DPD Jakarta

DPR dan Pemerintah Harus Tetap Masukan Poin Pilkada

RUUDKJ sangat penting untuk Jakarta pasca terbitnya UU No. 3 Tahun 2022, akan tetapi RUUDKJ masih terkesan jauh dari nuansa demokrasi. Saya menilai hal ini jauh dari semangat DPD RI dalam memajukan daerah.

Jika kita perhatikan secara seksama pada Pasal 10 Bab IV ayat 2, isinya: jabatan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan oleh Presiden RI. Menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat tidak tepat. Karena dengan demikian kekuasaan penuh akan kembali tersentral.

Selain itu, RUUDKJ membuat cacat demokrasi dan tidak sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Apakah Jakarta yang mempunyai potensi ekonomi yang besar sehingga menjadi rebutan banyak kekuasaan? Jakarta memiliki potensi yang cukup baik. Dengan didukung oleh berbagai sektor yang menjadikan Jakarta sebagai primadona untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pilkada masih tepat dilaksanakan di Jakarta. Dalam menjalankan hak-hak berdemokrasi dan juga sebagai implementasi atas aspirasi masyarakat. Dirasa perlu jika RUUDKJ lebih mementingkan hak-hak masyarakat Jakarta dari pada untuk kepentingan pihak lain.

Sebagai Anggota DPD RI dan putera daerah, saya meminta agar teman-teman di DPR dan Pemerintah tetap memasukkan poin pemilihan langsung kepala daerah dan juga mengakomodir, serta mengakui keberadaan Lembaga Adat Masyarakat Betawi secara utuh dan penuh sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Terakhir adalah soal dana alokasi khusus untuk memperkuat sektor kelautan yang Jakarta miliki seperti di Kepulauan Seribu. ❑

AWG

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Sumatera Barat

Fadel Muhammad
Agar Bangsa Indonesia Kokoh dan Kuat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan yang datang dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar), pada Selasa 28 November 2023, memenuhi Aula Gedung Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang.

Kehadiran generasi muda di gedung berbentuk Rumah Gadang itu dalam rangka mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau lebih popular disebut Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi itu diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Forum Ketua Pemuda (FKP) Sumbar.

Hadir dalam acara sosialisasi itu, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, Anggota MPR/DPD H. Emma Yohana, Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Kepala BPSDM Dr. Ir. Desniarti, M.M., dan Ketua Umum FKP Sumbar, H. Erick Hariyona.

Dalam pemaparan, Fadel Muhammad mengatakan, salah satu tugas MPR adalah melakukan Sosialisasi Empat Pilar. “Sosialisasi dilakukan agar bangsa Indonesia tetap kokoh,” ujarnya. Fadel lalu membandingkan dengan pembangunan sebuah gedung. “Bila kita ingin membangun gedung yang kokoh maka perlu pondasi yang kuat. Demikian juga bila ingin membangun bangsa dan negara diperlukan pondasi yang kuat,” tuturnya.

Alumni ITB itu lebih lanjut mengatakan, kita ingin bangsa ini terus tumbuh. Untuk itu, Empat Pilar harus dijaga. Dan, salah satu pilarnya adalah Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara. Ia yakin peserta sosialisasi sudah hafal Pancasila. Namun, dia mengakui, sampai saat ini implementasi dari Pancasila, apalagi sila kelima, belum sesuai dengan apa yang kita kehendaki.

Meski implementasi nilai-nilai Pancasila belum sesuai harapan, namun mantan Gubernur Gorontalo itu mengajak para peserta untuk tetap memegang dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi dan pemersatu bangsa.

Pilar kedua adalah UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi ini disebut oleh Fadel Muhammad dibangun oleh para founding fathers. “Di antara founding fathers adalah orang Minang, yakni Mohammad Hatta,” tuturnya.

Selanjutnya, Fadel menyatakan, setelah Gerakan Reformasi 98, ada amandemen UUD. Salah satu yang diamandemen adalah masa jabatan Presiden. Kalau sebelum amandemen tak ada pembatasan masa jabatan akibatnya seorang presiden bisa menduduki jabatannya sampai 30 tahun. Namun, setelah amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden dibatasi hingga periode saja.

“Belajar dari negara yang sudah maju demokrasinya, seperti Amerika Serikat, yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode, maka dalam UUD hasil amandemen masa (periode) jabatan presiden di Indonesia dibatasi maksimum dua kali,” ungkap Fadel Muhammad.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, boleh-boleh saja UUD di amandemen kembali, namun harus berdasarkan kesepakatan. UUD merupakan patokan aturan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hukum. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD. "Bila bertentangan dengan UUD, undang-undang itu bisa dibatalkan oleh MK," paparnya. "Banyak undang-undang dibatalkan oleh MK," tambahnya.

Setelah UUD, Guru Besar Universitas Brawijaya itu menyebut NKRI sebagai pilar selanjutnya. Dipaparkan, bentuk negara Indonesia berbeda dengan Amerika, Australia, dan Malaysia. Di negara-negara itu bukan negara kesatuan, namun negara bagian.

"Kita ingin mempertahankan negara kesatuan," tuturnya. Bentuk seperti ini, menurutnya, perlu dipertahankan sebab jangan sampai terlepasnya Timor Timur kembali terulang. "NKRI inilah yang harus kita jaga agar bangsa ini tetap utuh," ucapnya.

Setelah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai pilar selanjutnya. "Kita adalah bangsa yang terdiri dari beragam suku," ungkapnya. "Saya dari Gorontalo, yang hadir di sini Suku Minang, ada pula Suku Jawa, tetapi kita Bhinneka Tunggal Ika," tambahnya.

Meskipun berbeda-beda suku tetapi menyatu. Hal demikian, menurutnya, harus dijaga. Dia menerangkan, di Gorontalo banyak orang Jawa yang dulunya merupakan transmigran, namun di sana mereka tetap sebagai warga bangsa dan bisa mengembangkan usahanya.

Untuk itu, Fadel mengajak generasi muda Sumbar untuk terus menjaga Empat Pilar. "Kita ingin agar Empat Pilar tetap menjadi pengikat supaya bangsa Indonesia bisa tumbuh dan berkembang," ujarnya. ❑

Implementasi Empat Pilar MPR

Lestari Moerdijat: Wujudkan Masa Depan yang Lebih Baik

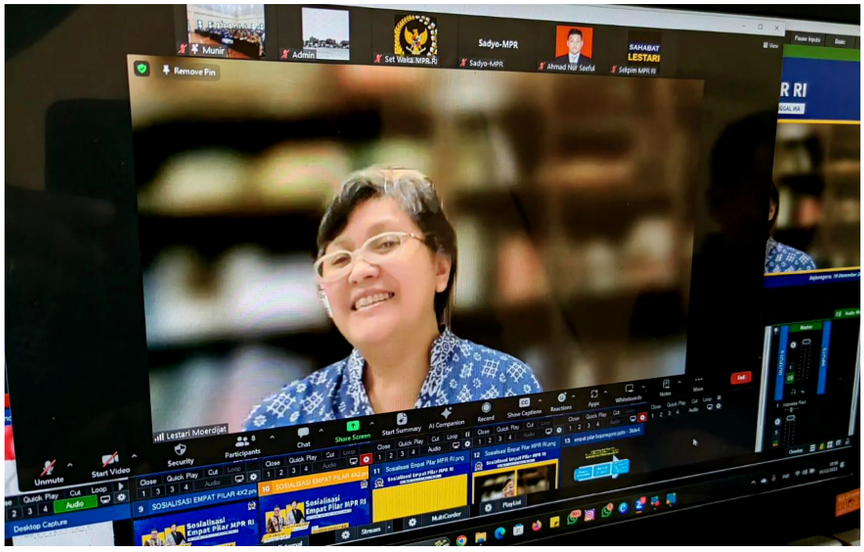

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SETIAP anak bangsa harus mampu membangkitkan semangat dan harapan mewujudkan masa depan yang lebih baik dan sejahtera melalui implementasi nilai-nilai kebangsaan dan budaya dalam keseharian.

"Setiap individu harus mampu menyikapi perkembangan dunia dengan baik sambil memupuk dan melaksanakan nilai-nilai kebangsaan warisan pendahulu bangsa, seperti gotong-royong, musyawarah, tradisi dan kearifan lokal, secara harmoni," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat secara daring dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan sejumlah tokoh dan masyarakat di Bojonegoro, Jawa Timur, Ahad (10/12).

Menurut Lestari, setiap kita harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang dihadapi dan penerapan nilai-nilai dalam Empat Pilar MPR, seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan bagian untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sosialisasi Empat Pilar MPR, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan bagian program dari MPR RI untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat agar memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam keseharian. Apalagi, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI, tantangan yang kita hadapi saat ini dan masa datang semakin kompleks.

Catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan terdapat lima isu global penting yang mesti diperhatikan menjelang akhir 2023. Isu tersebut, ujar dia, yakni perdamaian dunia akibat konflik dan krisis global, gerak bersama untuk mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan, perubahan iklim, tata kelola dari dampak berkelanjutan akibat pandemi, dan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana maupun konflik.

Sejumlah isu global itu, tegas Rerie, diyakini akan berdampak juga terhadap Indonesia yang di sisi lain saat ini sedang menjalani tahapan pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa.

Dalam proses menuju pesta demokrasi itu, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejumlah pakar politik menilai mulai terlihat ada disharmoni dalam penerapan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki. "Kita harus pastikan disharmoni itu tidak terjadi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR tetap diimplementasikan secara utuh," tegas Rerie.

Di tengah berbagai perbedaan, seperti perbedaan pandangan, suku, ras dan agama, menurut Rerie, kita harus memahami bahwa keberagamam yang kita miliki saat ini adalah anugerah yang harus bersama-sama dimaknai sebagai perekat dalam setiap kehidupan sosial kita sehari-hari.

Dengan menerapkan nilai-nilai kebangsaan secara utuh dalam keseharian, Rerie berharap, proses pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan para pendiri negeri. ❑

Sosialisasi Empat Pilar di Gorontalo

Fadel Muhammad: Nilai Empat Pilar Perkuat Eksistensi Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERTEMPAT di Rumah Aspirasi Fadel Muhammad di kawasan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Sabtu malam (9/12/2023), Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI diselenggarakan MPR bekerjsama dengan SDGS Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Provinsi Gorontalo.

Turut hadir dalam acara itu, Ketua Umum SDGS Lira Ibu Hana Hasanah Shahab bersama anggota Lira , serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar sebagai peserta.

Dalam paparannya, Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat eksistensi bangsa yang sangat beragam yang bernama negara Indonesia.

"Bayangkan, keberagaman Indonesia begitu besar dari mulai suku, agama, ras, bahasa. Namun, bisa menyatu dengan sangat kuat, karena implementasi nilai-nilai Empat Pilar MPR yang juga sangat kuat," ujar Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini.

Fadel Muhammad mengatakan, pertemuan dan silaturahim di acara ini juga merupakan bentuk dari pemahaman sekaligus realisasi dari Empat Pilar. "Saya tidak bisa membayangkan, sangat 'ngeri' sekali jika di Indonesia tidak ada Empat Pilar MPR. Banyak negara yang memiliki keberagaman lebih sedikit dari Indonesia, bisa terjadi konflik dan perang yang sangat menyengsarakan rakyat. Nilai Empat Pilar sebagai perekat bangsa memang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum SDGS Lira, Ibu Hana Hasanah Shahab, sangat menyetujui apa yang disampaikan Fadel Muhammad. "Nilai-nilai dalam Empat Pilar MPR memang terbukti selama ini mampu menjaga eksistensi bangsa kita. Untuk itu, saya mengajak masyarakat terus berupaya memahami dan menjalankan Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga masing-masing," ujarnya. ❑

Dialog Kebangsaan UIKA Bogor

HNW: Generasi Muda Harus Menjadi Kekuatan Besar untuk Memajukan Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA), Kota Bogor, Jawa Barat, pada hari Kamis (28/12/2023), memenuhi Auditorium Fakultas Hukum Prof. Abdullah Siddiq, SH. Keberadaan mereka di aula kampus yang beralamat di Jl. KH. Sholeh Iskandar KM 2 Kota Bogor itu untuk mengikuti 'Dialog Kebangsaan' dalam rangka 'Sosialisasi Empat Pilar MPR.'

Dialog kebangsaan bertema: 'Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Karakter Generasi Muda Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa' itu dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA.

Dalam acara yang digelar mulai pukul 09.00 WIB itu juga dihadiri anggota DPR dari Dapil Kota Bogor-Cianjur, Ecky Awal Mucharam.; Rektor UIKA Prof. Dr. H. Emujahidin M.Si.; Staf Khusus Pimpinan MPR Tb. Soenmandjaja; dan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan BEM UIKA.

Kepada wartawan, Hidayat Nur Wahid yang biasa disapa HNW itu mengatakan, dialog kebangsaan digelar untuk mengingatkan kembali bahwa eksistensi Indonesia dengan kemerdekaan dan reformasinya ada keterlibatan mahasiswa dan generasi muda.

"Kita segarkan kembali ingatan kolektif mereka bahwa Indonesia merdeka bukan hanya karena peran orang tua, namun di sana juga ada peran generasi muda," ujarnya. Dahulu, lanjut politisi PKS ini, generasi muda secara aktif melibatkan diri, memikirkan dan memperjuangkan, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Keterlibatan generasi muda, menurut HNW, dimulai dari tahun 1920 an. Seperti halnya Sumpah Pemuda di mana dari aktivitas tersebut melahirkan sosok-sosok muda yang memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sejarah perjalanan bangsa dan keterlibatan kaum muda itu, menurut Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, itu harus dipahami oleh generasi muda dari kalangan milenial, gen Z, dan lainnya agar mereka mampu terus berkontribusi memajukan, menyelamatkan, mengisi kemerdekaan, dan berkontribusi mewujudkan cita-cita Reformasi.

Saat ini, menurut HNW, tantangan generasi muda adalah menghadapi 100 Tahun Indonesia Merdeka yang jatuh pada tahun 2045. Di masa itu Indonesia akan menikmati bonus demografi. Agar bonus demografi benar-benar bisa membawa kemaslahatan Bangsa dan Negara maka perlu dipersiapkan dengan wawasan Empat Pilar MPR, dan praktik bermegara yang baik dan benar. "Jangan sampai bonus demografi diisi oleh generasi muda yang tidak mengerti tentang sejarah Indonesia dengan Empat Pilar MPR-nya," tegasnya.

Menurut pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu generasi muda yang mengisi bonus demografi juga harus paham Empat Pilar MPR. Hal ini perlu ditekankan agar generasi muda yang mengisi bonus demografi tidak salah arah. "Itu bisa dilakukan dengan memahami Empat Pilar MPR dan mengamalkannya dalam kehidupan secara

konstruktif dan dinamis," katanya.

Untuk itulah kegiatan yang digelar di UIKA ini perlu terus disosialisasikan kepada generasi muda agar mereka menjadi kekuatan besar untuk memajukan bangsa. Bila generasi muda saat ini mampu membuat bonus demografi sesuai cita-cita bangsa dan tuntutan reformasi maka mereka mampu mengimplementasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia, termasuk cita-cita reformasi.

Lebih lanjut, HNW menyatakan, cita-cita reformasi juga sangat luhur. Di sana ada semangat untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakan hukum dan demokrasi, memberi ruang kebebasan berekspresi, dan membatasi masa periode jabatan presiden.

Diakui, cita-cita reformasi itu sudah banyak dilupakan oleh generasi muda, padahal mereka adalah produk dari reformasi. "Untuk itu, penting sekali menyadarkan kembali cita-cita reformasi," tegasnya.

Generasi muda sekarang hidup dalam masa serba mudah dalam berkomunikasi. Akibat yang demikian membuat mereka memiliki problem kebangsaan, seperti melupakan sejarah. Alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu menekankan, generasi muda tidak boleh melupakan masa lalu di mana di saat itu ada peran generasi muda.

Diingatkan agar mereka memahami jati diri dan melanjutkan peran sejarah generasi muda pada masa lalu. "Tokoh-tokoh muda masa lalu menjadi inspirasi generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini harus bisa menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya sehingga bonus demografi benar-benar berarti positif untuk menyambut Indonesia Emas 2045,"pungkasnya. ❑

Safari Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Bamsoet Tekankan Pentingnya Keberlanjutan Bantuan Sosial

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Legislator DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen, Bambang Soesatyo, mengajak agar siapapun yang terpilih menjadi Presiden - Wakil Presiden RI periode 2024-2029 tetap melanjutkan sekaligus meningkatkan berbagai program bantuan sosial yang telah dimulai pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Baik itu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH), dan berbagai program bantuan sosial lainnya.

"Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo berbagai program bantuan sosial telah diberikan kepada sekitar 20,65 juta keluarga penerima manfaat, 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, 946.863 anak yatim piatu, 334.011 warga lansia tunggal, 98.934 penyandang disabilitas, serta penerima manfaat dari berbagai kalangan lainnya. Total anggarannya mencapai Rp 470 triliun untuk sekitar tujuh program bantuan sosial," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di empat kecamatan di Kabupaten Kebumen, Senin (18/12/23).

Turut hadir, antara lain Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto, serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Kebumen.

Dalam safari politik hari kesebelas di Dapil 7 Jawa Tengah sejak 8 Desember 2023, Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini telah melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap masyarakat di 60 desa di empat kecamatan di Kabupaten Kebumen, antara lain Kecamatan Karanggayam, Karanganyar, Sempor, dan Gombong.

Total sudah 299 desa/kelurahan di 18 kecamatan di Kabupaten Kebumen yang telah menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, antara lain Kecamatan Sruweng, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Prembun, Padureso, Mirit, Bonorowo, Ambal, Sadang, Karangsambung, Alian, Poncowarno, Kutowinangun, Karanggayam, Karanganyar, Sempor, dan Gombong.

Sebelumnya, Bamsoet yang juga pendiri Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA), PT. Banjarnegara Agro Mandiri Sejahtera (BAMS), dan Mexolie Hotel Kebumen, ini juga telah melakukan temu tokoh masyarakat dari 244 desa dan 15 kelurahan pada 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Serta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap masyarakat dari 266 desa dan 12 kelurahan pada 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, keberadaan berbagai program bantuan sosial sangat penting untuk dilanjutkan dan ditingkatkan guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Terlebih, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 masih cukup tinggi mencapai 25,90 juta jiwa. Angka tersebut sudah menurun 0,46 juta jiwa dari September 2022 dan menurun 0,26 juta jiwa dari Maret 2022.

"Bantuan sosial juga bisa dijadikan wujud konkret langkah pemerintah dalam mengamalkan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sekaligus menjalankan amanah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain memberikan apresiasi karena telah memberikan banyak manfaat, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam meningkatkan kualitas bantuan sosial. Khususnya, dalam hal penambahan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Maupun dalam hal sistem penyaluran, dari mulai ketepatan waktu, jumlah, serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

"Peran masyarakat sangat penting agar bantuan sosial yang disalurkan pemerintah bisa tepat sasaran dan tepat guna. Karenanya, dalam pemutahiran data penerima bantuan sosial, pemerintah harus melibatkan kepala desa/lurah sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan. Sehingga jika di lapangan ditemukan ada yang tidak sesuai, masyarakat bisa langsung melaporkannya kepada kepala desa/lurah ataupun Dinas Sosial Sosial setempat," pungkas Bamsoet. ❏

Model Kepemimpinan Ratu Kalinyamat

Memperkuat Akar Sejarah Dorong Pemahaman Terhadap Nilai Kepahlawanan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PENGAKUAN terhadap nilai-nilai kepahlawanan mesti diikuti dengan model pembelajaran yang memperkuat akar sejarah sehingga dapat dijadikan dasar setiap warga negara untuk menentukan arah kehidupan bangsa di masa depan.

"Salah satu upaya pembelajaran sejarah adalah dengan menanamkan model kepemimpinan Ratu Kalinyamat untuk ditumbuhkan melalui proses belajar mengajar di setiap institusi pendidikan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di depan para guru sejarah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (12/12).

Menurut Lestari, guru sejarah merupakan aktor yang mampu membumikan pembelajaran sejarah melalui pemahaman peristiwa masa lalu untuk menghadirkan keutamaan nilai pada masa kini, sehingga generasi penerus mampu memaknai masa depan mereka.

Dalam konteks pembelajaran sejarah Pahlawan Nasional Ratu Kalinyamat, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan para guru tidak hanya memosisikan diri sebagai pencerita berdasarkan narasi parsial, tetapi menjadi individu yang merefleksikan pentingnya pendekatan sejarah secara menyeluruh dalam menetapkan prioritas nilai yang berdampak pada arah kehidupan bangsa.

Kekaguman akan kepandaian, pengetahuan dan kesahajaan Sang Ratu Jepara yang disampaikan para sejarawan, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dapat

menjadi inspirasi para guru untuk menghubungkan heroisme, cinta tanah air, dan semangat anti-kolonialisme, dengan nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Keterhubungan antara nilai kepemimpinan Ratu Kalinyamat dan konsensus kebangsaan, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dapat diungkapkan lewat pemaparan sepak terjang Ratu Kalinyamat yang menempatkan persatuan, perdamaian, kesetiakawanan dan keadilan yang bermuara pada gotong-royong yang senafas dengan nilai Pancasila, sebagai norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Model pembelajaran sejarah secara holistik, ujar Rerie, dapat menciptakan perubahan paradigma berpikir, karena peserta didik mampu menyadari bahwa para leluhur mereka telah mewariskan kecerdasan spiritual dan komunal untuk bertumbuh sebagai pribadi, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan nasional.

Menurut Rerie, kepemimpinan Ratu Jepara itu dapat disimpulkan sebagai sebuah tonggak sejarah kehidupan bangsa. Karena, tegasnya, kepahlawanan Ratu Kalinyamat mampu menginspirasi seluruh anak bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui semangat anti-kolonialisme yang ditanamkan oleh Sang Ratu. ❑

Temu Tokoh Nasional MPR RI

Masyarakat Desa Garda Terdepan Pembangunan Nasional

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MASYARAKAT desa merupakan garda terdepan yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Pengembangan sejumlah potensi desa merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional.

"Kapasitas masyarakat desa harus diperkuat agar mampu secara bersama merealisasikan potensi yang ada di desa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," begitu pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang disampaikan pada acara Temu Tokoh Nasional MPR di Desa Bango, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (18/12).

Di hadapan para tokoh dan masyarakat desa, Lestari yang biasa disapa Rerie itu, mengingatkan bahwa dalam proses pembangunan pentingnya mengedepankan kearifan lokal peninggalan para pendahulu kita, yang sudah terbukti nilai-nilai yang ditanamkannya mampu melestarikan sumber daya alam yang kita miliki.

Diakui Rerie, nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendahulu bangsa sangat mewarnai empat konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI, dan

Bhineka Tunggal Ika) yang diwarisi para pendiri negeri.

Para wali dalam proses menyebarkan agama Islam di Jawa misalnya, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, tetap berupaya memakai nilai-nilai yang ada sebelumnya untuk menjaga persatuan dan kebhinnekaan.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika harus mampu dipahami oleh generasi penerus sehingga bisa dijadikan fondasi penting dalam membangun desa secara bersama.

Apalagi, ungkap Rerie, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa merupakan satu satuan yang melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Jadi, tambah dia, Undang-Undang tentang Desa itu tetap menjadikan konsensus kebangsaan kita sebagai dasar dalam proses pengembangan desa.

Masyarakat desa, tegas Rerie, harus bisa menjadi penggerak dan mengambil peran dalam dinamika pembangunan, sehingga desa bisa secara mandiri mengelola semua potensi yang ada.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rerie sangat berharap semua komponen masyarakat desa dengan latar belakang dan warna yang berbeda dapat bersama-sama membangun desa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan mengantarkan generasi mendatang menuju Indonesia Emas 2045.

Di malam harinya, pesan yang sama juga disampaikan Rerie kepada masyarakat yang tergabung dalam paguyuban awak bus Demak dan paguyuban gerobak sayur Demak.

Kepada masyarakat di dua paguyuban itu, Rerie mengingatkan pentingnya untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR agar kita tidak lupa dari mana kita berasal.

Bila setiap warga negara mampu melaksanakan nilai-nilai dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, Rerie menilai, upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur adalah sebuah keniscayaan. ❑

Temu Tokoh Nasional Unisan Gorut

Fadel Muhammad: Kampus Ini Bukti Kepedulian Saya Mengembangkan SDM Daerah

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama tumbuh berkembang dan majunya sebuah daerah bahkan negara sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dan, sumber lahirnya SDM unggul melalui lembaga pendidikan.

Begitu pentingnya pembangunan SDM tersebut maka Fadel Muhammad pada saat menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo selama dua periode mencantumkan pembangunan SDM di posisi pertama dari

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tiga program utamanya sebagai Gubernur. Dua program lainnya adalah: Pertanian yang difokuskan pada komoditas jagung. Lalu, Perikanan dan Kelautan yakni ikan tangkap, ikan budidaya, dan rumput laut.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini kepada para dekan, dosen, mahasiswa Universitas Ichsan (Unisan) Gorontalo Utara (Gorut) yang hadir dalam acara 'Temu Tokoh Nasional/ Kepemudaan/ Keagamaan/ Civitas Academica ' yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Unisan Gorut, di aula pertemuan Unisan Gorut, Kecamatan Kwandang , Senin (11/12/2023).

Turut hadir dalam acara itu Ibu Hana Hasanah, Staf Khusus Fadel Muhammad Hasan Shahab, Rektor Unisan Gorut Dr. Fatmah M. Ngabito, dan Wakil Rektor III Bachtiar Senung, M.Kom.

Bidang SDM, lanjut Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) bidang Kewirausahaan Sektor Publik ini, mendapat perhatian yang besar, sebab akan sangat sulit bagi dirinya mengembangkan provinsi yang baru saja dimekarkan dari induknya Provinsi Sulawesi Utara tanpa SDM yang mumpuni.

"Saya harus memutar otak bagaimana melahirkan SDM unggul, karena UU mengatakan kalau daerah pemekaran tidak maju akan dikembalikan lagi ke induknya.

Saya berpikir untuk segera membangun lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang baik, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat," katanya.

Diceritakan Fadel Muhammad, gerakan pertama mengembangkan kampus IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo dengan rektor pertamanya Nelson Pomalingo yang saat ini menjabat Bupati Gorontalo. Lalu Fadel Muhammad melirik pengembangan perguruan tinggi swasta.

"Ichsan waktu itu masih kecil belom tersentuh pengembangan. Saya bantu mendukung, membina. Perjalanan kampus ini menjadi Universitas Ichsan seperti ini perjalanannya sangat panjang. Intinya, saya kawal terus sampai berdiri bagus dan hadir di setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah, kini sudah ada di Pohuwato, Boalemo, Gorut," papar Anggota DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo ini.

Ditegaskan Fadel Muhammad, perjuangan mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan tinggi itu sangat sulit dan tidaklah mudah. Untuk itu, Fadel berharap, agar para mahasiswa dan mahasiswi jangan menyia-nyiakan kesempatan menuntut ilmu di Unisan Gorut. Harus belajar dengan rajin dan giat.

"Saya harap, selama proses kuliah, kalian harus mulai mengembangkan pemikiran yang namanya *Entrepreneurial Mind*. Berpikir secara entrepreneur. Jadi, kalian akan siap ketika lulus kuliah mau kemana. Tidak monoton, hanya ada satu dalam pikiran setelah lulus kuliah, kemana melamar kerja," urainya.

Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa potensi perekonomian di seluruh wilayah Gorontalo sangat baik, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata juga mineral dan tambang. Hal itulah yang menjadi tolak ukur dan parameter Fadel Muhammad menginisiasi pengembangan Gorontalo menjadi sebuah provinsi tersendiri.

"Tidak mungkin ujug-ujug saya minta pemekaran kalau saya tidak melihat dan yakin akan potensi Gorontalo di masa depan," tambahnya.

Fadel Muhammad mendorong mahasiswa-mahasiswi untuk terus mengembangkan entrepreneurial mind-nya, hingga pada akhirnya bisa meneruskan pengembangan Provinsi Gorontalo lebih baik dari yang dilakukannya. ❑

Dialog di Ponpes Ar Rasyidi, Desa Ciranjang

Syarief Hasan Beri Tips Raih Sukses Kepada Para Santri

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., mengungkapkan bahwa santri dan santriwati sebagai bagian dari generasi muda bangsa, yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa harus memiliki daya juang untuk menggapai kesuksesan.

Namun, kata Syarief Hasan—sapaan Sjarifuddin Hasan — untuk sukses tidak seperti membalikkan telapak tangan. Sukses hanya bisa diraih dengan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan, serius dalam menuntut ilmu, dan bertanggung jawab terhadap ilmu yang dimiliki dan diimplementasikannya, tekun, kerja keras, patuh pada orang tua dan guru. "Setelah itu, berdoa kepada Allah SWT.," katanya saat berdialog dengan para santri, santriwati, para ustaz/ ustazah serta Pimpinan Ponpes Ar Rasyidi, Desa Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (22/12/2023).

Berhasil atau tidaknya, lanjut Syarief Hasan, perjalanan waktu yang akan berbicara. Biasanya, usaha tidak akan membohongi hasil. Jika kita sudah menjalani itu semua, hasil yang baik akan kita peroleh," ujarnya, saat berdialog dengan santri, santriwati, para ustaz dan ustazah, serta Pimpinan Ponpes Ar Rasyidi, Desa Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa dirinya menjalankan hal itu dan sudah merasakan hasilnya. "Saya berangkat dari keluarga yang susah juga. Berasal dari sebuah desa di pelosok. Namun, saya tidak menyerah. Saya berusaha keras menggapai impian saya," kenangnya.

"Dengan izin Allah SWT., saya bisa belajar di luar negeri, di Jepang. Lalu, menjadi seorang pengusaha, kemudian bergabung menjadi seorang politisi Partai Demokrat. Menjadi anggota Parlemen, dipercaya menjadi seorang Menteri Kabinet, dan sekarang menjadi Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, MPR RI," tambahnya.

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat III, meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, ini memberikan semangat kepada para santri. "Kalian pasti bisa. Jangan minder karena kalian menempuh pendidikan di Ponpes. Ponpes adalah lembaga pendidikan yang berkualitas. Banyak tokoh nasional yang berasal dari Ponpes. Yang membedakan hanya malas atau tidaknya kalian belajar. Rajinlah belajar, jangan bosan dan jangan cepat menyerah," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, memberikan edukasi kepada para santri seputar Pemilu 2024. "Banyak diantara kalian yang sudah masuk usia menjadi pemilih pemula. Edukasi yang benar tentang Pemilu, cara memberikan suara, akan membuat kalian memahami bahwa Pemilu adalah pintu masuk untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Dan, suara kalian memastikan hal itu terjadi. Maka bijaklah dalam memberikan suara kalian. Pilihlah yang sayang dan peduli dengan rakyat kecil," jelasnya. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Ikatan Notaris Indonesia

Bamsoet Ajak Notaris Jaga Kepastian Hukum dan Berpolitik Secukupnya

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan, kepastian hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Kepastian hukum tersebut harus dimaknai sebagai sesuatu yang nyata, membumi, dan dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat.

"Segala aspek kehidupan saat ini banyak yang bersentuhan dengan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung secara hukum pidana maupun hukum perdata. Terkait dengan itu, profesi notaris merupakan profesi yang mulia, karena tugas dan jabatan yang diemban dan diabdikan untuk melayani kepentingan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum," ujar Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Rabu (10/1/24).

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Hadir, antara lain Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Irfan Ardiansyah, Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia Amriyati Amin, serta jajaran pengurus Ikatan Notaris Indonesia periode 2023-2026;

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengajak agar para notaris dengan pengaruh dan jabatannya untuk terus menjaga persatuan dan persatuan dengan berpolitik secukupnya, tidak membabi buta, dan saling menyakiti sesama anak bangsa. "Apalah artinya kemenangan, kalau kemudian membuat bangsa ini terpecah belah," tegas Bamsoet.

Dosen Pascasarjana Bidang Hukum Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menjelaskan, dalam sistem hukum di tanah air, peran penting dan strategis dari notaris adalah membantu mencegah terjadinya kesalahan, manipulasi, atau penipuan dalam transaksi hukum. Notaris juga memiliki perang penting untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dibuat dan disaksikan, telah memenuhi persyaratan hukum, serta memiliki kekuatan pembuktian yang kuat ketika dibutuhkan di pengadilan.

"Karenanya, setiap notaris harus senantiasa memegang teguh dan menjaga kemuliaan profesinya, menjunjung tinggi etika, serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam mewujudkan tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya, kontribusi organisasi Ikatan Notaris Indonesia sangat penting dalam menjaga agar notaris bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, pentingnya dimensi hukum dalam kehidupan masyarakat tercermin dari persepsi masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia. Merujuk pada data survei Indikator Politik yang dirilis pada akhir Desember 2023, masih ada sekitar 32,9% masyarakat yang menilai penegakan hukum di tanah air buruk. Hanya 35,4% menilai baik, sedangkan 29,3% menilai sedang.

"Sebelumnya, hasil survei Indopol yang dirilis bulan November 2023 mencatat sekitar 49,68% responden menyatakan, kondisi penyelenggaraan hukum di Indonesia baik. Sedangkan, sebanyak 41,77% responden mengatakan buruk," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, berdasarkan hasil survei tersebut menyiratkan bahwa kinerja di bidang penyelenggaraan hukum di tanah air belumlah optimal. Sebagian dari solusi untuk mereduksi persoalan tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan peran penting notaris. Khususnya, melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

"Di sisi lain, dengan peran strategisnya itu, maka notaris adalah elemen masyarakat yang sangat potensial menjadi 'duta' untuk menyebarluaskan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan yang akhir-akhir ini semakin terkikis oleh derasnya arus globalisasi dan terpinggirkan oleh desakan dinamika zaman," pungkas Bamsoet. ❑

Monev Keterbukaan Informasi Publik

Sesjen MPR: Kami Terus Berinovasi Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik / Lembaga Negara yang cukup informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan kategori lembaga negara Cukup Informatif itu diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., dari Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha. Penyerahan penghargaan itu dilakukan pada acara Catatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, yang berlangsung di Jakarta, Rabu (20/12/2022).

Plt. Sesjen MPR Siti Fauziah, dalam kesempatan itu, mengucap syukur atas prestasi yang didapat. Menurut Siti Fauziah, penghargaan itu sangat berarti bagi badan public, termasuk MPR. Ini sebagai rapor dari keterbukaan publik yang telah disediakan selama ini. Bu Titi, sapaan Siti Fauziah, berharap, (monev) Keterbukaan Informasi Publik akan meningkatkan kinerja jajarannya dalam meningkatkan keterbukaan informasi ke publik. Baik terkait informasi, fasilitas, dan juga hal-hal lain yang bisa memberi manfaat lebih besar ke publik.

"Mudah-mudahan pencapaian ini bisa meningkatkan kinerja seluruh jajaran di MPR, apalagi keterbukaan informasi publik ini bukan semata tanggung jawab dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tetapi semua unsur yang ada di MPR," kata Siti Fauziah.

Menurut Bu Titi, masih banyak sisi yang bisa ditingkatkan dari pelayanan publik di MPR, termasuk masalah informasi itu sendiri. Karena, sebagai lembaga politik, MPR tidak sepenuhnya bisa menjawab atau menanggapi pertanyaan serta aspirasi dari masyarakat. Butuh campur tangan dari parpol, anggota atau pimpinan MPR untuk menanggapi pertanyaan dan aspirasi yang diterima.

"Selain tidak boleh ikut dalam politik praktis, ada keterbatasaan lain di MPR. Antara lain, sejumlah info yang tidak bisa disampaikan secara terang benderang, seperti yang bisa dilaksanakan di instansi lain. Inilah salah satu resiko yang harus diterima sebagai lembaga politik," ungkap Siti Fauziah.

Meski begitu, Siti Fauziah optimistis, di tahun-tahun akan datang, kategori penghargaan yang diterima akan lebih baik. Apalagi, beberapa rencana penyempurnaan sudah disiapkan. Seperti penyempurnaan website MPR agar bisa diakses oleh kelompok disabilitas. Juga persiapan pencetakan buku-buku yang menggunakan huruf braille bagi penyintas tuna netra.

"Kami sangat optimistis bisa meraih penghargaaan kategori menuju informatif, sesuai rencana yang sudah ada. Yaitu, penyempurnaan fasilitas pelayanan informasi publik yang sudah kami siapkan untuk tahun 2024," pungkasnya.

Selain penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 juga menampilkan diskusi seputar Monev Keterbukaan Informasi Publik. Dua narasumber tampil dalam diskusi tersebut, yaitu: Ahmad Alamsyah Saragih (Ketua KIP periode 2009-2013) dan Prof. Dr. Hariyono M. Pd., (Rektor Universitas Negeri Malang). ❑

MoU Setjen MPR dan IIQ Jakarta

Nota Kesepahaman di Bidang Perpustakaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIAT Jenderal MPR RI menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta. Naskah kerjasama dalam bidang Perpustakaan ini ditandatangani oleh Plt. Sesjen MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., dan Rektor IIQ, Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH., M.Hum., dalam suatu upacara di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Turut hadir dalam acara itu, antara lain: Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Dra. Hj. Chalimatus Sa'dijah, MA., yang merupakan istri dari Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q,. MA., ; Narasumber Pustawakan Madya Yusniar, SH.; Pustakawan Muda Titin Hartini, S.Sos.; serta B2G Partnership Manager PT. Woolu Aksaramaya, Ferdy Putra Pratama; dan Pustakawan Muda Satrya Yudha Hartanto, S.E., selaku Moderator.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut adalah: *Pertama*, dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

Kedua, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perpustakaan. *Ketiga*, pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perpustakaan. *Keempat*, pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan. *Kelima*, penyelenggaraan kegiatan seminar serta workshop perpustakaan. Dan, *keenam*, literasi informasi.

Dalam kesempatan itu, Siti Fauziah mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua LPKM, juga Rektor dan delegasi IIQ Jakarta. "Saya mengapresiasi adanya kerjasama antara MPR dan IIQ terkait pengembangan bidang perpustakaan. Semoga, nota kesepahaman ini akan berlanjut menjadi kerjasama strategis," ujarnya.

Ibu Titi -sapaan akrab Siti Fauziah- juga berharap, agar dalam perjalananya, kerjasama antara MPR dan IIQ ini mampu memberikan manfaat buat masyarakat luas dan bisa berkontribusi buat bangsa dan negara.

Sebagai Rumah Kebangsaan, rumah besar seluruh rakyat Indonesia, lanjut Ibu Titi, tentu MPR RI dengan senang hati dan tangan terbuka menerima apapun ajakan atau sinergitas untuk melakukan sesuatu yang baik dan berdampak luas untuk Indonesia. Termasuk melakukan kerjasama dengan IIQ seputar pengembangan perpustakaan.

"MPR terbuka buat siapapun, termasuk mahasiswa IIQ. Jika ingin datang dipersilahkan. Di MPR banyak sekali layanan informasi yang bisa diakses dan digunakan umum secara gratis," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor IIQ menyampaikan apresiasi dan penghargaan dengan terjalinnya kerjasama antara MPR RI dan IIQ Jakarta. "Harapan saya, dengan adanya kerjasama ini bisa dimanfaatkan civitas academica IIQ dan umum untuk mengakses informasi di perpustakaan MPR RI," ujarnya.

Pemanfaatan bersama koleksi, lanjut Rektor IIQ, sangat baik dan bermanfaat. Sebab, perpustakaan itu jantungnya akademik. Kualitas dari suatu institusi pendidikan bisa dilihat dari bagaimana peran perpustakaannya.

Di sesi selanjutnya, dilaksanakan secara

simbolis pertukaran plakat dan koleksi buku berkualitas antara MPR RI dan IIQ Jakarta. Antara lain, buku berjudul: 'Pemikiran Ibrahim Hosen' dan Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI.

Delegasi IIQ yang total keseluruhan sekitar 30 orang ini juga berkesempatan melakukan *Tour Building* ke Ruang Paripurna, Museum, dan Perpustakaan MPR RI, serta melakukan beberapa sesi foto di spot-spot yang menjadi ikon Parlemen dan *instragamable*, seperti di tangga Gedung Hijau atau Gedung Kura-Kura, dan di depan lobi Gedung Nusantara III. ❑

Sarasehan Kehumasan MPR di Padang

Indro Gutomo: Evaluasi Layanan Informasi di MPR RI Perlu Dilakukan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEPALA Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI Indro Gutomo, SH., MH., mengatakan, MPR merupakan Lembaga Negara yang memiliki visi sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Untuk melaksanakan visinya itu sudah sewajarnya bila MPR selalu berhubungan dengan semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Dalam menjalankan interaksi dengan masyarakat, MPR berkewajiban membuka diri, baik untuk menerima aspirasi maupun memberikan informasi. Keterbukaan yang selama ini dijalankan MPR dalam menerima aspirasi maupun menjawab pertanyaan publik, sesuai amanat Pasal 28 F dan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

"Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa MPR berkunjung ke kampus-kampus di seluruh Indonesia, termasuk UIN Imam Bonjol Padang. Pertama, karena ingin mendapatkan masukan, saran, dan kritik terkait pelayanan publik di MPR. Kedua, sebagai upaya membuka diskusi tentang layanan public, baik di MPR maupun perguruan tinggi," jelas Indro Gutomo.

Indro Gutomo menyampaikan hal itu saat menjadi salah satu narasumber pada Sarasehan Kehumasan MPR RI, dalam rangka Forum Konsultasi Publik, kerjasama MPR dengan UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Senin (18/12/2023). Acara yang berlangsung di Gedung J, Kampus III Sungai Bangek UIN Imam Bonjol Padang, Sumbar, itu membahas 'Peran MPR RI dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Komunikasi Publik.'

Selain Indro Gutomo, juga terdapat tiga pembicara yang lain, yakni: Yenita Revi, SE., Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga MPR; Dhina Kurnia Winanda, S. Ikom., Kepala Subbagian Pemberitaan dan Layanan informasi; dan Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si., Dosen UIN Imam Bonjol Padang.

Lebih lanjut, Indro menyampaikan, evaluasi pelayanan public, khususnya di bidang pelayanan delegasi masyarakat dan layanan informasi, perlu dilakukan melalui konsultasi publik. Publik di sini, antara lain mahasiswa, dan tercatat 80% masyarakat yang datang ke MPR adalah mahasiswa. "Untuk itulah kami datang pada hari ini untuk berkonsultasi dalam rangka evaluasi pelayanan publik di MPR RI," kata Indro.

Pendapat senada disampaikan dosen UIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si. Menurut Muhammad Taufik, secara kodratnya manusia memerlukan pelayanan. Baik pelayanan yang sifatnya fisik dan pribadi maupun pelayanan yang bersifat administrasi. Bisa oleh negara maupun organisasi layanan lainnya.

Selain UUD dan UU, menurut Muhammad Taufik, Indonesia juga sudah mengakui adanya hak asasi manusia, khususnya terkait pelayanan publik. Terbukti Indonesia sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional, menyusul kemudian adalah lahirnya UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

"Karena itu tidak alasan bagi pemerintah untuk mengelak dari kewajibannya menyediakan pelayanan publik, termasuk informasi publik, seperti yang sudah diamanatkan oleh konstitusi," pungkas Taufik. ❑

Sarasehan Kehumasan MPR di NTB

Indro Gutomo: MPR Membuka Diri Kembangkan Strategi Komunikasi Publik

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEPALA Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI, Indro Gutomo SH., MH., menegaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara akan senantiasa tunduk dan patuh pada konstitusi. Tak terkecuali, amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pasal tersebut mengamanatkan agar badan public, tak terkecuali MPR, wajib memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga harus diberikan haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

"Itulah salah satu dasar hukum pelaksanaan Sarasehan Kehumasan MPR, yang kali ini dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) NTB. Sebelum dengan Ummat, kami juga sudah bekerjasama dengan kampus lainnya di Indonesia. Melalui ajang ini kami berharap, bisa berkomunikasi, sekaligus menyampaikan informasi yang dibutuhkan civitas academika Ummat, serta mendapat masukan juga gagasan dari para mahasiswa untuk perbaikan strategi komunikasi MPR ke depan," ungkap Indro Gutomo.

Pernyataan itu disampaikan pada Sarasehan Kehumasan MPR RI yang berlangsung di Auditorium H. Anwar Ikraman Ummat, Senin (11/12/2023). Dan, sarasehan ini membahas tema: 'Peran MPR RI dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Komunikasi Publik.' Sarasehan dihadiri lebih dari 100 mahasiswa lintas fakultas.

Selain Indro Gutomo, sarasehan yang diikuti lebih dari 100 mahasiswa lintas fakultas ini, juga menghadirkan dua pembicara lain, yaitu: Yenita Revi, SE., Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si., dosen Fisipol Ummat. Ikut hadir dan membuka acara sarasehan Dr. Harry Irawan Johari, S. HUT., M.Si., Wakil Rektor Bidang Akademik Ummat.

Pada kesempatan itu, Indro juga menekankan bahwa MPR melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi senantiasa berusaha menjalin komunikasi dengan seluruh kelompok masyarakat. Mulai dari kampus, siswa sekolah, santri, guru, ormas, hingga kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan strategi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, antara lain, dilakukan melalui penerimaan delegasi, penyediaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penyuluhan perpustakaan, Desiminasi informasi, diskusi mingguan dengan wartawan parlemen, serta sarasehan.

"Kami berusaha menjangkau sebanyak-banyaknya warga masyarakat melalui berbagai strategi yang ada. Tujuannya, agar kami bisa menyampaikan kegiatan tentang MPR serta mendapatkan seluas-luasnya informasi, masukan, aspirasi, gagasan hingga kritik dari semua kelompok masyarakat, dalam rangka pengembangan strategi komunikasi public," pungkasnya.

Sebelumnya, saat membuka sarasehan, Dr. Harry Irawan Johari, S. HUT., M.Si., Wakil Rektor Bidang Akademik Ummat, berterimakasih kepada MPR atas kerjasama dalam melaksanakan Sarasehan Kehumasan ini. Menurut Harry Irawan, setiap lembaga membutuhkan komunikasi yang baik, secara internal maupun eksternal. Secara internal, komunikasi yang baik bisa memperkuat stabilitas. Sedangkan secara eksternal, komunikasi bisa memperluas jejaring.

"Bagi Ummat yang memiliki visi misi sebagai perguruan tinggi Islami, mandiri, dan berkemajuan di tingkat ASEAN pada 2028 sangat membutuhkan komunikasi yang baik, seperti yang dicapai NTB pasca pandemi Covid-19. Dulu NTB sangat terbelakang, namun sejak memiliki sirkuit bertaraf internasional dan berhasil dikomunikasikan secara maksimal, kini NTB mampu berkembang pesat, bahkan menjadi perhatian dunia internasional," ungkap Harry Irawan.

Sedangkan MPR sebagai lembaga negara juga membutuhkan mitra berkomunikasi, termasuk dengan Ummat. Selain untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat, MPR juga berkewajiban membuka diri untuk memberi dan menerima masukan, sesuai perintah konstitusi.

Diakhir acara, sarasehan itu menghasilkan masukan dari civitas akademika Ummat, yang perlu ditindaklanjuti. Yaitu, perlunya dibentuk Duta MPR dari kalangan mahasiswa untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai kelembagaan MPR RI. ❑

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Habiburokhman, SH., MH., Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Semoga Tidak Ada Lagi "Pasal Karet" dalam UU ITE

PRESIDEN Joko Widodo telah membubuhkan tanda tangan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Jilid II. Revisi UU ITE itu telah diteken Presiden pada Selasa, 1 Januari 2024. Salinan undang-undang tersebut pun sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. "Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 disahkan tanggal 02 Januari 2024, diundangkan tanggal 02 Januari 2024," seperti dikutip dari situs tersebut, pada Kamis, 4 Januari 2024.

UU ini merupakan hasil dari revisi UU ITE yang telah disahkan menjadi undang-undang. Revisi UU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE atau revisi UU ITE ini telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-10 penutupan masa sidang II DPR 2023-2024 pada Selasa, 4 Desember 2023. DPR secara resmi telah mengesahkan revisi kedua UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sembilan atau semua fraksi sebelumnya telah menyepakati perubahan kedua UU ITE untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Beberapa poin pokok dari revisi kedua UU ITE, antara lain perubahan norma meliputi alat bukti elektronik, sertifikasi elektronik, dan transaksi elektronik. Revisi UU ITE ini juga memperbaiki permasalahan yang membuat UU ITE multitafsir, atau dikenal dengan pasal karet. Misalnya, pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan, ayat (3) mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, dan ayat (4) mengenai pemerasan atau pengancaman yang merujuk pada KUHP. Ada pula pasal 28 ayat (1) mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Persoalan yang sering terkait dengan UU ITE adalah adanya pasal karet dalam undang-undang tersebut. Bagaimana pasal karet ini setelah dilakukan revisi kedua UU ITE ini? Berikut penuturan Dr. Habiburokhman, SH., MH., anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum. Petikannya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi kedua UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 4 Desember 2023. Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani revisi UU ITE itu menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024 dan berlaku pada 2 Januari 2024. Bagaimana pendapat dan pandangan Bapak dengan disahkan dan diundangkannya revisi kedua UU ITE ini?

Ada beberapa hal yang menurut saya penting terkait dengan revisi kedua UU ITE ini. Perubahan kedua UU ITE yang telah disahkan ini merupakan wujud kehadiran

negara untuk melindungi warganya dalam transaksi elektronik. Transaksi digital ini penting dan terus diperbaiki karena kita mengikuti perkembangan zaman yang cepat sekali. Hukum itu juga transformatif. Kita harus mengikuti gerak dinamika masyarakat. Negara bisa hadir lebih cepat membantu masyarakat yang menjadi korban tindak pidana transaksi elektronik. Banyak aturan atau regulasi baru dalam revisi UU ITE ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, banyak kalangan yang mengeluhkan adanya pasal karet dalam UU ITE ini. Karena itu, salah satu alasan revisi UU ITE adalah terkait dengan keberadaan pasal karet itu, terutama pasal 27 dan pasal 28 UU ITE. Pasal 27 terkait dengan pencemaran nama baik, dan pasal 28 mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Bagaimana dengan kedua pasal itu dalam perubahan kedua UU ITE?

Revisi kedua pasal dalam UU ITE, menurut saya, sangat positif. Pasal 27 sudah dua kali direvisi pada 2016, hukuman di atas lima tahun menjadi empat tahun, dan sekarang direduksi kembali pengurangan hukumannya menjadi dua tahun. Jadi, orang yang dibidik dengan pasal ini tidak bisa dikenakan penahanan sebelum vonis. Kedua, pasal 28 terkait dengan SARA diperbaiki. Klausul golongan dibuat lebih spesifik dan jelas.

Sebelum di DPR, saya adalah advokat yang banyak sekali menangani perkara-perkara di mana orang menyampaikan pendapat, tetapi dijerat dengan pasal 27 dan pasal 28 UU ITE sebelum direvisi. Ketika menjadi anggota DPR, saya mengusulkan agar kedua pasal itu diganti atau diperbaiki. Apa yang dilakukan teman-teman di Komisi I dan pemerintah dengan memperbaiki kedua pasal itu sangat baik, menarik, dan positif. Revisi UU ITE ini memperjelas norma pasal 28, yaitu menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Batasan suku jelas, agama pun jelas, dan ras juga jelas. Antargolongan ini tidak jelas dan menjadi pasal karet.

Dalam kasus Ahmad Dhani, dia mengejek orang, misalnya organisasi tertentu. Ahmad Dhani tidak terkena unsur suku, agama, dan ras. Tetapi dia terkena klausul antargolongan. Begitu juga banyak kasus yang menjerat aktivis dan jurnalis karena frasa antargolongan itu. Karena itu pasal 28 akhirnya menjadi pasal karet. Karena frasa golongan itu tidak jelas. Apa yang dimaksud engan golongan itu tidak jelas.

Jadi, sebelum UU ITE direvisi, tidak ada definisi antargolongan yang jelas. Setelah direvisi, definsi antargolongan telah jelas. Bahkan, menghina kelompok difabel bisa dipidana. Jadi, dalam hukum itu paling penting adalah rumusannya tidak karet. Maka, dengan ketentuan baru dalam revisi UU ITE ini tidak ada lagi pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti pasal 28 sebelumnya. Kalau ketentuan baru ini pada waktu lalu sudah diterapkan mungkin Ahmad Dhani tidak akan masuk penjara karena tidak memenuhi definisi antargolongan.

Jadi, ada aturan yang lebih spesifik dan jelas sehingga tidak ada lagi ketentuan karet dalam pasal tersebut karena ukurannya jelas. Sehingga pasal 28 ini semoga tidak lagi bisa digunakan untuk menjerat orang yang berbeda pendapat dengan penguasa.

Salah satu poin perubahan dalam revisi UU ITE (di antara 20 substansi terkait dengan pasal perubahan atau pasal sisipan dalam UU ITE) adalah perubahan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan terkait pemberlakukan beberapa pasal perubahan UU ITE dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Apa tanggapan Bapak?

Dalam revisi UU ITE ini juga dilakukan penyempurnaan UU agar senada dan senapas dengan konsep yang diatur dalam UU KUHP yang baru. Dalam UU KUHP yang baru dianut konsep rehabilitative dan restorative justice. Dengan ketentuan ini diatur tentang asas dualistik, bahwa orang baru bisa dipidana kalau mens rea terpenuhi. Ini sangat sesuai dengan apa yang diatur dalam UU ITE saat ini dan sudah sesuai dengan harapan publik.

Bagaimana harapan Bapak dengan pelaksanaan revisi UU ITE ini ke depan?

Melalui revisi UU ITE ini kita telah melakukan perbaikan hukum bersama-sama dengan sembilan fraksi di DPR. Sebetulnya dari sisi regulasi, perbaikan hukum ini sudah maksimal. Kita sudah memperbaiki dua undang-undang, yaitu UU ITE dan UU No 1 Tahun 1946 sudah tidak ada lagi. Ke depan kita masih perlu mendorong berbagai macam reformasi di bidang regulasi.

Kita berharap agar pemerintah bisa merespon cepat untuk membuat aturan turunan dari UU ITE ini berupa Peraturan Pemerintah (PP). Saya pikir ke depan kita tinggal menunggu peraturan pemerintahnya diterbitkan agar apa yang diatur di dalam undang-undang ini bisa dieksekusi. ❑

Gelar Adat Melayu Jambi untuk M. Syukur

M. Syukur

M.SYUKUR, anggota DPD RI dari Provinsi Jambi, kini menyandang gelar Depati Satrio Budayo Negeri. Penganugerahan gelar adat — yang artinya seorang pemimpin yang sangat gagah berani membangun budaya daerah – dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi dalam suatu acara di Balairung Sari LAM Provinsi Jambi, Kamis (04/01/2014).

Wakil Ketua Umum LAM, Hasan Basri, menjelaskan, pemberian gelar sebagai bentuk penghargaan tertinggi dari rakyat Jambi yang telah berhasil di tingkat nasional. Syukur dinilai layak menyandang gelar ini. Alasannya, Syukur dipandang sebagai tokoh nasional telah selama tiga periode menjadi wakil Jambi di DPD RI. “Ini membuktikan kalau dia disukai oleh masyarakat Jambi,” ujar Hasan Basri.

Alasan lainnya, Syukur dipandang sebagai sosok yang punya peran dalam mendorong kemajuan daerah Jambi. Dan, dia dipandang sebagai sosok yang telah banyak membantu masyarakat Jambi. Selain itu, mempunyai sikap dan kepribadian yang baik sebagai pejabat publik, serta mampu menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat Jambi.

Maka, wajar kalau masyarakat Jambi menyambut positif pemberian gelar Adat kepada M. Syukur. Selamat untuk Depati Satrio Budayo Negeri. ❑

DER

Bamsoet Raih National Figure

Teropong Democracy Award 2023

Bambang Soesatyo

UNTUK kesekian kalinya Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, menerima penghargaan atas kontribusinya, baik dalam hal kinerja maupun gagasan, dalam membangun peradaban demokrasi tanah air. Terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meraih penghargaan National Figur dalam ajang Teropong Democracy Awarad 2023 yang diselenggarakan oleh media Teropong Senayan.

Pengumuman pemberian penghargaan ini disampaikan secara virtual dalam ajang Teropong Democracy Award 2023, Sabtu (23/12/2023). Acara ini disaksikan oleh antara lain, Rohad Wiranto (Pemimpin Redaksi Teropong Senayan), Aktivis Reformasi Hariman Siregar, dan Ujang Komarudin selaku Juri Teropong Democracy Awards 2023.

Belum lama, Ketua DPR RI ke-20 ini juga mendapatkan penghargaan Juara I IDIA Award 2023 kategori Personal Pengguna Media Sosial Youtube dan Instagram Terbaik, diselenggarakan oleh Indonesia Digital Inisiative Award (IDIA) pimpinan Sebastian Salang. Dan, puluhan penghargaan lainnya yang diterima Bamsoet dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023.

"Penghargaan ini saya dedikasikan kepada segenap keluarga, sahabat, dan kolega, khususnya para pejuang demokrasi di seluruh penjuru tanah air yang senantiasa berusaha membangun dan memajukan demokrasi," ujar Legislator DPR RI dapil 7 Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. ❑

Memerankan RA, Soekinah dalam Monolog Otto Iskandar Dinata

Maudy Koesnaedy

ARTIS serba bisa **Maudy Koesnaedy** didapuk memerankan sosok RA. Soekirah, istri Pahlawan Nasional Otto Iskandar Dinata, dalam pementasan monolog bertajuk: 'Suamiku Oto dan Bel Pintu'. Pementasan monolog yang mengangkat kisah sejarah RA. Soekirah dalam mendampingi suaminya ini berlangsung di Teater Salihara. Jakarta, Selasa (12/12/2023).

"Wah, ini pertunjukan monolog yang sangat menantang. Sutradaranya Nia Dinata, yang tak lain cicit langsung dari tokohnya, sudah mengenal betul kehidupan sang tokoh," kata Maudy, pemeran Zainab dalam sinetron Doel Anak Sekolahan.

Artis memulai kariernya dari modeling dengan mengikuti pemilihan Abang None Jakarta tahun 1993, dalam monolog ini berusaha tampil seorisinal mungkin sebagai sosok RA. Soekirah. Untuk itu, dia mempersiapkan diri se-intens mungkin, terutama dalam pelafalan bahasa Jawa dan Sunda. ❑

DER

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram

Termegah dan Terbesar di Pulau Seribu Masjid

MATAHARI di Pulau Lombok belum terlalu tinggi, Ia bahkan baru saja menempati singgasananya. Panasnya belum terasa terik, terbukti masih banyak orang yang menantang untuk merasakan sengatnya. Tetapi, di pagi menjelang siang seperti itu, panas sinar matahari masih cukup bersahabat. Bahkan banyak orang yang sengaja berjemur, menantaang teriknya agar mendapatkan manfaatnya.

Suasana hangat sinar matahari pagi, itu terasa hingga ke Masjid Raya Hubbul Wathan atau yang biasa dikenal dengan Islamic Center Mataram. Di dalam ruang utama masjid, terlihat beberapa orang tengah menunaikan ibadah sunah Salat Duha dengan khusyuk. Mereka tampak berlama-lama dalam bersujud, seolah ingin memuaskan perasaan bathin untuk terus bercengkerama dengan Sang Khalik.

Mereka terlihat sangat tenang, tidak terusik sama sekali dengan keadaan sekitar. Tampak ingin terus menghambakan diri dengan Allah SWT, tak mau terganggu oleh kebisingan dunia. Bahkan, mereka juga tidak terusik dengan salah satu marbot yang sedang membersihkan karpet menggunakan vacum cleaner. Sehingga antara salat Duha dan membersihkan karpet masjid, keduanya bisa berjalan bersama, tanpa saling mengganggu.

Ada pula beberapa jamaah lain yang baru datang, mereka terlihat sangat mengagumi keindahan dan kemegahan yang dimiliki Masjid Raya Hubbul Wathan. Menenteng dan mengabadikan keberadaan mereka di dalam masjid menggunakan kamera HP. Juga mengambil gambar dari sudut-sudut terbaik yang ada di masjid. Tetapi episode ketakjuban itu tidak berlangsung begitu lama, sesaat kemudian mereka sudah larut dalam kekhusukan salat Tahiyatul Masjid.

Itulah sebagian pemandangan yang menyapa Majalah Majelis ketika mengunjungi Islamic Center Mataram, beberapa waktu lalu. Saat matahari belum genap seperempat jalan, dan waktu masih menunjuk pukul 8.30 pagi, masjid yang berada di tengah Kota Mataram itu sudah mengundang umat Islam untuk berduyung menghampiri. Terbukti dilantai dasar masjid juga telah berkumpul puluhan mahasiswa. Mereka datang untuk melaksanakan taklim, dikalangan mereka sendiri. Tak kalah ramainya, dengan perpustakaan masjid. Di tempat ini ada puluhan orang terpelajar sedang memelototi buku, dan juga monitor komputer. Mereka tengah asik dengan pekerjaannya masing-masing.

Ketika Majalah Majelis menanyakan kemeriahan Masjid Raya Hubbul Wathan kepada salah satu marbot, Dia menginfokan bahwa syiar Islam di Islamic Center Mataram memang nyaris tak pernah berhenti. Dari waktu ke waktu, terus mengalir umat Islam hadir di tempat tersebut. Sejak subuh hingga kembali subuh selama 24 jam, tujuh hari dalam satu minggu.

Syiar yang begitu meriah, menandakan bahwa Islamic Center Mataram bukan hanya masjid terbesar di pulau seribu masjid. Tetapi juga salah satu masjid paling sibuk diantara masjid-masjid yang lain. Apalagi posisinya berada di tengah kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Praktis, bukan hanya jamaah yang mudah singgah di sana, tetapi juga para pelancong, termasuk yang berasal dari luar provinsi NTB.

Asmaul Khusna

Sebagai salah satu tempat wisata religi di Kota Mataram, Masjid Raya Hubbul Wathan memiliki sejumlah daya tarik yang sanggup menghadirkan minat wisatawan untuk mengunjunginya. Masjid yang dapat menampung jamaah mencapai 15.000 orang, ini memiliki lima menara. Satu dari kelima menara, yang menjadi menara utama dan berada dibagian depan masjid memiliki tinggi mencapai 99 meter.

Bilangan 99 meter, itu untuk mengingatkan asmaul khusna (nama-nama Allah) yang jumlahnya sebanyak 99 nama. Dinamakan Hubbul Wathan Islamic Center, karena dimaksudkan agar masjid ini bisa memberikan kenyamanan seperti sedang berada di Tanah Suci. Sekaligus menjadi pusat kebudayaan Islam, wisata religi, aktivitas keagamaan, dan pasar seni.

Pembangunan Masjid Raya Hubbul Wathan Mataram, ini memakan waktu selama tiga tahun. Dimulai tanggal 9 Maret 2010 dan diresmikan pada 15 Desember 2013. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 74,749 meter persegi terdiri dari 4 lantai

dan 5 kubah.

Sebagai masjid kebanggan masyarakat NTB, tampilan interior masjid ini terbilang megah. Di atas langit-langit masjid terpampang keindahan motif tenun Sasak yang mengelilingi rangka kubah. Motif tenun Sasak ini pun berdampingan dengan motif kain batik Sasambo khas Nusa Tenggara Barat yang menjadi lapisan berwarna biru pada lampu yang berukuran sangat besar di tengah masjid.

dibagian depan masjid atau mihrab terdapat mimbar yang membuat bagian ini tampak semakin elegan. Warna keemasan yang berpadu padan dengan kontrasnya karpet merah, menyembulkan kesan kemewahan dan pembangkit semangat bagai para jamaah untuk terus beribadah. Sedangkan pada malam hari, kubah serta menara masjid akan menyala, menghadirkan warna-warn yang begitu cantik menerangi hingga ke pusat Kota Mataram.

Saat ini, keberadaan Masjid Raya Hubbul Wathan Mataram, menjadi penyempurna, bagi NTB yang tengah mentransmisikan dirinya sebagai kawasan Wisata Halal bagi para wisatawan. Dan Masjid Raya Hubbul Wathan mampu mengambil peran sebagai pusat syiar Islam di NTB. Apalagi, Masjid ini merupakan terbesar keenam di Asia Tenggara, setelah Masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Islamic Center Samarinda. ❑

MBO

Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc
Anggota Badan Pengkajian MPR RI Fraksi Gerindra

Wakil Rakyat Yang Pernah Bercita-Cita *Menjadi Pemain Sepak Bola*

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEJAK berstatus pelajar hingga mahasiswa, sosok bernas satu ini sudah akrab dengan dunia organisasi dan politik. Namun, pada awalnya, tidak sedetikpun terlintas untuk menjadi seorang wakil rakyat. Pria murah senyum ini mencritakan, saat remaja dulu, dia malah sangat menginginkan untuk menjadi seorang pemain sepakbola dan bergabung di tim Persib Bandung.

Namun, keinginan Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., atau biasa dipanggil Kang Sodik untuk bergabung dengan tim sepakbola kesayangannya itu tidak kesampaian. Suratan takdir membawanya terjun ke ranah politik. Dia kemudian bergabung di partai politik dan berkiprah menjadi seorang legislator handal.

Kepiawaiannya di dunia politik, tidak lepas dari pengaruh orang tuanya. Ibarat peribahasa menyatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itulah gambaran seorang Kang Sodik.

Kang Sodik lahir, tumbuh dan dibesarkan dari keluarga aktivis pergerakan. Ayahnya, KH. E. Hasbullah Hafidzi (alm) adalah seorang ulama dan juga pendidik. Selain itu, beliau juga seorang pejuang yang terlibat langsung di garis depan. Pada masa revolusi beliau termasuk salah seorang anggota laskar perjuangan rakyat Hizbullah. Sedangkan Ibunya, Hj. Dedeh Ruyati, adalah seorang guru dan aktivis pergerakan wanita Islam.

Diasuh dan dibina oleh pasangan dari orangtua – yang keduanya aktif dalam lingkup pergerakan — membuat karakteristik dan jiwa aktivis menempel dan terus tumbuh seiring berjalannya waktu pada diri Kang Sodik. Maka, wajar kalau sejak usia dini pada dirinya sudah mengalir jiwa pergerakan yang diwariskan oleh kedua orangtuanya.

Semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga pendidikan tinggi ditempuhnya di kota kelahirannya. Kang Sodik lahir di Kota Bandung, Jawa Barat, pada 02 Agustus 1957. Tahun 1965 Sodik mengikuti Pendidikan dasar di SD Negeri Coblong 3 Bandung, dan tamat 1971. Ketika duduk di bangku sekolah dasar inilah Sodik memulai debutnya di bidang organisasi dan pergerakan. Ketika di SD Negeri Coblong 3, Sodik dipercaya menjadi Ketua Murid, dan aktif di pergerakan Pramuka.

Kegiatan kepramukaan ini berlanjut hingga di jenjang Pendidikan berikutnya, yaitu ketika duduk di bangku SMP Negeri V Bandung (1971-1975), dan SMA Negeri V Bandung (1975-1978). Hingga kemudian dia menjadi Pembina Pramuka Gudep STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) dan Gudep Darul Hikam. Selain di pergerakan pramuka, yaitu pada saat duduk di bangku SMA, Sodik juga aktif di

organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat.

Begitu pula ketika mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, Sodik tak pernah lepas dari kegiatan kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus. Untuk organisasi intra kampus, Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Unpad Bandung. Untuk organisasi ektra, dia menjabat Sekretaris Lembaga Dakwah HMI Cabang Bandung.

Namun, aktivitas di dunia kampus, mulai ditinggalkan setelah Kang Sodik menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi. Di antara mahasiswa seangkatannya, Kang Sodik termasuk sepuluh mahasiswa tercepat menyelesaikan studinya. Ia diwisuda tahun 1980. Dan, mulai sejak itu, medan perjuangan Kang Sodik beralih ke bidang sosial keagamaan, pendidikan, dan kemudian lanjut terjun ke dunia politik.

FOTO-FOTO: STIMEWA

Terjun Politik Sempat Ditentang

Berbagai jabatan diembannya setelah meninggalkan dunia kampus. Pada tahun 2000 hingga 2005, Kang Sodik menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. Selain memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, tahun 2004. Lalu, pada tahun 2006 hingga 2016, dia menjabat Sekretaris Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat. Selanjutnya, 2010-2017, menjadi Anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat.

Di bidang Pendidikan, ia juga sangat aktif di berbagai organisasi pendidikan. Antara lain, tahun 2010 menjabat Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung. Lalu, tahun 2013 menjabat Dewan Penasihat Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH). Kemudian pada tahun 2014, menjabat sebagai Pembina di PGRI Kota Bandung dan Ikatan Guru TK Kota Bandung.

Kang Sodik juga sangat dikenal sebagai aktifis pendidikan dan pembinaan masyarakat. Itu ditunjukkan dengan kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Darul Hikam yang mengelola TK-SD-SMP-SMA Darul Hikam International School, dan Direktur Pusat Data dan Dinamika Ummat di Bandung. Bukan hanya itu, Kang Sodik juga tercatat sebagai seorang dosen di Universitas Telkom Bandung (2013), dan sempat mengajar di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) di Jatinangor.

Kang Sodik mengaku, semua sifat dan karakter dirinya, serta semangat pergerakan tumbuh berkat didikan ayahnya. “Saya mendapat pendidikan Islam yang dalam dan luas, khususnya Alqur’an dan semangat perjuangan bagi agama, bangsa, dan negara dari ayah saya,” ujarnya.

Rupanya hingar bingarnya dunia perpolitikan pada era 2000-an membuat dirinya berpikir untuk terjun ke dunia politik, agar wawasan dan pengetahuannya selama ini bisa dipersembahkan untuk masyarakyat secara luas. Pada awalnya, niatnya ini mendapatkan tentangan dari keluarga, meski pada akhirnya setuju dengan mempertimbangkan berbagai dampak dan manfaat positif buat masyarakat, bukan hanya untuk warga Bandung tapi juga rakyat Indonesia secara luas.

Kang Sodikpun menambatkan pilihannya pada partai politik yang dibentuk oleh Prabowo Subianto. Ia pun mencatatkan diri sebagai kader Partai Gerindra. Pada Pileg tahun 2014, Kang Sodik maju sebagai calon legislative dari dapil Jawa Barat I. Hasilnya, Ia terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 dengan perolehan 41.081 suara, dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Di periode selanjutnya (2019-2024), Kang Sodik maju kembali dan terpilih menjadi anggota DPR RI juga dari dapil Jawa Barat I, yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Di periode kedua ini, Kang Sodik sempat bertugas di Komisi II dan dipercaya sebagai Kapoksi. Kini ia bertugas di Komisi X DPR RI membidangi Pendidikan, Riset, Olahraga dan Kepariwisataan.

Melenggangnya Kang Sodik ke Senayan, tak lepas dari dukungan basis massa yang dimilikinya, yang sebelumnya telah dibina melalui aktivitas dakwah dan berbagai organisasi yang diikutinya.

Peran dan Aktivitas di DPR dan MPR

Dalam perannya sebagai Anggota Komisi X DPR RI, Sodik Mudjahid banyak bertatap muka dengan masyarakat, melakukan serap aspirasi

terkait permasalahan yang menjadi bidang kerjanya. Antara lain, saat memimpin kunjungan kerja Komisi X ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, tahun 2023 lalu.

Di acara ini Kang Sodik dan anggota Komisi X lainnya menampung aspirasi masyarakat guna memperbaiki sistem pendidikan perguruan tinggi, baik negeri atau pun swasta. Komisi X berpendapat, saat ini sangat diperlukan penguatan kemampuan Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS, dalam mencetak SDM yang berpengetahuan dan terampil, berkarakter, bermoral, dan bermental kuat, peduli, serta bertanggung jawab.

"Perbaikan sistem dan peningkatan kesejahteraan untuk para dosen, perbaikan sistem dalam seleksi siswa mandiri. Kami mendapat usulan dan aspirasi dalam hal tersebut," ujar Wakil Direktur Pusat Dakwah Islam Provinsi Jawa Barat 1998-2002 ini.

Kunjungan ini, lanjut Kang Sodik, bertujuan melaksanakan fungsi Komisi X di bidang pengawasan pelaksanaan pendidikan tinggi, terutama dalam mencapai tujuan menyiapkan SDM yang berpengetahuan dan terampil, berkarakter, bermoral, bermental kuat, peduli, dan bertanggung jawab.

"Perguruan tinggi dituntut mampu mencetak SDM unggul, terampil dan berkarakter. Tapi, meskipun demikian, perguruan tinggi masih menghadapi masalah mutu, relevansi, akses, daya saing, dan tata kelola," ujar Bendahara Bazis Jawa Barat 1998-2003 ini.

Sebagai anggota MPR RI, suami dari Hj. Yani Mulyani, ini aktif melaksanakan tugas Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat. "Tugas sosialisasi ini adalah amanah dari UU MD3 dan ini sangat penting untuk masyarakat, terutama generasi muda," katanya.

Saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di SMA Darul Hikam Non Asrama, Kota Bandung, Februari 2023, Kang Sodik mengungkapkan, dengan kuatnya pemahaman dan implementasi Empat Pilar MPR maka persatuan dan kesatuan bangsa makin kuat pula, dan diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa.

"Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan penguatan dan pemahaman tentang peran Empat Pilar, sehingga segala perbedaan akan menjadi kekuatan untuk mempertahankan NKRI dari berbagai tantangan yang terjadi, sehingga masyarakat Indonesia akan lebih mencintai negaranya," katanya.

Kang Sodik sebagai anggota Badan Pengkajian MPR RI juga menaruh perhatian kepada penyelenggaraan pesta demokrasi 2024. Dia mengatakan, Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 adalah agenda bangsa yang sangat berat. Sebab, penyelenggaraannya secara serentak, namun dengan visi dan misi yang sangat beragam dari para kontestan.

"Yang terpenting semua kontestan menjalankan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Satu lagi harus tetap menjaga nuansa persatuan, kesatuan, dan semangat untuk membangun bangsa," katanya.

Bersama anggota Badan Pengkajian MPR lainnya, Kang Sodik sempat mengunjungi Bawaslu dengan agenda utama untuk melakukan diskusi, serap aspirasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 serta seputar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Ada masukan dari kami dan masukan itu bersifat mendasar, seperti kualitas demokrasi hingga penguatan lembaga pelaksana Pemilu. Hal lainnya adalah soal hak kewenangan Bawaslu, KPU, dan DKPP yang perlu dikembangkan lagi," ujarnya. ❑

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DER

Biodata

Nama Lengkap : **Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.**
Temnpat/Tgl. Lahir : Kota Bandung, 02 Agustus 1957
Istri : Hj. Yani Mulyani, dengan 3 anak

Pendidikan:
- S-1 Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran (1980)
- S-2 Program Magister Spesialisasi Agribisnis, Universitas Padjadjaran (1992)
- S-3 Program Doktor Spesialisasi Total Quality Management untuk Lembaga Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2011)
- Kursus/Diklat Perencanaan dan Pembangunan Kota di IIHS, Netherland (1990)
- Kursus/Diklat Lemhanas (2009)

Riwayat Pekerjaan
- Anggota DPR/MPR periode 2014-2019 dan 2019-2024
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR (2014-2019)
- Kapoksi II DPR RI (2019)
- Anggota Badan Pengkajian MPR RI

Penghargaan
- Pelatih Terbaik Bidang Pengembangan Koperasi dari International Labour Organization (ILO) Tahun 1995
- Penghargaan Gubernur Jabar Untuk Reformasi BAZIZ Jabar dari Pemprov Jabar (2000)

Seberapa Penting Efek Ekor Jas?

COATTAIL EFFECT atau efek ekor jas merupakan sebuah peristilahan yang tidak asing lagi dalam konteks politik elektoral nasional. Menjelang Pemilu 2024, konsepsi efek ekor jas menjadi suatu hal yang relevan untuk dibicarakan, terutama dipraktikkan. Kita bisa meletakkan konsepsi ini pada berbagai konteks. Dalam konteks terbatas, efek ekor jas adalah variabel pemenangan dalam Pemilu, yang mana pengejawantahannya lazim dilakukan oleh partai politik untuk mengkatalisasi perolehan suara Pileg dan Pilpres. Tapi dalam konteks yang lebih luas, penerapan efek ekor jas dalam Pemilu merupakan bentuk penguatan mutu demokrasi.

Fungsi dasar partai politik

Dewasa ini, demokrasi bergerak lurus menuju bentuknya yang paripurna, yakni demokrasi matang seperti banyak yang diroyeksikan oleh para teknokrat dan akademisi politik. Dalam arah gerak lurus nan progresif dari demokrasi tersebut, peran, fungsi, dan kontribusi partai politik sangatlah besar. Partai politik sebagai pilar demokrasi secara berkesinambungan terus-menerus melakukan improvisasi struktural maupun kultural. Salah satu bentuk komitmen penguatan demokrasi yang dilakukan oleh partai politik adalah pada aspek pendidikan, kaderisasi, hingga kandidasi politik yang merupakan fungsi-fungsi dasar partai politik.

Penggunaan efek ekor jas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi dasar partai politik tersebut sangat penting, dalam hal mana benefitnya dapat dirasakan ke dalam oleh partai politik, dan ke luar oleh masyarakat. Penerapakan efek ekor jas secara konkret diwujudkan dalam bentuk kandidasi kader suatu partai politik dalam kontestasi Pemilu, baik Pemilu di level legislatif, maupun di level eksekutif, seperti Pilpres dan Pilkada. Kandidasi kader internal dalam Pemilu tentu ada benang merahnya dengan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, dalam hal mana kader yang diajukan adalah produk terbaik dari proses pendidikan dan kaderisasi jangka panjang yang dilakukan.

Tidak dimungkiri bahwa politik biaya tinggi yang menjadi kendala dalam sistem elektoral kita dewasa ini telah menjadi sumbu yang menyulut banyak partai politik untuk menempuh cara praktis dalam berpemilu. Merekrut artis atau figur publik sebagai bakal calon legislatif kerapkali dipandang potensial ketimbang memajukan kader ideologis sendiri karena artis atau figur publik tersebut sudah memiliki modalitas dasar dalam bentuk popularitas yang tinggal dielaborasi menjadi elektabilitas. Cara ini tidak salah atau keliru, namun harus diakui mengurangi esensi dari eksistensi dan kewajiban partai politik untuk melakukan rekrutmen politik dan kaderisasi politik yang paralel dengan kandidasi politik yang dilakukan.

Dengan pemetaan masalah sedemikian, saya melihat relevansi dan urgensi dari pentingnya memainkan efek ekor jas baik sebagai strategi pemenangan maupun ikhtiar penguatan fungsi partai politik yang dapat berkontribusi bagi penguatan demokrasi. Ada banyak definisi dari efek ekor jas. Golder, Hicker, dan Stoll memaknai efer ekor jas atau mantel sebagai korelasi dari efek pemilihan presiden atas konfigurasi suara dalam parlemen. Tapi banyak juga yang memaknainya secara lebih luas sebagai efek ikutan dari seorang tokoh atau figur yang memberikan limpahan insentif elektoral kepada para kontestan Pemilu lainnya, utamanya dalam satu partai politik. Sebagai contoh, majunya seorang kader dari partai politik tertentu sebagai calon presiden akan memberikan insentif elektoral kepada partai politiknya dalam memenuhi *parliamentary threshold*, menaikkan perolehan suara dari Pemilu

Oleh:
Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.
Wakil Ketua MPR RI

sebelumnya, begitupula dengan mendongkrak perolehan suara rekan-rekannya yang berkontestasi di Pileg.

Kendala Penerapan

Berjalannya politik elektoral di Indonesia sangat dinamis, sehingga implementasi efek ekor jas ini tidak bisa seideal dalam tataran wacana. Keinginan sebuah partai politik untuk memajukan kadernya sendiri sebagai calon presiden misalnya, akan terbentur oleh *presidential threshold* yang ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, keinginan untuk mengusung calon sendiri ini membutuhkan prasyarat, yakni pemenuhan atas ambang batas pencalonan presiden tersebut. Bagi yang perolehan suara atau kursinya memenuhi, tentu tidak akan menjadi permasalahan karena bisa mengusung sendiri. Tapi akan berbeda bagi yang tidak mencukupi karena memerlukan mekanisme koalisi dengan partai politik lain. Prosesnya lebih panjang karena akan ada muatan negosiasi dan kompromi di dalamnya.

Beragam kompleksitas dan *barrier to implement* mekanisme efek ekor jas tersebut, tidak mengurangi sedikitpun esensinya. Kita bisa menilik perjalanan panjang Pilpres 2019 yang lalu, ini sekedar sebagai contoh empirik. Mereka yang mengusung Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden, baik itu partai politik asal maupun yang mendukung dalam koalisi, mendapatkan insentif elektoral. Partai politik asal tentu mendapatkan insentif elektoral yang lebih besar ketimbang partai politik lainnya dalam koalisi. Dalam bahasa lugasnya, insentif elektoral ini hadir karena ada personifikasi dan pelekatan yang kuat antara sang tokoh dengan partai politik pengusung.

Instrumen demokrasi

Mekanisme efek ekor jas ini tidak bisa semata-mata dimaknai sebagai strategi pemenangan partai politik, tapi kita juga harus melihatnya sebagai alat penguatan demokrasi seperti yang saya singgung sebelumnya. Bahkan tidak berlebihan juga apabila penggunaan mekanisme efek ekor jas ini sebagai ikhtiar mulia partai politik untuk memperkokoh demokrasi melalui paralelisasi antara kaderisasi dan kandidasi. Upaya yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini misalnya, yang mengusung kader terbaiknya Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden merupakan implementasi riil dari cara pandang tersebut. Pengusungan ini di satu sisi merupakan bentuk keberhasilan kaderisasi yang dilakukan oleh PKB, serta kandidasi yang ditujukan untuk pencapaian target internal partai dan perbaikan mutu demokrasi di tengah banyaknya partai politik yang tergoda untuk mengusung calon yang bukan kader sendiri.

Tulisan ini saya maksudkan untuk menghidupkan kembali diskursus intelektual mengenai urgensi efek ekor jas ini sebagai strategi pemenangan yang selaras dengan objektif penguatan partai politik dan demokrasi. Saya dari rumah kebangsaan sangat berharap agar Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat dapat menjadi momentum penguatan kapasitas partai politik sebagai pilar demokrasi. Tentu saja efek ekor jas sebagai strategi pemenangan tidak menegasikan variabel pemenangan lainnya seperti kekuatan mesin politik partai, keunggulan *party ID* atau *blocking* suara di daerah tertentu, visi misi dan program kerja partai politik dan calon, ataupun kekuatan relawan dan simpatisan. Semuanya harus bergerak secara sinergis dan kolaboratif dan berorientasi pada penguatan demokrasi yang kita harapkan bersama. ❑

Membangun Masyarakat Berlandasan Nilai-Nilai Islam

Alquran dan bahasa Arab dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Di dalamnya ada term-term politik. Negara Madinah maju karena menjadikan Alquran sebagai sumber kehidupan.

ALQURAN merupakan kitab suci umat Islam. Kitab suci Qur'an memandu umat dalam menjalani kehidupan di dunia agar bisa selamat hingga nanti akhirnya masuk surga. Sebagai kitab suci, Alquran sudah banyak dikupas, dibahas, dan ditulis, tidak hanya oleh umat Islam namun juga umat lain yang tertarik untuk mengetahui dan mendalami isinya.

Salah satu dari sekian banyak orang yang menulis tentang Alquran itu adalah Wakil Ketua MPR Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA. Buku karya politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu berjudul: *Bahasan Politik Al-Qur'an. Konsep dan Aktualisasinya Dalam Sejarah.* Buku dengan *cover* perpaduan warna hijau dan putih itu memiliki ketebalan xvi + 292 halaman, terbagi dalam 3 bab.

Buku ini diberi kata pengantar oleh Ketua Umum PKB Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, MSi.; yang saat ini menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden 2024. Di halaman xii, Muhaimin Iskandar menyebutkan, buku yang ditulis oleh Jazilul Fawaid adalah suatu usaha akademik yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan pemahaman umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, tentang demokrasi dan politik yang Islami.

Politik Islami yang dimaksud di sini bukanlah gerakan politik ideologis untuk melegalformalkan Islam, namun politik Islami adalah praktik berpolitik yang dibangun di atas nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi moralitas dan musyawarah (demokrasi) dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Oleh karena itu ketika membaca buku ini, terus terang saya berdecak kagum," ujar pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, itu.

Dalam *Prolog*, halaman 1, Jazilul Fawaid menerangkan, para ulama sepakat bahwa Alquran adalah *kalamullah* yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW. Karena yang menjadi penerima dan objek sosiologi historiknya adalah bangsa Arab, maka wajar bila wujud *kalamullah* itu berbahasa Arab, seperti Injil yang berbahasa Ibrani.

Ditegaskan oleh Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, Quran menjadi satu-satunya bahasa Arab yang tidak dapat tertandingi kemukjizatannya, baik dari sisi kandungan keilmuannya maupun kesusasteraannya.

Ditegaskan oleh pria asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu Alquran dan bahasa Arab dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam Islam, bahasa Arab dimuliakan bukan sebagai bahasa kultural ilmiah melainkan dianggap suci karena ia menjadi bagian integral dari Alquran yang bunyi dan pengucapannya memegang peranan penting dalam ritus-ritus keagamaan Islam.

Setelah mengupas soal bahasa, di Bab II, *Isyarat Alquran Tentang Politik*, halaman 63, Jazilul Fawaid membeberkan soal *term-term* politik dalam Alquran. Diungkap, dalam Alquran banyak ditemukan istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik. Di antara istilah-istilah tersebut adalah *al-hukm* (sistem pemerintahan/hukum), *istikhlaf* (khalifah/suksesi kekuasaan), *isti'mar* (memerintah), *at-tamkin* (penempatan), *al-imam* (pemimpin/imam), *al-ummah* (rakyat/umat), *al-mulk* (kekuasaan), *asy-syura* (musyawarah), dan *ulil amri*.

Selanjutnya, di Bab III, mengulas tentang: *Dinamika Dan Aktualisasi Bahasa Politik Alquran Dalam Sejarah*, mantan aktivis PMII itu memaparkan seputar implementasi bahasa-bahasa itu dalam sejarah umat manusia.

Diungkap dalam halaman 41, negara Madinah dipimpin Rasulullah SAW selama kurang lebih 10 tahun. Pada masa kepemimpinannya telah diletakkan prinsip-prinsip dasar bagi pemerintahan Islami yang bersumber dari Alquran, sehingga dapat berkembang dengan pesat dan maju karena Beliau selalu melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan apa yang telah diucapkan. Hal ini sebagai suri tauladan bagi umatnya. ❑

AWG

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

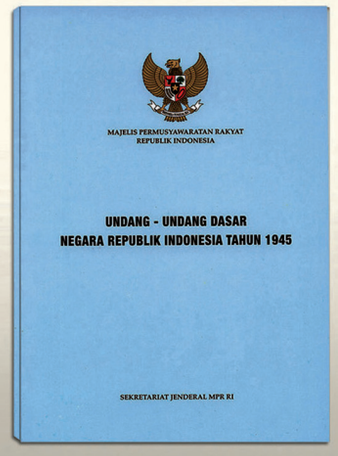

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI